



BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA MAKASSAR

ISSN 1411-2930

BULLETIN

Somba Opu

Volume 17 No. 20 Oktober 2014



18.05.2007



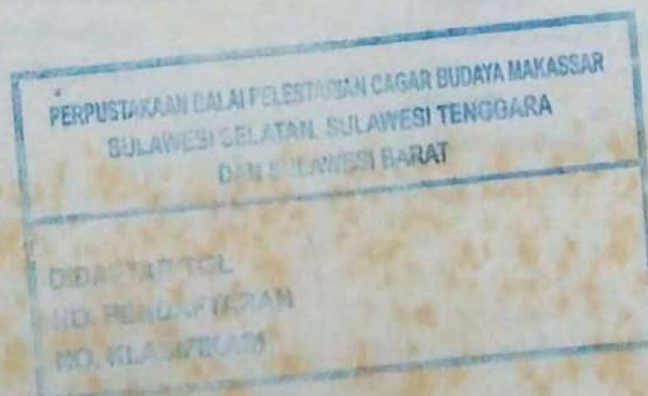
ISSN 1411-2930

Somba Opu

Volume 17 No. 20, Oktober 2014

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai media kajian ilmiah, deskripsi dan survey mengenai Pelestarian Cagar Budaya serta kegiatan mengenai ilmu-ilmu budaya, yang meliputi bidang-bidang : sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, arsitektur, dan bidang-bidang lain yang berkaitan.

Redaksi menerima naskah dari para ahli, praktisi atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian cagar budaya dan bidang-bidang ilmu yang menjadi cakupan penerbitan bulletin ini. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris ; panjang naskah 15-20 halaman kuarto (termasuk daftar pustaka, dan lampiran-lampiran), 1,5 spasi. Tulisan harus asli (bukan jiplakan), boleh terjemahan atau saduran asal disebutkan sumbernya dengan jelas. Redaksi berhak menyunting tulisan/artikel tanpa mengubah atau menyimpang dari isi. Tulisan yang dimuat dalam Bulletin Somba Opu walau berisi suatu kritik atau perbedaan pendapat, hal ini bukanlah pendapat Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar sehingga semua tulisan yang telah dimuat adalah pendapat pribadi dari penulis tersebut.



Somba Opu

Diterbitkan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

Penanggungjawab
Andi Muhammad Said

Redaktur
Muhammad Ramli

Penyunting/Editor
Muslimin A.R. Effendy

Pemimpin Umum
Syahrawi Mannan

Redaktur Pelaksana
Irwani Rasyid

Redaksi
Muh. Nasir
Nurbiyah Abubakar

Fotografer
Kamaruddin

Desain Sampul dan Isi
Achmad Abduh

Distribusi
Karrama, Jamaluddin, Anshar

Sekretariat
Sukma Ramdhani

Alamat Redaksi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar,
Kompleks Benteng Ujung Pandang, Jl. Ujung
Pandang No. 1 Makassar – 90111

Telepon
(0411) 3631117, fax. (0411)-3621702

Email
sombaopubulletin@yahoo.co.id.

Salam Redaksi

Sejak terbit pertamakali pada 1997, Bulletin Somba Opu [BSO] terus berbenah diri dalam upaya menyampaikan informasi aktual dan terpercaya seputar dinamika pelestarian cagar budaya, aspek-aspek teoritis dan gagasan-gagasan baru dalam wacana keilmuan, baik humaniora maupun ilmu-ilmu sosial. Semua itu kami lakukan hanya untuk memberikan bacaan yang bermutu bagi para pembaca BSO. Memang tidak mudah memenuhi harapan publik untuk menyuarakan dan menghadirkan kembali gagasan kreatif tersebut melalui media yang sederhana ini. Dibutuhkan "semangat" untuk bisa menerobos dan menelikung keluar dari frame tradisi yang ada, yang hanya membolehkan persoalan-persoalan teknis, program dan hasil kegiatan yang bisa ditampilkan. Dengan begini, maka keinginan bersama untuk membangun sebuah 'kekuatan' berilmu, menyusun rencana dan standar operasional prosedur yang tepat dalam pengelolaan cagar budaya dapat mencapai tujuan. Kini, di tengah keriuhan kontestasi kekuasaan, hegemoni wacana menyangkut peningkatan pendapatan daerah melalui model pemanfaatan sumber daya alam dan budaya, penataan ruang perkotaan yang makin menegasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjadi tantangan bagi para pakar, praktisi dan pemerhati budaya untuk memberikan tekanan agar perencanaan pembangunan, semangat mengeksplorasi sumber daya alam dilaksanakan beriringan dengan keinginan untuk menghijaukan lingkungan, melestarikan situs dan kawasan cagar budaya sekitarnya.

Selamat membaca!



Daftar Isi

Pemanfaatan Cagar budaya <i>Akin Duli</i>	1
Dimensi Tauhid pada Beberapa Inskripsi Makam Kuno Islam di Sulawesi Selatan (Kajian Arkeo-Epigrafi) <i>Muhaeminah</i>	8
Kota Watampone pada Masa Pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri dan La Mappanyukki: Kajian Arkeologi Keruangan <i>Nurfajriyani</i>	27
Pascaprosesual/Pascamodernisme; Sebuah Kilas Balik Perdebatan Lama <i>Muh. Ihsan D.</i>	85
Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan <i>Edward L. Poeinggomang</i>	103
Peran LSM dalam Pengelolaan Museum Situs : Studi Kasus Beberapa Museum Situs di Tana Toraja <i>M. Nur</i>	113

Pemanfaatan Cagar Budaya

Akin Duli

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan warisan budaya (*cultural heritage*). Hampir seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, baik darat maupun laut, ditemukan adanya benda-benda peninggalan warisan budaya, atau dalam bahasa hubukum disebut dengan cagar budaya. Peninggalan budaya atau warisan budaya telah ada sejak awal adanya manusia, yaitu dimualai dari jaman prasejarah yaitu jaman batu (jaman berburu dan bercocok tanam), jaman logam (perundagian atau kemahiran teknik menuang logam), jaman sejarah (klasik, Islam, kolonial), etnografi, revolusi hingga jaman modern. Bahkan kekayaan warisan budaya Bangsa Indonesia telah diakui dunia, iaitu dengan masuknya beberapa peninggalan budaya kita ke daftar yang diakui dan dilindungi oleh badan duni - UNESCO, seperti Candi Borobudur (1991), Kompleks Candi Prambanan (1991), situs Prasejarah Sangiran (1996) dan beberapa warisan budaya yang lain. Baru-baru ini, karya Naskah La-Galigo, telah diakui oleh dunia sebagai salah satu karya klasik yang perlu diapresiasi dan dilindungi, dengan diterimanya sertifikat dari UNESCO oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan suatu kebanggan bagi daerah kita, hendaknya menjadi motivasi dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya budaya kita secara bertanggungjawab di masa akan datang. Warisan budaya dari Sulawesi Selatan yang sementara dalam proses pengusulan ke UNESCO untuk kategori *World Haritage*, adalah kawasan budaya Tana Toraja dan kawasan budaya dan karst Maros. Demikian pula bahwa kekayaan warisan budaya kita di laut seperti kapal-kapal karam sangat potensial juga untuk dikelola dan dimanfaatkan.

3. Hak Kepemilikan dan Pelestarian

Seperti telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 bahwa cagar budaya dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk cagar budaya yang bergerak biasanya dimiliki secara perorangan, baik diperoleh secara turun-temurun atau diperoleh secara tidak sengaja (penemuan). Misalnya berbagai jenis senjata seperti keris, tombak, pedang, perkakas rumah tangga seperti benda-benda keramik asing, maupun berbagai perhiasan yang berasal dari masa lampau. Selain itu, ada pula cagar budaya bergerak yang tidak ada pemiliknya, seperti benda-benda yang ditemukan tergeletak di pekarangan maupun di persawahan penduduk, akan tetapi pemilik sawah maupun pekarangan tersebut tidak merasa memiliki benda tersebut. Misalnya arca-arca lepas, lesung batu, yoni maupun lingga yang ditemukan di pekarangan maupun persawahan milik masyarakat. Sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak pada umumnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Antara lain seperti gua-gua yang mempunyai konteks dengan kehidupan masa prasejarah, bangunan atau monument megalitik, candi, klinteng, makam serta masjid dan gereja tua, dan lain-lain. Untuk kawasan cagar budaya pada umumnya masih dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi dalam pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah, sehingga para pemilik yang berada dalam suatu kawasan cagar budaya tersebut dibatasi oleh berbagai aturan yang menyangkut tentang pengelolaan cagar budaya yang dimilikinya. Pada hakekatnya baik cagar budaya maupun kawasan cagar budaya keduanya dikuasai oleh pemerintah dan terikat dalam suatu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Cagar budaya dan kawasan cagar budaya dapat dimiliki oleh masyarakat akan tetapi tidak dapat diposisikan sebagai asset pribadi yang dapat dengan mudah diperjual-belikan ataupun diperlakukan seperti asset pribadi lain yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai cagar budaya.

Pelestarian cagar budaya dan Kawasan cagar budaya adalah kegiatan untuk mempertahankan wujud secara fisik yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan fungsinya sehingga mendekati pada keadaan semula. Dalam mempertahankan fungsi cagar budaya dan Kawasan cagar budaya harus mengacu pada pengertian *living monument*, yaitu cagar budaya yang hingga sekarang masih dimanfaatkan sesuai dengan fungsi semula dan *dead monument*, yaitu cagar budaya yang saat ditemukan sudah tidak dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi semula, seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010. Bagi cagar budaya yang sudah tidak difungsikan sebagaimana fungsi semula harus dipertahankan agar tidak difungsikan kembali, sedang cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang bersifat *living monument* tetap dapat difungsikan oleh masyarakat pendukungnya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kelestarian dan

pelestariannya. Pelestarian cagar budaya dan kawasan cagar budaya dilakukan dengan perlindungan hukum (UU, PP, PERDA, SK atau aturan lainnya) dan perlindungan secara fisik. Langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah melakukan pemintakatan atau *zoning*. Langkah pemintakatan ini selain bertujuan melestarikan obyek, juga dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan lain terutama yang terkait dengan pemanfaatan cagar budaya dan Kawasan cagar budaya tersebut. Penentuan batas-batas *zoning*, biasanya terdiri dari *zoning* inti, penyangga dan pengembangan. Upaya pelestarian yang lain adalah dengan cara preservasi dan konservasi.

4. Pemanfaatan Cagar budaya

Oleh karena faktor kepentingan yang beragam dari berbagai pihak dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya budaya, maka hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi dan pemberian makna yang berbeda terhadap cagar budaya. Pemanfaatan sumberdaya budaya sering memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada sumberdaya budaya sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul seiring dengan pemanfaatan sumberdaya yang sangat eksploitatif. Agar pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi dan ekonomis saja, maka diperlukan pemahaman terhadap aspek yuridis, aspek arkeologis serta aspek manajerial. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tersebut.

Tujuan akhir dari pelestarian cagar budaya dan kawasan cagar budaya, adalah pemanfaatannya. Secara teoritik dengan berdasarkan aturan perundangan, seperti telah diatur dalam UU No.11 tahun 2010, maka cagar budaya dan kawasan cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain :

1. Ilmu pengetahuan, yaitu pemanfaatan seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, antropologi, sejarah, arsitektur, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada hubungannya dengan cagar budaya.
2. Agama, yaitu pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan keagamaan, misalnya cagar budaya yang masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya untuk kepentingan keagamaan, tidak boleh dibatasi fungsi-fungsi tersebut, yang penting tetap menjaga kelestarian, keselamatan dan kebersihannya.

3. Kreativitas seni, yaitu bahwa cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis dan fotografer untuk dapat memanfaatkan obyek cagar budaya sebagai obyek yang dapat membangkitkan kreativitas dalam berkarya.
4. Pendidikan, bahwa cagar budaya mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya perlu dipahami oleh generasi muda kita, baik dalam sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun dalam sistem pendidikan formal. Bentuk dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cagar budaya, perlu untuk diajarkan kepada peserta didik (SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi), dengan menyusun kurikulum dan buku ajar yang berhubungan dengan Cagar budaya. Muatan lokal masing-masing daerah (tingkat Propinsi dan Kabupaten) seharusnya mempunyai mata pelajaran dan buku ajar tentang cagar budaya atau nilai-nilai yang dikandungnya yang ada di daerah masing-masing.
5. Rekreasi dan pariwisata, yaitu pemanfaatan cagar budaya dan kawasan cagar budaya untuk kepentingan sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya. Cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang dikelola dengan baik, lingkungannya ditata sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian dan memberikan kenyamanan, apalagi kalau cagar budaya atau kawasan cagar budaya memang berada pada lingkungan alam yang menarik dan eksotik, maka akan menjadi potensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata dan dapat mendukung berjalannya roda industri pariwisata di suatu daerah.
6. Representasi simbolik, yaitu bahwa cagar budaya ataupun kawasan cagar budaya kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia. Contoh adalah Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) di Makassar sebagai lambang Pemerintah Kota Makassar, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin sebagai simbol kebesaran Kerajaan Gowa, bahkan banyak cagar budaya yang menjadi simbol kebesaran manusia secara individu, kelompok atau komunitas, etnik bahkan Negara.
7. Alat Legitimasi Sosial, banyak para pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai cagar budaya tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menggunakan cagar budaya sebagai simbol kebesaran ataupun sebagai simbol legitimasi sosial.
8. Solidaritas sosial dan integrasi, yaitu bahwa cagar budaya dapat dijadikan sebagai alat untuk membina solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat. Banyak contoh cagar budaya, seperti makam para pembesar, pada saat-saat tertentu

para ahli waris yang merasa keturunan mengadakan acara ziarah secara bersama-sama, maka pada saat itulah akan muncul kesadaran di antara mereka. Rumah-rumah adat atau bekas istana-istana kerajaan, sering berfungsi sebagai media untuk membina solidaritas dan integrasi sosial, dan masih banyak cagar budaya lainnya yang digunakan sebagai medium dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat berfungsi sebagai media solidaritas dan integrasi sosial.

9. Ekonomi, yaitu cagar budaya dan kawasan cagar budaya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya, akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat di sekitar obyek. Pemerintahpun juga akan mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan retribusi.

5. Penutup

Dalam UU No. 11 tahun 2010, telah digariskan bahwa pemanfaatan cagar budaya atau kawasan cagar budaya dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan potensi sumber daya budaya atau cagar budaya atau kawasan cagar budaya dapat diwujudkan apabila sumber daya tersebut dapat dikelola dengan baik dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademis, praktis yang sesuai dengan regulasi yang ada. Hal yang patut selalu diingat, bahwa cagar budaya atau kawasan cagar budaya dalam pemanfaatannya, sesuai dengan amanat UU, adalah untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Marilah kita membangun dengan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya atau kawasan cagar budaya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat memberi akses kepada masyarakat yang seluas-luasnya.



Daftar Pustaka

Binford, L. R.

1988 *Working at Archaeology*. New York: Academic Press.

Carman, J.

2001 *Archaeology and Heritage: An Introduction*. Continuum. London-New York.

Duli, A., dan Nur, M

2004 *Prasejarah Sulawesi*. Makassar : Jurusan Arkeologi Unhas.

Gunadi, K.H.

1996 "Pemikiran Kembali Tentang Pengertian Situs Arkeologi", dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII**, Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta, Cipanas, 12-16 Maret, 1996.

Gunadi, K.H.

2001 "Retrospeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya: Satu Studi Kasus Tentang Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya di Makassar. Salam Majalah Dunia Pendidikan, No. 15, 16, dan 17, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.

Gunadi, K.H.

2001 *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*. Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

Kusumohartono, B.

1995 Manajemen Sumberdaya Budaya, Pendekatan Startegis dan Taktis. Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Riset Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Depok:23-24 Januari 1995

Pearson, M., dan Sullivan, S.

1995 *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adiministrators*. Melbourne: Melbourne University Press.

Dimensi Tauhid pada Beberapa Inskripsi Makam Kuno Islam di Sulawesi Selatan (Kajian Arkeo-Epigrafi)

Mubaeminah

Pendahuluan

Hasil studi ini menunjukkan bahwa kuantitas inskripsi berdimensi tauhid lebih banyak pada makam kuno di dalam wilayah syiar Islam Datuk ri Bandang. Inskripsi berdimensi tauhid berfungsi sebagai media syiar Islam, sarana beribadah, dan wujud karya seni kaligrafi Islam (khat).

Inskripsi atau yang dalam bahasa Arab disebut *khat* atau *kitbat* merupakan manifestasi dari makna kata kaligrafi, dapat diartikan sebagai tulisan indah (Ambary, 2012: 205; Maluf, 1986 dalam Mujib, 2012: 232). Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, inskripsi berarti "kata yang diukirkan pada batu monumen dan sebagainya atau dicap (kan) pada uang logam, medali, atau piala". Inskripsi pada makam kuno Islam sebagai bagian dari kajian epigrafi Islam, merupakan salah satu parameter eksistensi peradaban (*tamaddun*) Islam di Indonesia (Ambary, 2012: 205). Kajian terhadap inskripsi, turut andil dalam pengungkapan aspek-aspek sosial dari masa lalu, dalam hal ini berkaitan dengan tradisi kebudayaan Islam.

Istilah inskripsi (*inscription*) sepadan dengan *opschriften* di dalam bahasa Belanda, yang berarti "karangan atau tulisan". Kedua istilah itu sama-sama mengacu pada bahasa Yunani, *epigraphie* (inskrpsi), yaitu ilmu membaca dan menafsirkan tulisan kuno. Dalam

Ensiklopedia Indonesia, epigrafi diartikan sebagai bidang kajian yang termasuk cabang ilmu bantu arkeologi (Echols Hassan Shadily, 1995: 216, dalam Kartakusuma, 2012: 67-68). Boechari (1997: 1, dalam Kartakusuma, 2013: 68) menyatakan bahwa sejalan dengan tempatnya sebagai salah satu bidang studi dalam arkeologi, epigrafi merupakan jembatan atau gerbang menuju pemahaman sejarah atau studi kebudayaan kuno.

Berdasarkan data epigrafi Islam yang menjadi bahan telaah Ambary (2012: 216-218), dari inskripsi pada makam Fatimah binti Maimun diketahui bahwa aksara dan bahasa Arab secara formal digunakan di kawasan nusantara sejak abad ke-11. Penggunaan huruf *kufi* sejak abad ke-11 dan huruf *naskhi* yang baru hadir pada abad ke-13 setidaknya memberi bukti bahwa terdapat hubungan yang erat antara Islam di Nusantara dengan Gujarat (India). Telaah inskripsi Islam Nusantara yang menggunakan pendekatan arkeologi telah memberikan gambaran sekilas bagaimana Islam dan masyarakat Islam hadir, berkenalan, tumbuh dan berkembang, menyatu secara integratif dalam masyarakat yang heterogen untuk membentuk *nation*.

Hasil terjemahan dan transkripsi inskripsi Islam pada beberapa makam Islam di Sulawesi Selatan telah memberikan keterangan tentang jenis, isi, dan makna yang terkandung di dalam inskripsi tersebut. Berdasarkan jenis aksaranya, inskripsi tersebut terdiri atas inskripsi Arab, yaitu jenis inskripsi yang menggunakan aksara dan bahasa Arab; inskripsi Arab Serang (Jawi), yaitu jenis inskripsi yang menggunakan aksara Arab dan bahasa lokal Makassar, Bugis, ataupun Mandar; dan inskripsi *lontara'* yang menggunakan aksara *lontara'* dan bahasa lokal Makassar, Bugis, ataupun Mandar. Isi inskripsi Arab berkaitan dengan masalah keagamaan baik tauhid, aqidah, muamalah dan akhlak manusia. Inskripsi Jawi dan *lontara'* berisi tentang tokoh yang dimakamkan, yaitu nama, silsilah, peranan dan tanggal wafat (Rosmawati, 2013: 410).

Berangkat dari uraian di atas, salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji kemudian ialah inskripsi Arab berisi persoalan tauhid (keesaan Allah). Tulisan ini ingin mengungkap dimensi tauhid pada beberapa kompleks makam kuno Islam di Sulawesi Selatan. Karena sumber tertulis merupakan data yang berbicara secara langsung, perannya tentu bukan sekedar unsur penunjang data kontekstual, melainkan menghubungkan benda dengan kisah sejarah (Noerhadi Magetsari, 1986: 90-91; Edi Sedyawati, 1994: 4, dalam Kartakusuma, 2012: 69). Maka dari itu, epigrafis berlandaskan pula pada tujuan umum arkeologi, yakni merekonstruksi sejarah kebudayaan melalui data sumber tertulis. Dengan demikian, aspek utama yang dipelajarinya ialah bahasa dan aksara (Kartakusuma, 2012: 69).

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan versi pendek dari laporan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif interpretatif dan induktive analyse. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu inskripsi berisi kalimat-kalimat tauhid pada jirat, gunung, dan nisan makam. Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena cakupan wilayah Sulawesi Selatan yang terlalu luas, maka perolehan data dibatasi hanya pada beberapa makam saja, di antaranya makam Abdullah Daeng Patompo, kompleks makam La Tenri Ruwa, makam Raja-raja Tallo, kompleks makam kuno Katangka, kompleks makam Joko Jeneponto, makam Raja Balusu di Barru, kompleks makam Lamuru di Bone, makam Anrong Guru Moking, dan makam kuno di Wajo.

Perolehan data melalui tahapan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu meninjau langsung ke makam/kompleks makam yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data primer lengkap melalui serangkaian kegiatan perekaman data.
2. Penelusuran pustaka, yaitu mengumpulkan buku-buku dan laporan-laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Tahapan ini digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait objek penelitian.

Data primer dan data sekunder dari hasil observasi dan penelusuran pustaka selanjutnya diseleksi. Teknik analisis menggunakan kerangka epigrafi. Inskripsi akan ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia dan dijabarkan ke dalam bentuk uraian deskriptif. Tahap terakhir dari rangkaian penelitian ini yaitu, pembahasan interpretatif, kemudian berlanjut kepada penarikan kesimpulan dari seluruh hasil pengkajian.

Pembahasan

1. Data Arkeologi

a. Makam Abdullah Daeng Patompo

Makam Abdullah Daeng Patompo (1871) berada di dalam situs Kompleks Makam Abdullah Daeng Patompo Daeng Sirua, yang terletak di Jalan Barukang Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pada nisan makam terdapat aksara Arab bersifat tauhid berbunyi:

"Laa ilaha illallah. Kullu man alaiha fainna wafi rahmati rabbika zuljalaali wal'ikram Hajji Abdullah Daeng Patompo" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tiap-tiap dari padanya suatu rahmat Tuhanmu yaitu tinggi lagi mulia bagi Abdullah Daeng Patompo).

b. Kompleks Makam Latenri Ruwa

Kompleks Makam Latenri Ruwa atau yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai makam Sultan Adam terletak di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis, situs terletak pada titik koordinat 05°32'45.0" LS dan 119°57'82.2" BT pada ketinggian 15 m di atas permukaan laut (dpl). Nama situs diambil dari nama Raja Bone, yaitu Latenri Ruwa, Raja Bone yang pertama kali memeluk agama Islam, kemudian meninggalkan Bone untuk menyebarkan agama Islam di Bantaeng hingga akhir hayatnya (Muhaeminah, 2001: 237). Di dalam kompleks makam terdapat 150 buah makam, terdiri atas 7 buah makam berukuran besar, 39 buah makam berukuran sedang, dan 100 buah makam berukuran kecil.



Foto 1. Inskripsi pada gunungan makam di dalam Kompleks Makam Latenri Ruwa (Dokumentasi Muhaeminah, 2013)

Inskripsi Arab tertera pada 11 buah makam, diantaranya terdapat inskripsi bersifat tauhid, yaitu tertera pada bagian pelipit, gunungan, dan nisan makam, antara lain:

1. Inskripsi pada bagian pelipit makam:

Subhanallah walhamdulillah wa la ilaaha illallah (2x) wallaahu akbar wa laa haula walla quwwata illa billahi aliyyl adhiimi washallallahu alaa Muhammad wa'alihi wasalam (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah (2x), Maha Besar Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dan keselamatan atas Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya).

2. Inskripsi pada nisan makam:

Lahul mulku wa lahum hamdu yuhyii walaa ilaaha wadahu laa syariika lahu (BagiMu kekuasaan dan bagiMu pujian dan tiada Tuhan hanyalah Dia yang tidak disyarikatkan padanya).

3. Inskripsi pada gunungan makam:

Idza dakhala fii imani qabelika walam a'lam bihi au a'lam tabita anhu wa aquulu la ilaaha illallahu Muhammad Rasulullah (Apabila terdapat keraguan tentang iman di dalam hatimu janganlah mengenalNya, maka ucapkanlah kalimat tauhid tiada Tuhan kecuali Allah).

Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah (Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanNya).

Laa ilaha illallah (2x) (Tiada Tuhan selain Allah (2x))

c. Makam Raja-Raja Tallo

Kompleks makam Raja-Raja Tallo terletak di Jalan Sultan Abdullah Kecamatan Tallo Kota Makassar. Secara astronomis terletak pada titik koordinat 05°6'10.4" LS dan 119°26'44.1" BT, dengan ketinggian 8 m dpl. Di dalam kompleks makam terdapat 81 buah makam.

Beberapa makam memiliki inskripsi Arab. Inskripsi bersifat tauhid terdapat pada makam Lyandu Karaeng Sinrijala yang berbunyi:

Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah (Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah).



Foto 2. Kompleks Makam Raja-raja Tallo (Dokumen Balar Makassar 2014).

d. Kompleks Makam Kuno Katangka

Kompleks Makam Kuno Katangka terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Situs merupakan tempat pemakaman Raja-raja Gowa beserta kerabat-kerabatnya. Situs berada pada titik koordinat $05^{\circ}11'27''10,4''$ LS dan $119^{\circ}27'05''$ BT, dengan ketinggian 8 m dpl. Akses ke lokasi situs dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan jarak enam kilometer dari pusat Kota Makassar.



Inskripsi Arab banyak dijumpai pada nisan dan gunung makam yang berada di dalam kubah. Inskripsi bersifat tauhid yang dapat dicatat yaitu antara lain:

1. Inskripsi pada nisan makam Karaengta Muhammad (1211 H):
Nisan utara sisi luar
Allah ta'ala (Allah SWT),
Nisan selatan sisi luar
Lailaha illallah wahdahu lasyarika (Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang Esa tiada sekutu baginya).
2. Inskripsi pada makam Karaeng Paggannakang (1304 H)
Gunungan utara
Ayat Qursi (Al-Baqarah, ayat 255): (Ustaz Teteng Sopian, 2013:42).

Allaahu laa ilaaha illa huwa alhayyul qayyum, laa ta'khudzuhu sinatu wa launam, laa ma fassama'waati wamaa fil ardi, mandzalladziy yasyfu'u 'indahu ilaa bi'idzibih, ya'lamu ma bayna aydihiim wa ma khalfuhum wa laa yuhituhum bisay'immin 'ilmih, illaa bimaa sya'a wa si'a kursiyyuhussama'waati wal arda wa laa ya'uduhu hifzuhuman wa huwal 'alimul 'azim (Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak tidur. MilikNya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisiNya tanpa izinNya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmuNya, melainkan apa yang Dia kehendaki. KursiNya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar).

Gunungan selatan

Surat Al-Ikhlâs, ayat 1-4

Qul huwallahu ahad, allaahussamad, lam yaalid walam yutulad, walam yakulahu kufuwan ahad (Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia").

Surat Al-Falaq, ayat 1-5

Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri gaasiqin idzaa waqah, wamin syarriinnaffasaatil 'uqad, wamin syarri haasidin idzaa hasad (Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki").

Surat An-Nas, ayat 1-6

Qul a'udzu birabbinnas, malikiinnas, ilaahiinnas, minsyarritwaswasil khannaas, alladziyyutwaswiyufil suduriinnaas, minaaljinnaati waannaas (Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembah manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia").

3. Inskripsi pada makam Karaeng Pandang-Pandang (1318 H)

Ayat Qursi (Al-Baqarah, ayat 255). Idem.

4. Inskripsi pada makam istri Sultan Idris

Nisan selatan

Surat Al-Ikhlâs, ayat 1-4. Idem.

Gunungan utara sisi dalam

Ayat Qursi (Al-Baqarah, ayat 255) dan Surat An-Naas, ayat 1-6. Idem
Surat Al-Fatihah, ayat 1-7

*Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'aalamiin. Arrahmaanirrahiim. Maaliki-
yawmiddiin. Iyyaakana'budu wa iyyaakanasta'iin. Ihdinaashshirataalmustaqiim.
Shiraatalladziina an'amta 'alaihim, ghayriil maghdhuubi 'alayhim wa laadhdhaalliin*
(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik
hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada
Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu)
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka
yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat).

*Lailaha illallah wahdahu lasyarika lahu walmulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa
rabbul arsil. Amin* (Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagiNya dan Yang Maha
Berkuasa dan untuk-Nya segala pujian yang menghidupkan dan yang mematikan
dan Ia Tuhan semesta alam. Kabulkanlah).

Gunungan selatan sisi dalam

Surat Al Ikhlas, ayat 1-4; Surat Al-Falaq, ayat 1-5; Surat An-Naas, ayat 1-6. Idem.

5. Makam Karaeng Popo Guru Tukkajannangang (1216 H)

Nisan utara

Allasii wahdahu lasyarikalahu Allah Muhammad (Dialah yang Maha Esa tiada sekutu
baginya Allah Muhammad).

Nisan selatan

Asyhadu Allah Ilaha Illallah wa asyhadu anna Muhamadarrasulullah (Aku bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah).

Gunungan

Ayat Qursi (Al-Baqarah, ayat 255). Idem.

6. Inkripsi pada gunungan makam Tuan Moking

Berbunyi:

*Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana
abduka wa ana ala abdika mastata'ta auzubika minsyarri ma sana'ta abuu laka bini'matika
alayya waabu bizanbi faghfirli fainnaka la yagfi'uzzunuuba illa anta* (Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah Engkaulah Tuhan kami, tiada Tuhan
melainkan Allah, zat yang telah menciptakan kami, dan kami adalah hambaMu,
kamipun dalam ketentuan serta janjiMu, sedapat yang kami lakukan kami mengakui
kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada Kami, dan Kami juga mengakui
dosa-dosa Kami, karena itu berilah ampun kepada Kami, sebab sesungguhnya tidak
ada yang memberi pengampunan kecuali Engkau.



Foto 4. Insripsi pada gerbang makam Tuan Melay (Dokumen Chelot 45, 2013).

a. Kompleks Makam Jeko Jenepono

Kompleks makam Jeko Jenepono terletak di Desa Bangkale Loe Kecamatan Bonto Rambu Kabupaten Jeneponto. Secara astronomi, kompleks makam terletak pada titik koordinat $119^{\circ}42'45.4''$ LS dan $05^{\circ}26'29.1''$ BT, dengan ketinggian 30 m dpl. Pada salah satu makam terdapat inskripsi yang berbunyi: *La ilaha illallah, Allah Muhammad* (Tiada Tuhan selain Allah, Allah Muhammad).

f. Makam Raja Baharu di Barro

Makam Raja Baharu berada di Kabupaten Barro Provinsi Sulawesi Selatan. Pada salah satu nisan makam terdapat inskripsi Arab berbunyi: *La ilaha illallah Muhammad Rasulullah* (Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah).



Foto 5. Inskripsi kalimat tauhid pada kaki nisan makam Raja Balusu Kabupaten Barru. (Dokumentasi Chalid AS, 2013).

g. Kompleks Makam Lamuru

Situs kompleks makam Lamuru terletak di Kampung Lempue Desa Lalebbata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Secara astronomis, kompleks makam berada pada titik koordinat $4^{\circ}35'36.0''$ LS dan $119^{\circ}58'39.6''$ BT, dengan ketinggian 185 m dpl. Akses menuju situs dapat dicapai menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat sejauh 80 km dari Kota Makassar. Situs merupakan tempat pemakaman raja-raja dan masyarakat dari Kerajaan Lamuru di Watanglamuru. Luas situs, yaitu 120×18 m. Di dalam kompleks makam terdapat 139 buah makam.

Pada beberapa makam dijumpai inskripsi bersifat tauhid, antara lain:

1. Inskripsi pada gunungan makam Andi Aisyah;
Allahu la ilaaha illallah (Allah, tiada Tuhan selain Allah).

2. Inskripsi pada nisan sebuah makam tanpa nama
La ilaaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah).
3. Inskripsi pada nisan makam Pabbicara Butta Gowa
Allahu la ilahaa Muhammad Rasulullah (Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah).

h. Makam Anrong Guru Moking

Makam Anrong Guru Moking berada di Jalan Pelita Kampung Taeng Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Makam terletak pada titik koordinat $5^{\circ}11'51.4''$ LS dan $119^{\circ}26'24.1''$ BT, dengan ketinggian 15 meter dpl. Jirat makam berukuran panjang 158 cm, lebar 62 cm, dan tinggi 14 cm. Gunungan pada sisi utara dan selatan berukuran panjang 40 cm, lebar 50 cm, dan tebal 11 cm. Nisan berjumlah dua buah, berukuran tinggi 40 cm, lebar 18 cm, dan tebal 9. Pada jirat makam Anrong Guru Moking terdapat inskripsi berbunyi: *Allah* (11x)

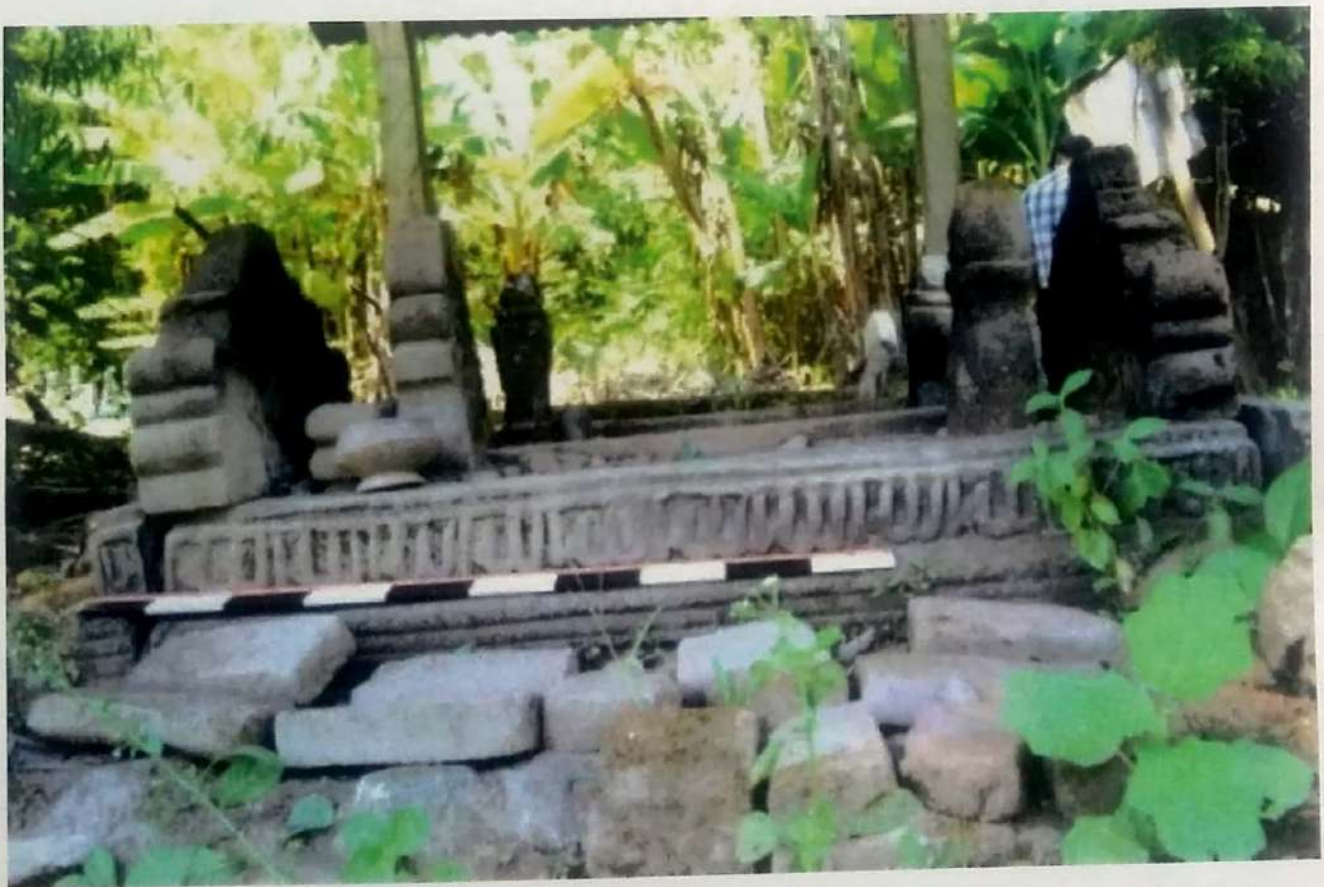


Foto 6. Makam Anrong Guru Moking (Dokumen Balar Makassar, 2013)

i. Makam Kuno di Wajo

Pada nisan makam kuno di Kabupaten Wajo terdapat inskripsi berbunyi: *La ilaha illallah* (Tiada Tuhan selain Allah).



Foto 7. Nisan pada makam kuno di Kabupaten Wajo.(Dokumen Balar Makassar, 2013).

Inskripsi makam yang telah diuraikan di atas dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pernyataan Iman

Inskripsi yang memuat pernyataan iman jika merujuk kepada pengertian menurut Hamka (1986: 9) meliputi kalimat-kalimat yang mengandung unsur penghambaan dan puji-pujian kepada Allah SWT. Pernyataan iman juga meliputi do'a-do'a serta nama-nama Allah (Asmaul Husna) dan Muhammad. Inskripsi berisi kalimat tersebut antara lain, makam Abdullah Daeng Patompo, kompleks makam La Tenri Ruwa, kompleks makam Raja-Raja Katangka, kompleks makam Raja-Raja Tallo, kompleks makam Joko Jeneponto, kompleks

makam Raja Balusu di Barru, kompleks makam Lamuru di Bone, makam Anrong Guru Moking, dan makam kuno di Wajo. Korelasi antara makam dengan jumlah inskripsi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah:

No.	Makam	Jumlah
1	Makam Abdullah Dg. Patompo	1
2	Kompleks Makam La Tenri Ruwa	4
3	Kompleks Makam Raja-Raja Tallo	1
4	Kompleks Makam Raja-Raja Katangka	6
5	Kompleks Makam Joko Jeneponto	1
6	Kompleks Makam Raja Balusu di Barru	1
7	Kompleks Makam Raja Lamuru di Bone	3
8	Makam Anrong Guru Moking	1
9	Makam Kuno di Wajo	1
Jumlah		21

2. Kategori Islam

Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, Islam dimaknai sebagai media dalam mencari pengetahuan tentang Allah. Inskripsi yang berkaitan dengan Islam meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya ialah surat Al-Baqarah, ayat 255 (Ayat Kursi); Al-Ikhlash, ayat 1-4; Al-Falaq, ayat 1-5; An-Nas, ayat 1-6; dan Al-Fatihah, ayat 1-7. Inskripsi demikian hanya dijumpai di kompleks makam Raja-raja Gowa di Katangka saja. Jumlah inskripsi dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Q.S	Ayat Kursi	Al-Ikhlash	Al-Falaq	An-Nas	Al-Fatihah	Jumlah
Jumlah	3	2	2	2	1	10

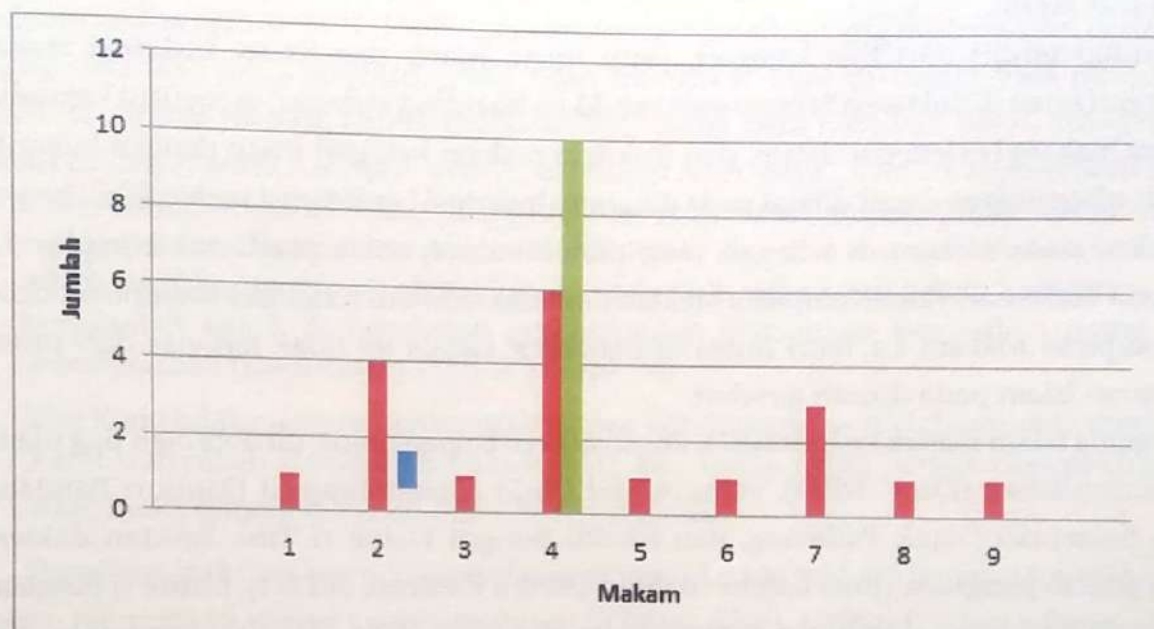
3. Kategori Ikhsan

Kalimat yang berkaitan dengan nasehat tentang keesahan Allah. Inskripsi berisi kalimat kategori ikhsan demikian hanya dijumpai pada Kompleks Makam La Tenri Ruwa, yaitu terdapat pada gunung dan berbunyi:

Apabila terdapat keraguan tentang iman di dalam hatimu janganlah mengenalNya, maka ucapkanlah kalimat tauhid tiada Tuhan kecuali Allah.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kuantitas kalimat berdimensi tauhid lebih banyak dijumpai di Kompleks Makam Katangka di Gowa dan Kompleks Makam La Tenri Ruwa di Bantaeng, yang terletak di daratan selatan (teritori suku Makassar)

Sulawesi Selatan. Sedangkan pada kompleks-kompleks makam kuno yang terletak di daratan utara (teritori suku *Bugis*) seperti Bone, Barru, dan Wajo, kuantitas kalimat-kalimat berdimensi tauhid jauh lebih sedikit. Sintesa daripada kategori-kategori inskripsi tersebut di atas terangkum dalam diagram berikut:



Keterangan:

Merah: K. Iman

Hijau : K. Islam

Biru : K. Ihsan

1. Makam Abdullah Dg. Patompo

2. Kompleks Makam La Tenri Ruwa

3. Kompleks Makam Raja-Raja Tallo

4. Kompleks Makam Raja-Raja Katangka

5. Kompleks Makam Joko Jeneponto

6. Kompleks Makam Raja Balusu di Barru

7. Kompleks Makam Raja Lamuru di Bone

8. Makam Anrong Guru Moking

9. Makam Kuno di Wajo

2. Dimensi Tauhid pada Inskripsi Makam di Sulawesi Selatan

Inskripsi pada makam kuno Islam berhubungan erat dengan gagasan religi keislaman penciptanya. Inskripsi demikian merupakan puncak kesenian Islam yang mencerminkan spirit Islami dan pusat ekspresi Islam. Bukti epigrafis pada kurun waktu pertumbuhan Islam di Indonesia menggambarkan bagaimana Islam masuk ke wilayah Nusantara (Ambary, 2012: 207). Bila dikaitkan dengan inskripsi-inskripsi berisi kalimat-kalimat tauhid atau kalimat syahadat yang tertera pada beberapa makam kuno Islam yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa, pada masa-masa awal tumbuh kembangnya, yaitu sekitar abad ke-17, spirit tauhid berpengaruh cukup besar dalam jiwa masyarakat pendukungnya. Masyarakat pendukung yang dimaksud yaitu, kelompok masyarakat yaitu dari golongan

teratas dari strata sosial yang berlaku di masa tersebut, diantaranya di kalangan raja dan kerabatnya, serta ulama-ulama penyebar agama Islam. Dikatakan demikian sebab, inskripsi pada umumnya ditemukan pada makam-makam kuno masa Islam di dalam kompleks pemakaman raja-raja dan kerabatnya, dan sangat jarang ditemukan pada makam masyarakat awam.

Tauhid terdiri dari tiga kategori, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Inskripsi makam berkategori iman di Sulawesi Selatan menunjukkan kuantitas terbesar, menyusul kemudian inskripsi makam berkategori Islam, dan inskripsi makam kategori Ihsan dengan kuantitas terkecil, sebagaimana dapat dilihat pada diagram. Inskripsi berdimensi tauhid lebih banyak ditemukan pada makam di wilayah yang dimukimi mayoritas penduduk bersuku dan berbahasa Makassar, yaitu Kompleks Makam Raja-raja Gowa di Katangka Kabupaten Gowa dan Kompleks Makam La Tenri Ruwa di Bantaeng. Gejala ini tidak terlepas dari proses penyebaran Islam pada daerah tersebut.

Agama Islam masuk ke Indonesia, khususnya di bagian timur, dibawa oleh tiga ulama dari Minangkabau (*Datu' Tellue*), yaitu: Abdul Qadir Khatib Tunggal Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman Datuk Patimang, dan Khatib Bungsu Datuk ri Tiro. Sasaran dakwah mereka adalah penguasa (raja) terlebih dahulu (Abdul Rahman, 2013: 1). Datuk ri Bandang menetap di Makassar dan menyebarkan Islam di Gowa, Tallo, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng, dengan pendekatan ilmu syariat. Datuk Patimang menyebarkan Islam di Pinrang (Suppa), Soppeng, Wajo, dan Luwu. dengan pendekatan tauhid (ilmu qalam). Datuk ri Tiro menyebarkan Islam di Bantaeng, Jeneponto (Tanete), dan Bulukumba, dengan pendekatan tasawuf (<http://bundokanduang.wordpress.com/2008/10/10/kunang-kunang/>, diakses 15-07-2014). Perbedaan ajaran ini tidak terlepas dari latar belakang budaya wilayah penyebaran Islam tersebut. Meskipun berbeda, ketiga ajaran ini pada hakikatnya sama dalam pengkajian tentang ketuhanan dan saling berkait antara satu dengan yang lain.

Tauhid berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Sebaliknya, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniyah dalam perdebatan-perdebatan ketauhidan. Ilmu tasawuf merupakan penyempurna tauhid. Tauhid merupakan fondasi bagi ilmu syariat. Syariat tanpa tauhid dapat diibaratkan sebagai manusia tanpa jiwa. Syariat ada karena adanya keterpanggilan hati yang ditimbulkan oleh tauhid. Dengan demikian, dapatlah dipahami mengapa inskripsi yang mengandung kalimat tauhid lebih banyak ditemukan pada wilayah sebaran pengajaran ilmu syariat dan tasawuf, dan jarang ditemukan pada wilayah sebaran pengajaran ilmu tauhid. Tauhid merupakan pokok dari ajaran Islam, yaitu pengakuan terhadap keesaan Allah, tidak menyembah dan tidak mengharap kepada selain-Nya. Dalam hal ini, inskripsi-inskripsi berisi kalimat tauhid berfungsi sebagai media syiar

Islam dan sarana beribadah, karena secara tidak langsung dapat membangkitkan kesadaran akan tauhidiah setiap individu yang membaca inskripsi tersebut dan jika tidak terlalu kasar dapat dikatakan memaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah seperti *la ilaha illallah*, berdo'a dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada.

Kesadaran beragama seorang muslim (penganut agama Islam) pada dasarnya adalah kesadaran tauhid (Bakar, 1994: 11). Sebuah fase religi *monotheis* yang telah melalui perjalanan panjang dari fase religi *polytheis*, yang telah mengakar kuat di dalam jiwa masyarakat Nusantara. Ajaran tentang tauhid menjadi misi utama para nabi dan rasul, sebagaimana tersebut di dalam Surat An-Nahl, ayat 36 dan Surat Al-Anbiya', ayat 25, seperti berikut:

Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut", kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Q.S. An-Nahl: 36)

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku. (Q.S. Al-Anbiya': 25)

Penulisan inskripsi berisi kalimat-kalimat tauhid pada makam kuno Islam di Sulawesi Selatan, merupakan wujud karya seni kaligrafi Islam (*khat*). Kaligrafi Islam sebagai elemen epigrafi Islam Indonesia menjadi alat seniman di masanya untuk memperlihatkan keindahan huruf Perso-Arabik (Ambary, 2012: 207) di atas batu atau kayu. Gaya aksara daripada inskripsi-inskripsi tersebut menggunakan aksara bergaya *kufi*, *naskhi*, dan *tsulust*. Gaya *kufi* muncul pada paruh kedua abad ke-8 di Kuffah (Iraq), disusul dengan kemunculan gaya *tsulust* pada akhir abad ke-8 di Iraq, dan gaya *naskhi* pada abad ke-11 di Iraq (Rosmawati, 2013: 404). Ini membuktikan bahwa, Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan asing, yaitu Iraq.

Penutup

Inskripsi makam berdimensi tauhid yang berkategori Iman di Sulawesi Selatan menunjukkan kuantitas terbesar, menyusul kemudian inskripsi makam berkategori Islam, dan inskripsi makam kategori Ihsan dengan kuantitas terkecil. Inskripsi berdimensi tauhid lebih banyak ditemukan pada makam di wilayah yang dimukimi penduduk bersuku dan berbahasa Makassar, yaitu Kompleks Makam Raja-raja Gowa di Katangka (Gowa) dan Kompleks Makam La Tenri Ruwa di Bantaeng. Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bantaeng termasuk ke dalam wilayah syiar Islam Abdul Qadir Khatib Tunggal Datuk ri Bandang, yang mengajarkan ilmu syariat.

Inskripsi makam berdimensi tauhid berfungsi sebagai media syiar Islam dan sarana beribadah, karena secara tidak langsung dapat membangkitkan kesadaran akan tauhidiah setiap individu yang membaca inskripsi tersebut dan jika tidak terlalu kasar dapat dikatakan memaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah seperti *la ilaha illallah*, berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada. Penulisan inskripsi berisi kalimat-kalimat tauhid pada makam kuno Islam di Sulawesi Selatan, merupakan wujud karya seni kaligrafi Islam (*khat*). Gaya aksara daripada inskripsi-inskripsi tersebut menggunakan aksara bergaya *kufi*, *naskhi*, dan *tsulust*, yang berasal dari Iraq dan berkembang pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Hal tersebut membuktikan bahwa Islam di Sulawesi Selatan dipengaruhi pula kebudayaan asing, yaitu Iraq.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman

- 2013 *Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle: Telaah Terhadap Kitab "Al-Qaulu al-Shadiq fi Ma'rifat al-Khaliq"*. Jakarta: Dialektika.

Ambary, Hasan Muarif

- 2012 "Epigrafi Islam di Indonesia: Kajian Berdasarkan Data", dalam *Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu Arkeologi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bakar, Osman

- 1994 *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. Diterjemahkan dari *Tauhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic Science*. Jakarta: Pustaka Hidayah

Kartakusuma, Richadiana

- 2012 "Peran dan Fungsi Epigrafi sebagai Bidang Studi", dalam *Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu Arkeologi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mujib

- 2012 "Inskripsi pada Masjid Mahmudiyyah di Palembang", dalam *Aksara dan Makna: Membaca dan Mengungkap Kearifan Masa Lalu Arkeologi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Muhaeminah

- 2001 *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Editor, M.Irfan Mahmud. Makassar. Balai Arkeologi Makassar-Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

Rosmawati

2013 Perkembangan Tamadun Islam di Sulawesi Selatan, Indonesia: Diri Perspektif Arkeologi dan Sejarah. *Disertasi*. Universiti Sains Malaysia.

Ustadz Teteng Sopian, Ed. Ustaz Makbul dkk.

2013 *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan. (Al-Qur'an Tafsir BilHadis)*. Bandung: Internasional- Indonesia Cordoba.

(<http://tsundokanduang.wordpress.com/2008/10/10/kunang-kunang/>, diakses 15-07-2014).

Dra. Hj. Muhaeminah

Email: minbalar@gmail.com

Balai Arkeologi Makassar



Kota Watampone pada Masa Pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri dan La Mappanyukki: Kajian Arkeologi Keruangan

Nurfajriyani

1. Pendahuluan

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia disebabkan adanya pertumbuhan penduduk dan sumberdaya alam yang cukup memadai. Selain itu, juga banyak dipengaruhi oleh masuknya unsur-unsur budaya India, Cina dan Islam (Mansyur, 2002: 1). Implikasi dari adanya perkembangan kota tersebut akan terlihat pada pergeseran tata ruang kota baik itu terencana maupun tidak. Kota juga akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Perencanaan sebagai pengendali perkembangan kota merupakan proses formal yang akan membawa implikasi pada pola morfologi kota.

Menurut Wittick (1974) perkembangan kota itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kota terencana dan kota organik. Kota terencana dapat kita lihat dari adanya jaringan jalan utama yang berpola, pada jaringan jalan tersebut biasanya terdapat bangunan-bangunan umum dan bangunan-bangunan hunian. Sedangkan kota organik umumnya merupakan kota yang berkembang dengan sendirinya karena adanya suatu aktivitas tertentu dan bukan hasil dari keinginan penguasa (Wittick ed, 1974: 263 dalam Novita, 1999: 86).

Dalam uraian sejarah dunia dan sejarah perkotaan diketahui bahwa kota dan kehidupan kota sudah ada sekitar 4000 tahun SM di Mesopotamia, di muara atau di pinggir

sungai Tigris dan Eufkrat. Sisa kota tua yang sangat mencolok yang dapat terlihat berupa bangunan kerajaan-kerajaan kota dari orang Samaria dan Assiria. Kota yang mereka bangun berupa benteng dan pasar. Salah satu dari kota tua yang paling awal adalah Babilon, yang berada sekitar 80 km dari kota Bagdad (Marbun, 1988: 9). Jones dan bukunya *Towns and Cities* menulis bahwa adanya kota menunjukkan *the height of man's achievements*; yaitu kota bertalian erat dengan peradaban (*civilization*), yang mencerminkan kemenangan manusia atas bumi, karena ia tak bergantung sepenuhnya lagi kepada pengolahan tanah (Daldjoeni, 1998: 1). Dengan kata lain kota yang memiliki peradaban harus mempunyai kawasan sejarah karena hal tersebut merupakan cerminan budaya bangsa.

Para ahli mengemukakan beberapa pengertian tentang kota berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Seperti yang dikutip oleh Adrisijanti (2000), diantaranya: Sirjamaki seorang ahli sosiologi mengatakan bahwa kota merupakan pemukiman yang permanen, relatif luas, penduduknya padat, serta heterogen, dan memiliki organisasi-organisasi politik, ekonomi, agama dan budaya. Seorang ahli perkotaan berbangsa Perancis Hamblin juga mengemukakan bahwa kota merupakan tempat yang dihuni secara permanen oleh suatu kelompok yang lebih besar dari suatu klen. Di kota terjadi suatu pembagian kerja, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan diferensiasi fungsi, hak, dan tanggung jawab (Adrisijanti, 2000: 3).

Selanjutnya Yandianto mengemukakan bahwa kota merupakan daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat (Yandianto, 1997: 284), Sjoberg (1966) juga mendefinisikan kota sebagai suatu masyarakat yang cukup besar dan cukup padat penduduknya, yang meliputi bermacam-macam ahli non pertanian, termasuk elit pelajar (Sjoberg, 1966 dalam Goede, 1986: 264). Selanjutnya Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya (Daldjoeni, 1998: 38).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa kota merupakan daerah dimana terdapat sekumpulan perumahan dan bangunan-bangunan lainnya yang merupakan suatu kesatuan kediaman, pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan serta berbagai aktivitas kehidupan masyarakat lainnya.

2. Permasalahan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Watampone sebagai ibukota Kabupaten Bone merupakan kota yang dalam perkembangannya tetap mengedepankan bangunan lokal (pribumi) namun juga tidak lepas dari pendirian bangunan yang mendapat campur

tangan bangsa Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari wujud bangunannya yang berbeda-beda karena mengalami perkembangan dari masa ke masa, serta adanya pengaruh budaya luar yang dibawa oleh pendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul masalah umum yaitu bagaimana perkembangan Kota Watampone dari periode kerajaan sampai kolonial. Pertanyaan tersebut mengantarkan penulis untuk mengkaji bangunan-bangunan tinggalan kerajaan dan kolonial yang ada di Kota Watampone dalam tema kajian arkeologi ruang khususnya arkeologi perkotaan.

Berdasarkan pertanyaan pokok di atas, maka secara spesifik penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimanatahapan(fase-fase)perkembanganKotaWatampone dariperiodepemerintahan Raja La Pawawoi Karaeng Segeri sampai periode pemerintahan Raja La Mappanyukki ?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perubahan pola ruang Kota Watampone pada periode tersebut?

3. Gagasan

Berbicara masalah perkembangan kota tidak hanya membicarakan bagaimana bentuk, luas dan tata ruang (fisik) kota tersebut tapi juga harus mengungkapkan tentang kedudukan kota dan fungsi-fungsi kota itu sendiri sebagai suatu bagian dari proses perkembangan kota. Kedudukan kota tersebut sangat penting diungkapkan, karena di dalamnya mencakup potensi administratif dan sosial ekonomi masyarakatnya.

Pada mulanya kota merupakan konsentrasi rumah tangga di pinggir-pinggir sungai yang diorganisasi mengelilingi penguasa atau pemimpin agama, misalnya pendeta gereja. Kemudian kebiasaan ini diteruskan oleh kelompok pendeta yang menyelenggarakan pengendalian yang sistematis dan kontinu terhadap panen dan tenaga kerja (Marbun, 1988: 10).

Perjalanan sejarah Bone yang dapat menjadi bukti bahwa Watampone yang awalnya merupakan sebuah kerajaan, dahulunya pernah dikuasai dan diduduki oleh pemerintah Hindia Belanda. Polinggoemang dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan dari Periode Kolonial Ke Kemerdekaan* menyebutkan bahwa perjalanan sejarah daerah di Sulawesi Selatan mulai menunjukkan perubahan yang mencolok ketika pemerintah Hindia Belanda berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20. J. B. van Heutz yang merupakan Gubernur Jendral Hindia Belanda menjalankan "politik perdamaian" yaitu satu program yang bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan langsung terhadap kerajaan-kerajaan lokal, baik yang berstatus kerajaan pinjaman maupun kerajaan sekutu. Untuk merealisasikan hal itu dilakukan penyerbuan

atas kerajaan Bone dan akhirnya Kerajaan Bone kalah. Kemudian satu persatu kerajaan besar lainnya menyatakan diri takluk atas kekuasaan Belanda (Poelinggomang, 2004: 5).

Hal yang telah dikemukakan oleh Polinggoemang di atas menjadi acuan penulis untuk mengangkat tema arkeologi perkotaan dengan mengungkapkan perkembangan kota yang terjadi di Kota Watampone periode pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri sampai periode pemerintahan La Mappanyukki. Perkembangan kota yang terjadi di Kota Watampone dapat dijabarkan berdasarkan periode yang pernah ada dalam kurun waktu yang telah disebutkan di atas.

4. Gambaran Umum Kota Watampone

Daerah Bone terletak di bagian timur jazirah selatan Pulau Sulawesi membujur dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 100 km, serta lebarnya ± 67 km, dengan luas wilayahnya 4.530 km², yang terdiri atas tanah datar, daerah perbukitan, rawa-rawa dan daerah pegunungan (Mappangara, 2003: 12). Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Keadaan daerah-daerah yang terletak di bagian pesisiran umumnya tanah datar dan sebagian lagi daerahnya datar dan berawa-rawa. Secara keseluruhan daerah Bone tidak sesuai untuk dijadikan lahan persawahan karena tanahnya bercampur batu. Selain itu, jenis tanah di daerah ini adalah alluvial hidromorf glei yang berkadar humus rendah, complex mediteran coklat kekuningan (Mappangara, 2003: 12).

Binford (1988) berpendapat bahwa pemilihan suatu tempat bagi manusia untuk melakukan aktivitas dalam kehidupannya akan ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya lingkungannya (Awat, 2002: 4). Meskipun dalam penulisan ini penulis tidak menggunakan pendekatan ekologi namun penulis tetap akan memaparkan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Bone.

Daerah kabupaten terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)
- b. Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- c. Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)

- d. Ketinggian 250-750 meter seluas 62,640,6 Ha (13,74%)
- e. Ketinggian 750 meter keatas seluas 40,080 Ha (13,76%)
- f. Ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52%) (Kabupaten Bone dalam angka 2003).

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian barat dan selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut:

Kemiringan Lereng	Morfologi	Luas	%
0-2	Datar	164.602 ha	36,1%
0-15	Landai dan sedikit bergelombang	91.519 ha	20,07%
15-40	Bergelombang	12.399 ha	24,65%
>40%	Curam	12.399 ha	24,65%

(Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka 2003).

Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas, yaitu:

- a. 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
- b. 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
- c. 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
- d. Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%) (Kabupaten Bone dalam angka 2003).

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah aluvial, gleyhumus, litosol, regosol, grumosol, mediteran dan renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediterian seluas 67,6 % dari total wilayah, kemudian renzina 9,59% dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: sepanjang pantai timur Teluk Bone ditemukan tanah alluvial, sedangkan daerah pegunungan termasuk jenis dan struktur tanah vulkanis yang sangat subur (Kabupaten Bone Dalam Angka 2003).

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C-43°C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan, sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti

- d. Ketinggian 250-750 meter seluas 62,640,6 Ha (13,74%)
- e. Ketinggian 750 meter keatas seluas 40,080 Ha (13,76%)
- f. Ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52%) (Kabupaten Bone dalam angka 2003).

Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian barat dan selatan umumnya bergelombang hingga curam, dengan rincian sebagai berikut:

Kemiringan Lereng	Morfologi	Luas	%
0-2	Datar	164.602 ha	36,1%
0-15	Landai dan sedikit bergelombang	91.519 ha	20,07%
15-40	Bergelombang	12.399 ha	24,65%
>40%	Curam	12.399 ha	24,65%

(Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka 2003).

Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas, yaitu:

- a. 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
- b. 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
- c. 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
- d. Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%) (Kabupaten Bone dalam angka 2003).

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah aluvial, gleyhumus, litosol, regosol, grumosol, mediteran dan renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediterian seluas 67,6 % dari total wilayah, kemudian renzina 9,59% dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya dapat dijelaskan sebagai berikut: sepanjang pantai timur Teluk Bone ditemukan tanah alluvial, sedangkan daerah pegunungan termasuk jenis dan struktur tanah vulkanis yang sangat subur (Kabupaten Bone Dalam Angka 2003).

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C-43°C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan, sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup angin barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti

wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata <1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone juga terdapat pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Di sekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisi sungai yang berair pada musim hujan kurang lebih 90 buah, namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar seperti sungai Walannae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Lekoballo (Kabupaten Bone dalam angka 2003).

5. Hasil Penelitian

Dalam catatan sejarah, Watampone sebagai pusat pemerintahan sebelum berkembang menjadi kota, awalnya merupakan sebuah kerajaan yang kemudian terus tumbuh setelah dijajah dan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui proses yang panjang akhirnya Watampone berkembang menjadi kota dalam kendali pemerintah Hindia Belanda. Setelah Raja Bone ke-32 diangkat kembali, muncul sistem pemerintahan dualisme; Belanda di satu pihak dan aristokrat di lain pihak. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia terdapat satu periode yang kita kenal dengan periode kolonial.

Periode kolonial mengacu pada kurun waktu sejak kehadiran bangsa Eropa di Indonesia dan diakhiri dengan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut tidak sedikit bangunan-bangunan didirikan yang secara umum disebut dengan bangunan kolonial, antara lain: rumah tinggal, kantor militer, bangunan pertahanan, sarana peribadatan, dan jaringan jalan. Selain bangunan-bangunan tersebut, di Kota Watampone juga terdapat bangunan-bangunan yang didirikan pada periode pemerintahan Raja La Pawawoi Karaeng Segeri dan periode pemerintahan Raja La Mappanyukki. Semua bangunan-bangunan tersebut menjadi pendukung utama dari perkembangan Kota Watampone.

6. Periode Pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri (1895-1905)

Periode pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri dimulai pada tahun 1895. La Pawawoi Karaeng Segeri merupakan Raja Bone ke-31 yang menggantikan Raja Fatimah Banri setelah memerintah kerajaan Bone selama 24 tahun. Pada periode pemerintahan Raja La Pawawoi Karaeng Segeri ditandai dengan adanya keinginan kolonial Belanda untuk memperluas kekuasaannya dan ingin menguasai kerajaan Bone dengan cara ingin menguasai pelabuhan Bajoe dan Pallime beserta pungutan-pungutan bea cukai-cukainya. Hal tersebut dapat merugikan kerajaan Bone karena pelabuhan Bajoe dan Pallime merupakan sumber

penghasilan utama kerajaan Bone. Keinginan kolonial Belanda tersebut ditolak oleh Raja La Pawawoi Karaeng Segeri dan hal tersebut menyebabkan pecahnya peperangan antara Belanda dan kerajaan Bone. Keadaan pemerintahan Bone pada saat itu sudah tidak terkendali lagi yang menyebabkan tidak ada pembangunan fisik kota, baik itu bangunan rumah tinggal, bangunan publik, maupun perkantoran. Pada periode tersebut Raja La Pawawoi Karaeng Segeri beserta dewan pemerintahannya lebih sibuk mempersiapkan peperangan melawan kolonial Belanda yang ingin menguasai kerajaan Bone. Oleh karena itu, dari periode ini hanya memanfaatkan bangunan kerajaan yang sudah ada sebelum periode pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri. Bangunan-bangunan tersebut sekarang masih dapat terlihat di Kota Watampone dan menjadi salah satu komponen kota serta menjadi bangunan pendukung terhadap perkembangan kota Watampone. Peninggalan bangunan-bangunan kerajaan yang dapat ditemukan digambarkan seperti dalam uraian berikut.

6.1 Wilayah Kota

Wilayah inti kota yang dimaksudkan dalam penulisan ini meliputi wilayah dalam benteng yang disebut *lalengbata*, selain itu area lain yang tergolong sebagai wilayah inti kota juga meliputi bagian Utara, Selatan, Timur, dan Barat *lalengbata*. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Lalengbata

Objek kajian penulisan yang terdapat dalam wilayah ini meliputi berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Lokasi Istana Raja Bone

Lokasi ini terdapat di jalan Petta Ponggawae, pada tahun ± 1330 di tempat ini merupakan tempat dimana bangun istana raja Bone didirikan yang kemudian dipindahkan ke jalan Veteran. Sekarang di tempat ini sudah dibangun sebuah rumah tinggal milik Bupati kota Watampone.

3. Lapangan Merdeka

Lapangan ini ada pada tahun ± 1330 yang dulunya merupakan tempat latihan prajurit kerajaan. Di lapangan ini segala aktivitas latihan prajurit kerajaan dilaksanakan. Kemudian pada masa Kerajaan Bone diambil alih dan pemerintah kolonial Belanda memegang penuh sistem pemerintahan di Watampone, lapangan ini difungsikan sebagai lapangan militer. Sekarang lapangan ini masih dapat terlihat di pusat Kota Watampone dan dijadikan sebagai lapangan olah raga.



3. Sumur Suwabeng



Sumur ini ada pada tahun ± 1335 dan berada di dalam kompleks mesjid Nurul Falah. Penampakan sumur memperlihatkan bentuk sumur bujur sangkar yang disekelilingnya telah dibuat tembok penghalang. Kondisi air agak keruh dengan warna kehijauan.

4. Pasar Watampone

Pasar yang terdapat di Kota Watampone telah berlangsung sejak tahun ± 1424 . Pasar ini awalnya merupakan pasar Palakka yang berada di desa Palakka dan diserahkan ke La Saliju' (Raja Bone III). Pasar tersebut dipindahkan ke La Saliju' ke Watampone, tepatnya di Jalan Beringin. Sekarang, pasar tersebut telah dipindahkan lagi ke jalan Sukawati. Pasar Watampone tersebut merupakan sarana perdagangan masyarakat Bone yang barang-barang yang diperjualbelikan ditunjang dari pelabuhan. Selain itu, barang-barang yang diperdagangkan juga merupakan hasil pertanian dan kerajinan serta barang sandang. Para pedagang yang datang ke pasar ini berasal dari beberapa etnik, diantaranya: Cina, Arab, dan orang pribumi penghuni kota Bone itu sendiri. Dalam hal ini, usaha perdagangan di pasar Watampone tersebut didominasi oleh orang Cina yang memang sudah datang di Watampone dengan tujuan untuk berdagang pada pertengahan abad 16.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkembangan yang terjadi di Kota Watampone sejalan dengan perkembangan pasarnya. Pasar yang ada di Kota Watampone ini merupakan ukuran perekonomian kota Watampone. Hal ini disebabkan adanya pemungutan pajak penghasilan pedagang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.

5. Mesjid Mujahidin

Mesjid ini didirikan sekitar tahun 1752, dari awal hingga sekarang mesjid ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai sarana peribadatan. Bentuk arsitektur mesjid ini masih asli. Kondisi mesjid terawat, mempunyai atap berwarna hijau dengan bahan genteng. Pada bagian atap mesjid terdapat kubah yang memiliki guci. Mesjid ini pula memiliki menara. Di bagian belakang mesjid ini terdapat makam Raja Bone ke-24 dan 26.

6. Kompleks Makam Raja Bone ke-24 dan Raja Bone ke-26

Kompleks makam ini ada pada tahun ± 1823 , dan pada kompleks makam ini terdapat makam Toappatunru (Raja Bone ke-24) yang berkuasa pada tahun 1812-1823, La Mappaselling (Raja Bone ke-24) yang berkuasa pada tahun 1835-1845, La Parenrengi (Raja Bone ke-27) yang berkuasa pada tahun 1845-1857, Singkeru' Rukka (Raja Bone ke-29) yang berkuasa pada tahun 1860-1871, dan Fatima Banri (Raja Bone ke-30) yang berkuasa pada tahun 1871-1895. Makam Raja Bone ini berada tepat dibelakang mesjid tua Mujahidin, disekitar makam ini pula terdapat makam masyarakat biasa.

7. Bola Ampare'E

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1871 dan merupakan kediaman Raja Fatimah Banri yang merupakan Raja Bone ke-30 yang kemudian ditinggali oleh Raja La Pawawoi Karaeng Segeri. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga biasa digunakan

sebagai tempat pertemuan dewan *ade pituE* dan bangunan ini biasa di sebut *bola ampare'e*. sekarang bangunan ini berfungsi sebagai sekretariat Bonepal.



Bangunan rumah ini berwarna hijau, putih dan kuning, memiliki ukiran-ukiran diseluruh dinding rumah dan rumah ini terbuat dari kayu. Awalnya rumah ini merupakan rumah panggung namun setelah mengalami perpindahan ke Makassar dan kemudian dipindahkan lagi ke Watampone, maka rumah tersebut sekarang sudah tidak berbentuk rumah panggung lagi. Rumah ini memiliki atap genteng berwarna biru dan dikelilingi dengan pagar berwarna putih.

8. Lokasi Bola Soba

Lokasi ini terdapat di jalan Veteran, dilokasi ini dulunya terdapat *Bola Soba* yang dibangun pada tahun ± 1890 . Awalnya *Bola Soba* ini merupakan kediaman pimpinan perang kerajaan Bone, namun sekarang di lokasi ini sudah dibangun pusat pertokoan dan *bola soba* tersebut dipindahkan di Jalan Lapatau.



9. Tempat Pelantikan



Tempat pelantikan ini berada pada jalan pasar lama dan dibangun pada tahun ± 1895 . Sekarang bangunan ini telah mengalami renovasi dan telah diberi pagar yang terbuat

dari besi. Pada bagian atas tempat ini telah dibangun sebuah bangunan sebagai tanda. Bangunanya terbuat dari semen dan bata dan diperindah dengan tegel yang berwarna putih. Atap bangunan berbentuk limas dan terbuat dari genteng yang berwarna coklat tua dengan tinggi sekitar 1 m. Bentuk bangunan segi empat berukuran 5x5 m dan didesain secara terbuka dengan empat buah tiang yang berdiameter 30 cm. Di bagian timur bangunan terdapat tangga dengan jumlah anak tangga sebanyak 5 buah. Di tempat pelantikan ini sudah diletakkan tanah yang berasal dari tiga daerah yaitu Gowa, Bone, dan Luwu.

10. Kampung Laccokkong

Kampung ini merupakan kampung tua yang ada pada masa peralihan yaitu masa sebelum datangnya Raja Bone I, dan setiap kampung dipimpin oleh seorang matowa. Di dalam kompleks kampung ini terdapat bangunan monumental yang berupa sumur kerajaan, yaitu sumur Laccokkong.

a. Sumur Laccokkong

Sumur ini ada pada tahun ± 1335 , sumur ini dulunya merupakan sumur kerajaan yang berfungsi sebagai sumber air untuk upacara adat istana dan memandikan putera/ puteri raja Bone yang baru lahir. Sekarang sumur ini masih digunakan oleh masyarakat setempat, meskipun airnya agak keruh. Sumur ini dikelilingi tembok berwarna kuning, dan di dekat sumur ini terdapat WC umum. Sumur ini berbentuk bujur sangkar dan disekelilingnya telah dibuat tembok penghalang.

11. Kampung Ponceng

Kampung ini berada di dalam kompleks *lalengbata* dan merupakan kampung tua yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE* yang sudah ada pada masa peralihan yaitu masa sebelum datangnya Raja Bone I. Di dalam kompleks pemukiman ini terdapat bangunan monumental yang berupa sumur kerajaan, yaitu sumur Ponceng.

a. Sumur Ponceng

Sumur ini ada pada tahun ± 1335 dan sudah mengalami renovasi sehingga sudah tidak menampakkan bentuk aslinya. Sampai sekarang sumur ini masih digunakan oleh masyarakat setempat. Sumur ini dari atas memperlihatkan kondisi air yang jernih dengan dasar sumur berlantai dan banyak ditumbuhi lumut. Pada dinding sumur tersebut memperlihatkan struktur tumpukan batu yang tidak teratur pada bagian depan dan samping kiri serta susunan tangga yang terbuat dari campuran semen berada disebelah kanan.



Gambar dinding sumur memperlihatkan susunan batu yang tidak teratur. Dipermukaan dinding sumur tersebut terdapat campuran semen dan pasir yang melekat pada tumpukan batu tersebut.

12. Pemukiman Bangsawan

Pemukiman bangsawan ini berada di jalan makmur, pemukiman ini dihuni oleh bangsawan-bangsawan keturunan raja Bone. Di dalam kompleks pemukiman ini tidak terdapat bangunan monumental.

13. Pemukiman Orang Arab

Pemukiman komunitas orang Arab ini berada di dalam *lalengbata*. Komunitas orang Arab yang datang ke Watampone, membawa misi ingin menyebarkan agama Islam melalui perdagangan di kota Watampone. Di dalam kompleks pemukiman ini tidak terdapat bangunan monumental.

14. Pemukiman Orang Cina

Pemukiman orang Cina ini berada di dalam kompleks *lalengbata*. Komunitas orang Cina awalnya datang ke Kota Watampone sebagai pedagang, mereka berdagang candu dan keramik yang kemudian mengembangkan perdagangannya hingga membeli toko dan menetap di kota Watampone. Di dalam pemukiman ini tidak ada bangunan monumental.

15. Pemukiman Orang Enrekang

Pemukiman orang Enrekang ini berada di jalan Onta. Komunitas orang Enrekang awalnya datang sebagai pelarian dari peperangan yang terjadi di wilayah mereka, namun kemudian mereka menjadi pengurus kuda-kuda Raja.

B. Sebelah Utara Lalengbata

Bagian Utara *lalengbata* ini juga terdapat berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Kampung Tanete Riawang

Kampung ini merupakan kampung tua yang sudah ada pada periode kerajaan di Watampone dan merupakan salah satu kampung yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE*. Di dalam kompleks kampung ini tidak ada bangunan monumental.

2. Kampung Ujung

Kampung ini juga merupakan kampung tua yang dipimpin oleh dewan *ade' PituE* dan sudah ada pada periode kerajaan di Watampone. Di dalam kompleks kampung ini terdapat bangunan monumental yang berupa sumur kerajaan dan kompleks makam.

a. Sumur Lagarowang

Sumur *lagarowang* ada pada tahun ± 1335 dan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Bone. Awalnya sumur ini berfungsi sebagai sumber air untuk upacara adat istana dan memandikan putera/ puteri raja Bone yang baru lahir, dan sekarang sumur ini berfungsi sebagai sumber air masyarakat setempat. Di dalam kompleks sumur ini, terdapat dua buah sumur yang menurut informan (H. Andi Youshand) sumur ini dulunya dibuat menjadi dua karena untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

b. Sumur Lagarowang laki-laki

Sumur ini sebagian besar telah diperbaharui dengan proses pelantain pada seluruh permukaan sumur. Bentuk dasar sumur lingkaran dengan ketinggian dari permukaan lantai ± 50 cm dengan kondisi air yang keruh. Di sekitar sumur telah ditembok membentuk bujur sangkar kecuali bagian pintu masuk sumur. Penampakan bagian dinding sumur memperlihatkan struktur batu yang disusun secara acak yang ditumbuhi lumut pada permukaan batu tersebut.



c. Sumur Lagarowang Perempuan



Sumur *lagarowang* yang kedua ini yaitu sumur perempuan, dengan bentuk yang lebih kecil dengan diameter ± 70 cm dan ketinggian dari permukaan lantai sumur tersebut ± 50 cm. Penampakan sumur dari atas memperlihatkan permukaan sumur telah dilantai

3. Kompleks Kuburan Cina



Kompleks perkuburan ini terletak di dekat pemukiman penduduk, tepatnya di perkebunan warga. Arealnya cukup luas dan meliputi: makam pertama berada di sebelah timur tepat berada dibelakang perumahan penduduk, dan kompleks makam kedua berada di sebelah Barat tepat di sebelah kanan jalan pengerasan. Dari segi bentuk, umumnya makam di kompleks ini sama namun ukurannya berbeda-beda, ada yang besar dan juga yang kecil. Bentuk makam ini terbagi atas dua bagian inti: bagian pertama berbentuk setengah lingkaran dan memanjang. Bagian kedua bentuknya berundak dan pada bagian puncaknya dijadikan areal persemayaman. Hal ini dapat terlihat dari prasastinya yang bertuliskan keterangan dari orang yang dikuburkan.

C. Sebelah Timur Lalengbata

Bagian Timur *lalengbata* ini juga terdapat berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Monument To Manurung

Tempat turunnya *To Manurungnge* ini berbentuk monument dan ada pada tahun ± 1330 . Tiap bagian dari monument ini berisi penjelasan tentang awal turunnya To Manurung.



Bagian bawah monumen berisikan keterangan mengenai kejadian/peristiwa kontrak pemerintahan antara rakyat Tana Bone dengan ManurunngE ri Mattajang (Raja Bone I). Bagian atas monumen berwarna dasar kuning emas yang menampilkan isi kontrak perjanjian pemerintahan antara rakyat Tana Bone dengan ManurunngE ri Mattajang (Raja Bone I) dalam tulisan lontara dan pada bagian bawahnya merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Isi kontrak perjanjian rakyat Tana Bone kepada Raja Bone I berbunyi:

“Engkau menetaplah di tana bone dan engkau yang kami angkat menjadi raja untuk memimpin kami namun anak dan istri kami, bila engkau tidak menyetujuinya, kamipun menurut kepadamu, asalkan engkau menjaga keselamatan kami dan harta benda kami”.

Sedangkan Isi kontrak perjanjian yang lain dalam bahasa Indonesia merupakan perkataan Mannurunge (Raja Bone I) yang berisikan “saya menjunjung tinggi diatas kepala Saya dan menghargai kata-kata dan persatuanmu untuk mengangkat saya menjadi raja”. Sekarang di sekitar Monumen ini terdapat mesjid dan kompleks makam masyarakat Bone.

2. Sumur Matajang



Sumur ini ada pada tahun ± 1335 dan berada di belakang rumah penduduk. Awalnya sumur ini digunakan sebagai sumber air masyarakat setempat, namun saat ini sudah tidak pernah digunakan lagi. Dari atas sumur ini menampakkan kondisi air yang keruh dan di dalamnya terdapat dua ekor kadal.

3. Sumur Cemma

Sumur ini ada pada tahun ± 1335 dan berada di belakang tempat tinggal salah satu masyarakat Bone di jalan Manurungge. Kondisi sumur ini terawat karena sumur ini dijadikan sebagai sumber air. Sumur ini memiliki diameter ± 70 cm. dan disekelilingnya sudah dibuat tembok penghalang.

5. Kampung Tibojong

Kampung ini merupakan kampung tua yang sudah ada pada periode kerajaan di Watampone dan merupakan salah satu kampung yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE*. Di dalam kompleks kampung ini juga terdapat bangunan yang berupa sumur tua yang bernama sumur Tibojong.

a. Sumur Tibojong

Sumur Tibojong ini ada pada tahun ± 1335 dan berada di dalam kompleks kampung Tibojong, tepatnya di tengah-tengah areal persawahan. Awalnya sumur ini merupakan sumber air masyarakat namun sekarang sumur ini sudah tidak pernah digunakan lagi. Sumur ini berbentuk lingkaran dengan diameter ± 70 cm.

6. Kampung Ta'

Kampung Ta' ini merupakan kampung tua yang sudah ada pada tahun ± 1324 , yaitu masa peralihan sebelum datangnya Raja Bone I. Kampung ini juga dipimpin oleh dewan *Ade' pituE*, namun di dalam kompleks kampung ini tidak ada bangunan monumental.

7. Kampung Panyula

Kampung ini ada pada masa kejayaan kerajaan Bone dan di huni oleh hamba sahaya pusaka nenek moyang La Saliju' (Raja Bone ke-3). Dalam kompleks kampung ini tidak ada bangunan monumental.

D. Sebelah Barat Lalengbata

Di sebelah Barat *lalengbata* ini juga terdapat berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Kampung Maccege

Kampung ini berada di sebelah Barat *lalengbata*. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE*. Di dalam kampung ini terdapat bangunan monumental yang berupa kompleks makam Petta PanrebessiE (Raja Bone ke-2).

2. Kompleks Makam Petta PanrebessiE (Raja Bone ke-2)

Kompleks makam Petta PanrebessiE ini ada sekitar tahun ± 1424 dan berada di areal pemukiman penduduk. Sebagian besar kuburan sudah ditutupi semak belukar. Makam Petta PanrebessiE ini berada di sebelah barat dan dikelilingi oleh makam-makam baru. Makam ini memiliki cungkup permanen yang terdiri dari tembok yang mengelilingi makam dan di bagian atasnya terdapat terali besi. Nisan dan jirat berwarna kuning emas dengan tipe gadah segi delapan dan jirat dengan ornamen flora dan geometris pada keseluruhan fisik jirat.

a. Sumur Tibojong

Sumur Tibojong ini ada pada tahun ± 1335 dan berada di dalam kompleks kampung Tibojong, tepatnya di tengah-tengah areal persawahan. Awalnya sumur ini merupakan sumber air masyarakat namun sekarang sumur ini sudah tidak pernah digunakan lagi. Sumur ini berbentuk lingkaran dengan diameter ± 70 cm.

6. Kampung Ta'

Kampung Ta' ini merupakan kampung tua yang sudah ada pada tahun ± 1324 , yaitu masa peralihan sebelum datangnya Raja Bone I. Kampung ini juga dipimpin oleh dewan *Ade' pituE*, namun di dalam kompleks kampung ini tidak ada bangunan monumental.

7. Kampung Panyula

Kampung ini ada pada masa kejayaan kerajaan Bone dan di huni oleh hamba sahaya pusaka nenek moyang La Saliju' (Raja Bone ke-3). Dalam kompleks kampung ini tidak ada bangunan monumental.

D. Sebelah Barat Lalengbata

Di sebelah Barat *lalengbata* ini juga terdapat berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Kampung Maccege

Kampung ini berada di sebelah Barat *lalengbata*. Kampung ini juga merupakan salah satu kampung yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE*. Di dalam kampung ini terdapat bangunan monumental yang berupa kompleks makam Petta PanrebessiE (Raja Bone ke-2).

2. Kompleks Makam Petta PanrebessiE (Raja Bone ke-2)

Kompleks makam Petta PanrebessiE ini ada sekitar tahun ± 1424 dan berada di areal pemukiman penduduk. Sebagian besar kuburan sudah ditutupi semak belukar. Makam Petta PanrebessiE ini berada di sebelah barat dan dikelilingi oleh makam-makam baru. Makam ini memiliki cungkup permanen yang terdiri dari tembok yang mengelilingi makam dan di bagian atasnya terdapat terali besi. Nisan dan jirat berwarna kuning emas dengan tipe gadah segi delapan dan jirat dengan ornamen flora dan geometris pada keseluruhan fisik jirat.

E. Sebelah Selatan Lalengbata

Di sebelah Selatan *lalengbata* ini juga terdapat berbagai jenis tinggalan yang berupa:

1. Kampung Tanete Riattang

Di sebelah Selatan *lalengbata* terdapat kampung Tanete Riattang yang juga merupakan kampung yang dipimpin oleh dewan *ade' pituE*. Di dalam kampung ini tidak ada bangunan monumental.

3. 1. 2 Wilayah Penyangga

Kota Watampone memiliki penyangga-penyangga kota yang merupakan batasan kota Watampone, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Titik koordinat penyangga Kota Watampone

No	Penyangga	Astronomi	Posisi
01	Palakka	S.04° 32' 07,4" E.120° 19' 34,2"	Sebelah Barat lalengbata
02	Mare'	S.04° 32' 06,7" E.120° 19' 07,9"	Sebelah Selatan lalengbata
03	Maccope	S.04° 32' 42,2" E.120° 19' 28,4"	Sebelah Utara lalengbata
04	Bajoe	S.04° 32' 40,5" E.120° 19' 12,6"	Sebelah Timur lalengbata

Sumber: Hasil survei, 2006.

Wilayah-wilayah penyangga ini memiliki potensi-potensi lingkungan sebagai berikut:

1. Palakka, di daerah ini terdapat pintu gerbang yang dilalui berbagai macam transportasi. Pintu gerbang ini menghubungkan antara Kota Watampone dengan Makassar.
2. Mare' merupakan sumber produksi pangan, karena di tempat ini terdapat area persawahan milik kerajaan.
3. Maccope juga memiliki area persawahan dan merupakan sumber produksi pangan yang disalurkan ke pasar Watampone untuk keperluan jual beli.
4. Bajoe, daerah ini merupakan jalur perdagangan antar Negara. Di Bajoe ini juga terdapat sumber produksi yang berasal dari laut.

3. 2 Periode Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah melewati peperangan melawan kerajaan Bone yang berakhir dengan tertangkapnya La Pawawoi Karaeng Segeri (Raja Bone ke-31), maka Belanda menguasai dan membangun sistem pemerintahannya di kota Watampone. Pada periode ini banyak didirikan bangunan-bangunan kolonial, karena pada masa itu kolonial Belanda tinggal dan membentuk sistem pemerintahannya di kota Watampone. Bangunan-bangunan yang didirikan pada periode kolonial di gambarkan di bawah, diantaranya:

1. Kantor Militer

Bangunan yang berfungsi sebagai sarana militer dalam kawasan ini terdapat tiga jenis, meliputi:

a. Ajudan jenderal kodam VII Wirabuana/ Ajudan jenderal korem 141 Toddopuli

Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengbata* dan merupakan bangunan militer yang didirikan pada tahun ±1919. awalnya bangunan ini berfungsi sebagai kantor militer pemerintah Belanda, dan sekarang bangunan ini berfungsi sebagai kantor militer pemerintah Bone. Bangunan ini terdiri dari 3 bagian bangunan, bangunan bagian pertama merupakan bangunan perkantoran, bangunan bagian kedua dan ketiga merupakan bangunan tempat tinggal para pegawai kantor tersebut. Bangunan bagian pertama memiliki 5 buah pintu. Bangunan ini berwarna hijau, kuning dan hitam, beratap seng, dengan lantai berwarna merah tua dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih. Bangunan ini memiliki fentilasi dibagian atapnya. Di bagian depan kantor ini terdapat beberapa jenis tanaman bunga.

b. Kantor Residen Peralatan

Bangunan ini merupakan bangunan kantor militer yang didirikan pada tahun ±1920 dan berada di dalam kompleks *lalengbata*. Dulunya bangunan ini berfungsi sebagai kantor militer pemerintah Belanda dan sekarang masih tetap berfungsi sama. Fisik bangunan berwarna putih hijau. Bangunan ini terbagi atas 3 bagian, bagian pertama merupakan bangunan perkantoran, bagian kedua merupakan gudang, dan bangunan ketiga merupakan pos penjagaan. Pada sebelah kanan bangunan pertama terdapat garasi mobil yang memanjang.

c. Penjara Belanda

Bangunan ini awalnya merupakan penjara yang dibangun oleh Belanda pada tahun ±1919, namun sekarang bangunan ini dijadikan sebagai perumahan untuk pegawai kejaksaan. Penjara ini berada di dalam kompleks *lalengbata*. Kondisi bangunan ini sudah kurang terawat. Pada bagian dalam bangunan memperlihatkan bangunan-bangunan yang memiliki terali-terali besi.

Tabel 2. Bangunan Kantor Militer

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Ajudan jenderal kodam VII Wirabuana/Ajudan jenderal korem 141/Toddopuli	Bangunan publik	Jln.Orde Baru
02	Kantor Denpal	Bangunan publik	Jln.Sultan Hasanuddin
03	Penjara Belanda	Bangunan publik	Jln.Merdeka

Sumber: Hasil survei, 2006

2. Tangsi Belanda

Bangunan yang merupakan tangsi-tangsi Belanda dalam kawasan ini, meliputi:

a. Tangsi Bone I

Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengbata* dan didirikan pada tahun ±1906 dengan fungsi awalnya sebagai tansi militer milik Belanda dan sekarang berfungsi sebagai kantor militer masyarakat Bone. Bangunannya berwarna putih hijau, dan terdiri dari beberapa bagian bangunan. Masing-masing bangunan memiliki fungsi diantaranya ada yang sebagai bangunan perkantoran dan ada juga yang sebagai gudang penyimpanan senjata. Dibagian depan bangunan ini terdapat satu tiang bendera. Bangunan ini dikelilingi dengan tembok berwarna putih

b. Tangsi Bone II

Kantor PM ini dibangun pada tahun ±1906 yang terletak di jalan Orde baru tepatnya di dalam kompleks *lalengbata*, kantor ini dulunya merupakan asrama Belanda yang biasa disebut tansi Bone II dan sekarang kantor ini berfungsi sebagai kantor militer. Bangunan kantor PM ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bangunan bagian pertama merupakan bangunan perkantoran dan bangunan bagian kedua merupakan tempat peristirahatan. Di belakang bangunan pertama terdapat sebuah sumur, samping kanan bangunan pertama terdapat lapangan volley. Kantor PM ini memiliki 8 buah jendela berwarna putih, 12 ventilasi

berwarna biru, 5 buah pintu dengan warna putih, dan memiliki atap seng. Bangunan kantor PM ini berwarna putih dan hitam dan dikelilingi dengan pagar tembok berwarna putih.

c. Tangsi Bone III

Bangunan ini didirikan pada tahun ± 1920 dan awalnya merupakan bangunan tempat tinggal tentara Belanda dengan nama tangsi Bone III yang berada di sebelah Selatan kompleks *lalengbata*. Sebagian dari bangunan ini sudah ada yang direnovasi tapi masih ada juga yang masih menggunakan bangunan asli yang terbuat dari kayu. Pada sudut kanan asrama ini terdapat sebuah mesjid.

Tabel 3. Bangunan Tangsi Belanda

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Tangsi Bone I	Bangunan pertahanan	Jln. Jendral Sudirman
02	Tangsi Bone II	Bangunan pertahanan	Jln. Orde baru
03	Tangsi Bone III	Bangunan pertahanan	Jln. Gatot Subroto

Sumber: Hasil survei, 2006

3. Rumah Tinggal

Bangunan yang berfungsi sebagai sarana pribadi yang berupa rumah tinggal, meliputi:

a. Rumah Dinas Dandim 1407

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1919 , dulunya bangunan ini merupakan bangunan rumah tinggal pemerintah Belanda yang berada di kompleks *lalengbata*. Sekarang bangunan ini dijadikan sebagai rumah dinas militer. Bangunan rumah ini berwarna putih dan biru. Memiliki 6 buah jendela berwarna kuning dan coklat, 7 buah ventilasi, dan 2 buah pintu pada bagian depan dan belakang rumah.

b. Rumah dinas Korem 141

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1919 , dahulu bangunan ini merupakan tempat tinggal pemerintah Belanda yang dijadikan sebagai rumah dinas militer. Sekarang bangunan ini masih tetap berfungsi sebagai rumah dinas militer Bone. Fisik bangunan rumah ini berwarna putih, merah dan kuning. Memiliki 6 buah jendela berwarna kuning yang bagian atasnya kaca dan bagian bawahnya kayu. memiliki 7 buah ventilasi, dan 3 buah pintu

pada bagian depan, samping dan belakang rumah. Beratap seng dan dikelilingi pagar tembok berwarna putih. Pada halaman depan rumah terdapat pohon mangga dan tumbuhan lainnya. Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengbata*.

c. Rumah Dinas Danrem

Bangunan ini dulunya juga merupakan bangunan rumah tinggal pemerintah Belanda yang dibangun pada tahun ± 1919 dan sekarang dijadikan sebagai rumah dinas militer. Bangunan rumah ini berwarna kuning dan merah. Memiliki 8 buah jendela berwarna kuning, 5 buah ventilasi, dan 2 buah pintu pada bagian depan dan belakang rumah. Atapnya dari genteng serta dikelilingi pagar besi berwarna putih, kondisi bangunan terawat. Rumah ini berada di dalam kompleks *lalengbata*.

d. Rumah Komisaris Belanda

Bangunan ini didirikan pada tahun ± 1932 , bangunan ini awalnya merupakan rumah tinggal milik Belanda yang sekarang dijadikan rumah jabatan milik Bank BRI yang berada di dalam kompleks *lalengbata*. Bangunan ini sudah mengalami renovasi, tetapi tidak mengubah bentuk arsitektur aslinya. Bangunan ini berwarna putih, beratap seng, memiliki 9 buah jendela, 2 buah pintu, dan 2 buah ventilasi. Bentuk bangunannya sangat berbeda dengan bangunan pribumi lainnya

e. Rumah Pemerintah Belanda

Bangunan ini dibangun pada periode pemerintahan kolonial Belanda tepatnya tahun ± 1919 dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Sekarang bangunan ini disewa oleh pihak perhubungan untuk dijadikan kantor. Bentuk arsitektur bangunannya tidak ada yang berubah. Bangunan ini berwarna kuning dan putih, beratap seng, memiliki 7 buah jendela, 6 ventilasi dan 2 pintu. Selain itu bangunan ini juga menggunakan serambi dan pilar. Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengbata*.

f. Wisma Bola Ridie

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1932 , awalnya bangunan ini merupakan rumah tinggal dan sekarang difungsikan sebagai penginapan. Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengbata*, yang. Fisik bangunan bercat warna kuning dan putih. Memiliki atap seng dan terdapat kemuncak. Bangunan ini terdiri dua bagian, bangunan bagian depan berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan bangunan bagian belakang berfungsi sebagai kamar. Rumah ini memiliki 8 buah pintu, masing-masing 1 pintu depan, 1 pintu belakang,

1 pintu samping dan 5 buah pintu kamar. Memiliki 10 buah jendela, 14 buah ventilasi, serta dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih.

g. Rumah Tinggal 1

Bangunan rumah ini merupakan rumah tinggal yang berada di dalam kompleks *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1920 . Dari awal hingga sekarang bangunan ini difungsikan sebagai tempat tinggal. Bangunan ini bercat warna putih kuning, memiliki 3 buah pintu depan, belakang, dan samping. Memiliki 6 buah jendela, 4 buah ventilasi dan beratap genteng. Kondisi rumah tidak berpenghuni dan tidak terawat.

h. Rumah Dinas Kapolwil

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1932 , yang berfungsi sebagai rumah militer, sekarang bangunan ini tetap berfungsi sama yaitu sebagai rumah dinas militer. Bangunan rumah ini memperlihatkan rumah bergaya khas kolonial yang memperlihatkan konstruksi atap yang terbuat dari seng. Selain itu terdapat juga jendela dan pintu yang terbuat dari kayu dengan warna dasar kuning. Pada sisi sebelah kiri bangunan rumah terdapat ventilasi udara yang berbentuk lingkaran. Bangunan rumah ini berwarna cat putih dengan pintu, jendela dan ventilasi yang berwarna kuning. Bangunan ini pula dikelilingi pagar besi berwarna putih.

i. Rumah tinggal 2

Bangunan ini berada di dalam kompleks *lalengabata* (jalan Makmur) yang dibangun pada tahun ± 1938 . Dari awal hingga sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal. Fisik bangunannya berwarna putih dan biru, memiliki 2 buah pintu, 12 buah jendela, dan 3 buah ventilasi. Bangunan ini beratap genteng dan dikelilingi pagar besi. Di bagian sebelah kiri bangunan rumah ini terdapat garasi mobil.

j. Losmen Nasional

Losmen ini berada di dalam kompleks *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1938 . Bangunan losmen tampak dari samping memperlihatkan bangunan yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas memperlihatkan detail bangunan dengan jendela yang berjumlah 3 buah dan disekitarnya diberikan pagar pembatas yang terbuat dari kayu dan dicat dengan warna coklat. Pada lantai dasar memperlihatkan juga detail bangunan dengan jumlah jendela sebanyak 3 buah dan 2 pintu yang berada pada bagian depan dan samping losmen. Losmen ini masih memperlihatkan bentuk bangunan dengan gaya arsitektur kolonial. Struktur

yang berbentuk kubus dengan warna dasar bangunan putih. Pada bagian depan bangunan terdapat 5 buah jendela dan 1 pintu utama dan 1 pintu pada bagian samping. Ditengah-tengah bangunan terdapat bangunan yang berbentuk tower namun masih merupakan bagian bangunan losmen tersebut yang pada bagian depannya terdapat 4 buah jendela yang tersusun ke atas dan dipuncak bangunan tersebut terdapat 2 lubang ventilasi udara serta atap yang ukurannya kecil. Di bagian sebelah kiri bangunan losmen terdapat bangunan rumah yang terbuat dari kayu yang berbentuk persegi panjang. Pada bagian samping bangunan terdapat jendela yang berjumlah 4 buah dan pada bagian depan bangunan terdapat 8 buah jendela dan 1 buah pintu utama. Dibagian depan bangunan terdapat bangunan semi permanen yang hanya terdiri dari atap saja yang bersambungan langsung dengan bangunan rumah tersebut dan ditopang oleh 4 buah tiang penyangga.

k. Rumah Tinggal Orang Cina 1

Bangunan ini terletak di sebelah Barat *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1920 . Bangunan ini dahulunya merupakan rumah tinggal orang Cina namun sekarang beralih fungsi menjadi kantor Golkar. Fisik bangunan ini berwarna kuning, beratap genteng dan dikelilingi pagar besi berwarna kuning.

l. Asrama Polisi

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1925 . Bangunan ini merupakan areal pemukiman anggota kepolisian, yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Awalnya bangunan ini merupakan asrama militer Belanda dan sekarang bangunan ini berfungsi sebagai asrama polisi. Bangunan ini secara keseluruhan berbentuk kotak memanjang dengan ventilasi udara pada setiap bangunannya berjumlah 8 buah, konstruksi atapnya cenderung datar, mengikuti struktur bangunannya. Di sekitar bangunan ini banyak ditumbuhi tumbuhan pagar. Secara fisik, bangunan ini tidak ada yang berubah, hanya ada sedikit penambahan bangunan yang tidak permanent pada bagian depannya.

m. Rumah Tinggal 3

Rumah tinggal ini berada di dalam *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1940 . Dari awal sampai sekarang bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal. Fisik bangunan ini terbuat dari kayu, beratap genteng, memiliki 6 buah jendela dan 3 buah fentilasi serta 2 buah pintu bagian depan dan belakang rumah.



n. Rumah Tinggal Komisaris Pemerintah Belanda

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1922 dan terletak di dalam *lalengbata*. Dahulunya bangunan ini merupakan rumah tinggal komisaris Belanda, kemudian beralih fungsi menjadi kantor Bosowa. Namun sekarang bangunan ini sudah tidak difungsikan lagi. Fisik bangunannya berwarna putih dengan atap seng dan kondisi bangunan ini kurang terawat.

o. Tempat Tinggal Orang Cina 2

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1940 dan terletak di dalam *lalengbata*. Awalnya bangunan ini merupakan tempat tinggal orang Cina dan sekarang beralih fungsi menjadi bangunan sekolah. Bagian depan bangunan ini terdapat deretan pintu yang berjumlah 2 buah dan bangunan bagian belakang memiliki 2 buah pintu. Jumlah jendela 7 buah dengan 4 buah ventilasi. Bangunan ini pula dikelilingi pagar besi berwarna putih.

Berikut tabel sarana pribadi yang ada pada pemerintahan Belanda di kota Watampone:

Tabel 4. Sarana Pribadi

	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Rumah Komisaris Belanda	Tempat tinggal	Jln. Petta Ponggawae
02	Rumah tinggal 1	Tempat tinggal	Jln Merdeka
03	Rumah tinggal orang Cina 1	Tempat tinggal	Jln.Besse Kajuara
04	Rumah Komisaris Belanda	Tempat tinggal	Jln.PT.Ponggawae
05	Bekas rumah jabatan bupati	Tempat tinggal	Jln Merdeka
06	Wisma Bola RidiE	Tempat tinggal	Jln Merdeka
07	Rumah dinas Kapolwil	Tempat tinggal	Jln.Makmur
08	Losmen Nasional	Tempat tinggal	Jln. Mesjid
09	Rumah tinggal 2	Tempat tinggal	Jln.Makmur
10	SMP 5/SKKA	Tempat tinggal	Jln.Besse Kajuara
11	Rumah tinggal 3	Tempat tinggal	Jln.Jenderal Sudirman
12	Rumah pemerintah Belanda	Tempat tinggal	Jln. MH Tamrin
13	Rumah dinas Dandim 1407	Tempat tinggal	Jln.orde baru no. 9
14	Rumah Dinas Korem 141	Tempat tinggal	Jln. Orde baru no 10
15	Rumah dinas Danrem	Tempat tinggal	Jln. Pt ponggawae

Sumber: Hasil survei, 2006

n. Rumah Tinggal Komisaris Pemerintah Belanda

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1922 dan terletak di dalam *lalengbata*. Dahulunya bangunan ini merupakan rumah tinggal komisaris Belanda, kemudian beralih fungsi menjadi kantor Bosowa. Namun sekarang bangunan ini sudah tidak difungsikan lagi. Fisik bangunannya berwarna putih dengan atap seng dan kondisi bangunan ini kurang terawat.

o. Tempat Tinggal Orang Cina 2

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1940 dan terletak di dalam *lalengbata*. Awalnya bangunan ini merupakan tempat tinggal orang Cina dan sekarang beralih fungsi menjadi bangunan sekolah. Bagian depan bangunan ini terdapat deretan pintu yang berjumlah 2 buah dan bangunan bagian belakang memiliki 2 buah pintu. Jumlah jendela 7 buah dengan 4 buah ventilasi. Bangunan ini pula dikelilingi pagar besi berwarna putih.

Berikut tabel sarana pribadi yang ada pada pemerintahan Belanda di kota Watampone:

Tabel 4. Sarana Pribadi

	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Rumah Komisaris Belanda	Tempat tinggal	Jln. Petta Ponggawae
02	Rumah tinggal 1	Tempat tinggal	Jln Merdeka
03	Rumah tinggal orang Cina 1	Tempat tinggal	Jln.Besse Kajuaara
04	Rumah Komisaris Belanda	Tempat tinggal	Jln.PT.Ponggawae
05	Bekas rumah jabatan bupati	Tempat tinggal	Jln Merdeka
06	Wisma Bola RidiE	Tempat tinggal	Jln Merdeka
07	Rumah dinas Kapolwil	Tempat tinggal	Jln.Makmur
08	Losmen Nasional	Tempat tinggal	Jln. Mesjid
09	Rumah tinggal 2	Tempat tinggal	Jln.Makmur
10	SMP 5/SKKA	Tempat tinggal	Jln.Besse Kajuaara
11	Rumah tinggal 3	Tempat tinggal	Jln.Jenderal Sudirman
12	Rumah pemerintah Belanda	Tempat tinggal	Jln. MH Tamrin
13	Rumah dinas Dandim 1407	Tempat tinggal	Jln.orde baru no. 9
14	Rumah Dinas Korem 141	Tempat tinggal	Jln. Orde baru no 10
15	Rumah dinas Danrem	Tempat tinggal	Jln. Pt ponggawae

Sumber: Hasil survei, 2006

4. Bangunan sekolah

Bangunan yang berfungsi sebagai sarana pendidikan di Kota Watampone pada masa ini meliputi:

a. *Hollandsche Chaeche School*

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1922 dan berfungsi sebagai sekolah untuk orang Cina dan sekarang berfungsi sebagai sekolah untuk orang pribumi. Bangunan ini terletak di sebelah Utara *lalengbata*. Pada gerbangnya menunjukkan identitas bangunan tersebut yaitu "SMP NEG 2 WATAMPONE". Pada bagian tengah terdapat bangunan permanen yang mencirikan arsitektur Kolonial yang terlihat pada detail-detail bangunan yang terdiri dari pilar-pilar penyangga dan bentuk bangunannya yang kotak serta atapnya yang berbentuk persegi dan terdapat kemuncak pada bagian atapnya. Bangunan pada sisi kanan bentuk memanjang dan terdapat bangunan semi permanen pada bagian tengahnya yang ditopang 6 buah tiang penyangga. Selain itu juga terlihat deretan pintu yang berbentuk persegi panjang dengan warna dasar biru. Pada sisi kiri terdapat salah satu bangunan sekolah yang memperlihatkan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari balok kayu serta struktur bangunan lainnya yang meliputi atap dan dinding bangunan.

b. *Lahar School*

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1907 dan terletak di sebelah Timur *lalengbata*. Awalnya bangunan ini merupakan sekolah orang Belanda, namun sekarang berfungsi sebagai sekolah orang pribumi. Bagian depan bangunan ini terdapat deretan pintu dan jendela yang berbentuk persegi panjang. Jumlah jendela ada 12 buah dan pintunya berjumlah 2 buah. Selain itu terdapat juga deretan penyangga atap yang berjumlah 14 buah yang berbentuk sudut siku-siku dengan Atap dari seng.

c. *Inlandsche School*

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1909 dan terletak di sebelah Selatan *lalengbata*. Awalnya bangunan ini merupakan sekolah Belanda dan sekarang bangunan ini merupakan sekolah orang pribumi. Bangunan sekolah ini terdiri dari beberapa bagian bangunan. Bagian depan merupakan bangunan kantor sekolah ini. Bagian belakang, samping kiri dan kanan merupakan bangunan kelas.

d. *Milis School*

Bangunan ini didirikan pada tahun ± 1908 dan berfungsi sebagai sekolah Belanda namun kemudian beralih fungsi menjadi kediaman Raja Bone ke-32, yaitu La Mappanyukki. Fisik bangunan ini berwarna hijau dan putih, beratap seng, memiliki 9 buah jendela, dan 5 buah pintu. Bagian dalam terdapat benda-benda peninggalan kerajaan Bone.

e. *Inlandsche School*

Bangunan ini terletak di dalam *lalengbata*, yang didirikan pada tahun ± 1908 . Awalnya bangunan ini berfungsi sebagai sekolah bumi putera kemudian beralih fungsi menjadi sekolah orang pribumi. Fisik bangunan ini terdapat tiga buah bangunan yang berbentuk kubus dengan warna dinding kuning serta atap yang terbuat dari seng yang berwarna hijau. Bangunan sekolah ini memiliki atap seng dan terdapat tulisan nama sekolah ini, selain itu bangunan sekolah ini juga terdapat tiang penyangga.

f. *Volkschool*

Bangunan ini terletak di sebelah Timur *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1910 . Awalnya bangunan ini merupakan bangunan sekolah rakyat, yang kemudian berganti menjadi sekolah pribumi. bangunan ini terdiri 3 bagian yang membentuk huruf U. bagian pertama berada pada sebelah kiri merupakan bangunan kelas yang terdiri dari 3 ruangan, bangunan bagian kedua terdapat pada sebelah kanan yang juga merupakan bangunan kelas yang terdiri dari 3 ruangan, dan bagian tengah merupakan bangunan perkantoran sekolah ini yang memiliki 2 buah pintu serta 17 jendela. Bangunan ini beratap genteng dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih hijau.

g. *Volkschool*

Bangunan sekolah ini berada di jalan kawerang sebelah Timur *lalengbata*. Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1908 , dengan fungsi awal sebagai sekolah rakyat. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai sekolah orang pribumi. Bangunan ini terdiri 2 bagian yang membentuk huruf L. bagian pertama berada pada sebelah kiri merupakan bangunan perkantoran sekolah yang terdiri 1 ruangan, bangunan bagian kedua terdapat pada bagian tengah merupakan bangunan kelas yang membentuk bujur sangkar yang memanjang. sekolah ini yang memiliki 8 buah pintu serta 13 jendela. Bangunan ini beratap genteng dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih.

Berikut tabel sarana pendidikan di Kota Watampone pada periode pemerintahan Belanda di kota Watampone:

Tabel 5. Sarana Pendidikan

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Inlandsche school	Bangunan Publik	Jln Makmur
02	Lahar School	Bangunan Publik	Jln. MH Tamrin
03	Inlandsche school	Bangunan Publik	JlnJenderal Sudirman
04	Hollandsche Chaeche School	Bangunan public	Jln.Gunung Bawakaraeng
05	Volkschool	Bangunan Publik	Jln.Kawerang
06	Volkschool	Bangunan Publik	Jln. MH Tamrin
07	Milis School	Bangunan public	Jln MH Tamrin

Sumber: Hasil survei, 2006.



5. Bangunan industri

Bangunan yang merupakan sarana industri pada masa ini meliputi:

a. Pabrik Penggilingan Padi

Bangunan ini berada di sebelah Barat *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1919 . awalnya bangunan ini merupakan pabrik penggilingan padi milik pemerintah Belanda yang hak pengelolaannya diberikan kepada orang Cina. Sekarang bangunan ini beralih fungsi menjadi sekolah rang pribumi. Tampak depan terdapat deretan bangunan yang memanjang dengan bangunan semi permanen pada bagian tengah bangunan. Pada bagian atapnya mirip rumah adat Bugis Makassar yang dipadukan dengan bangunan modern. Pada bagian puncaknya terdapat ventilasi udara. Bagian langit-langit bangunan tersusun dari rangkaian bambu dan balok kayu, selain itu terdapat juga lonceng tua berbentuk tabung yang terbuat dari besi yang dicat perak. Bagian dinding bangunan terdapat deretan pintu dan jendela serta lubang ventilasi udara yang berbentuk persegi panjang. Bagian sudut bangunan terdapat rangkaian jendela berjumlah 4 buah yang terbuat dari kayu dan berbentuk persegi panjang dengan warna abu-abu. Selain itu terlihat dinding yang sudah mulai keropos dan atap bangunan yang sudah mulai berkarat. Di sisi lain terdapat deretan jendela yang terdiri dari rangkaian teralis besi pada bagian tengahnya dan pada bagian atasnya terdapat ventilasi udara yang berbentuk persegi panjang yang berjumlah 8 buah.

b. Pabrik Tekstil

Bangunan ini terletak di sebelah Selatan *lalengbata*, dahulunya bangunan ini merupakan pabrik tekstil milik Belanda yang dibangun pada tahun ± 1919 yang pengelolaannya diberikan

kepada orang Cina, namun pabrik tekstil ini sekarang berubah fungsi menjadi rumah sakit tentara. Bangunan ini terbagi atas tiga gedung dengan bentuk yang sama, yaitu fisik dan strukturnya melebar. Setiap gedung memiliki ventilasi berjumlah 10 buah dan terbuat dari kaca.

Tabel 6. Sarana Industri

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Pabrik Penggilingan Padi	Bangunan publik	Jln.Gunung Jayawijaya
02	Pabrik Tekstil	Bangunan publik	Jln.Jenderal Sudirman

Sumber: Hasil Survei, 2007

6. Kantor Pemerintah

Bangunan yang berfungsi sebagai kantor pemerintahan pada masa ini meliputi:

a. Perusahaan MPS

Bangunan ini berada di sebelah Selatan *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1920 . Bangunan ini dari awal sampai sekarang merupakan perusahaan listrik yang bernama MPS dan sekarang berubah nama menjadi PLN. Bangunan ini memperlihatkan bentuk yang memanjang berbentuk kubus dengan warna dasar bangunan kuning. Pada bagian tengahnya terdapat bangunan semi permanen yang menjorok keluar dan ditopang oleh 2 buah tiang. Selain itu terdapat juga 8 buah jendela dari kaca. Khusus pada bagian atapnya berbentuk trapesium pada bagian atas dan bagian bawah atapnya menjorok keluar.

b. Perusahaan MPS 2 (Cabang)

Bangunan ini berada di dalam *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1922 dan merupakan bangunan MPS cabang. Bangunan tampak dari depan memperlihatkan bentuk bangunan persegi panjang dan pada bagian tengah terdapat bangunan utama bercat kuning dengan 3 buah pilar sebagai penyangganya. Hampir keseluruhan bangunan pada bagian depannya terdapat jendela yang terbuat dari kaca selain itu terdapat pagar besi yang dicat berwarna putih. Tampak samping memperlihatkan deretan jendela berbentuk krepak (salah satu bentuk jendela) yang terbuat dari kayu dengan warna dasar hijau.

c. Kantor Dagang Belanda

Bangunan ini berada di sebelah Timur *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1916 . Pada masa pemerintahan koloni Belanda gudang ini merupakan kantor dagang Belanda dan juga

merupakan gudang penyimpanan Belanda. Sekarang bangunan ini merupakan bangunan kosong yang fisik bangunannya kurang terawat.

d. Kantor Telepon

Bangunan ini terletak di dalam *lalengbata* dan dibangun pada tahun ± 1922 Dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang bangunan ini merupakan bangunan kantor telepon. Secara fisik bangunan ini berwarna putih dan biru, beratap genteng dan berpagar tembok dan besi berwarna biru..

e. Kantor Perusahaan Air Pertama

Bangunan ini terletak di dalam *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1920 . Bangunan ini dulunya merupakan perusahaan distribusi air pertama di Kota Watampone namun sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi menjadi bangunan perkantoran bank BRI. Secara fisik bangunan ini bercat warna putih dengan atap seng berwarna biru dan dikelilingi dengan pagar besi berwarna putih. Bangunan ini memiliki pintu yang terbuat dari kaca.

f. Kantor Perusahaan Air 2

Bangunan ini dibangun pada tahun ± 1932 dan berada di sebelah Barat *lalengbata*. Awal bangunan ini merupakan kantor cabang perusahaan air pertama dan sekarang bangunan ini masih memiliki fungsi yang sama. Bangunan ini berbentuk slinder, pada bagian kanannya terdapat satu bangunan yang merupakan pos penjagaan.

Tabel 7. Bangunan Kantor Pemerintah

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Perusahaan MPS 1	Bangunan Publik	Jln.Jenderal Sudirman
02	Perusahaan MPS 2	Bangunan Publik	Jln.Sultan Hasanuddin
03	Kantor dagang Belanda	Bangunan Publik	Jln. Yos Sudarso
04	Kantor Telepon	Bangunan Publik	Jln.Wolter Monginsidi
05	Kantor perusahaan air pertama	Bangunan Publik	Jln.Ahmad Yani
06	Kantor PDAM	Bangunan Publik	Jln.Gunung Jayawijaya

Sumber: Hasil survei, 2007.



7. Bangunan Sarana Keagamaan

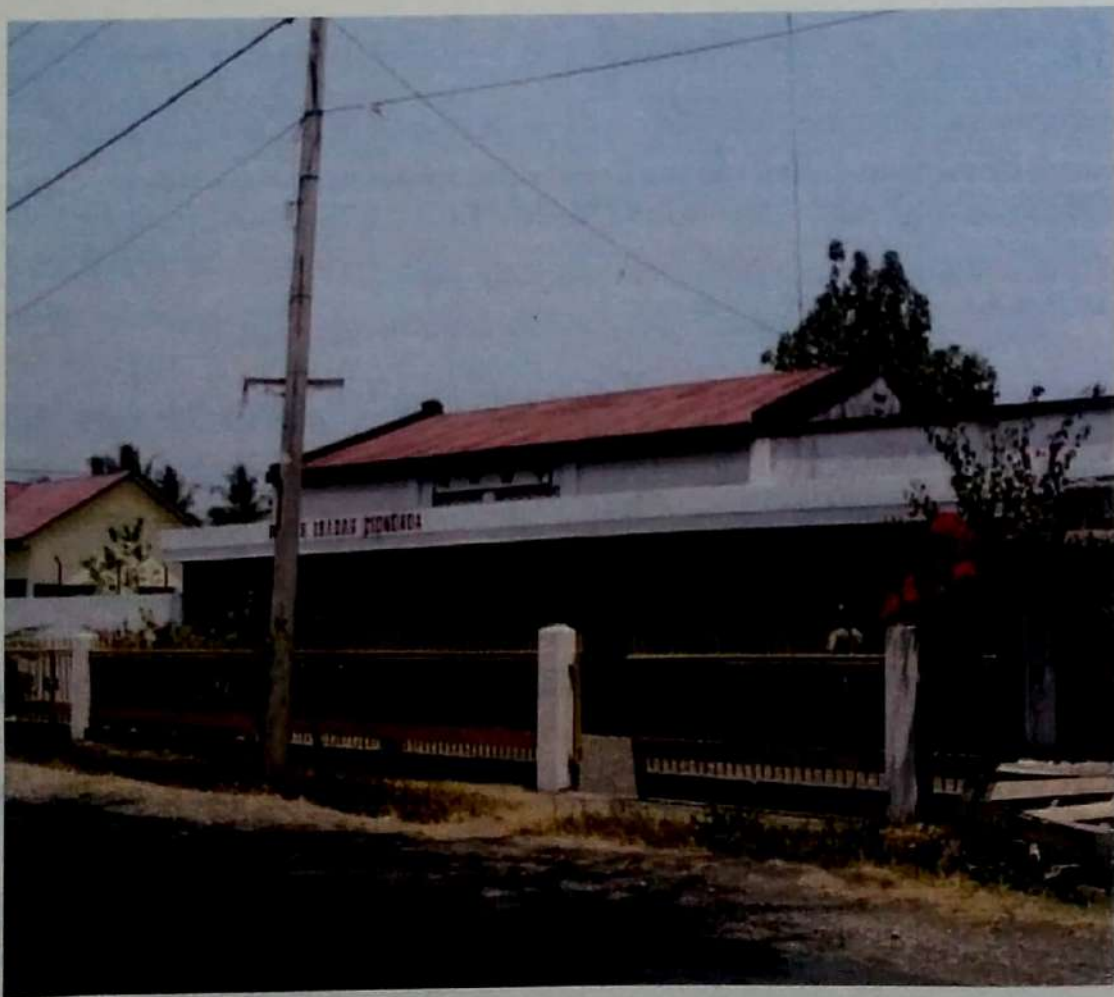
Bangunan yang merupakan sarana peribadatan yang berada dalam kawasan ini, meliputi:

a. Gereja GPIB Immanuel

Bangunan ini merupakan sarana peribadatan yang dibangun pada tahun ± 1920 yang terletak di dalam *lalengbata*. Bangunan ini dibangun pemerintah kolonial Belanda, namun bangunan ini sudah mengalami renovasi total. Di bagian atap bangunan ini terdapat kemuncak yang berbentuk ayam jago sehingga masyarakat Bone mengenalnya dengan nama gereja ayam. Bangunan ini memiliki 2 buah ventilasi berbentuk bulat, 6 buah jendela, 1 buah pintu dan beratap genteng serta dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih.

b. Klenteng

Klenteng ini terletak di jalan urip sumoharjo yaitu di sebelah Utara *lalengbata*, yang dibangun pada tahun ± 1925 . Dari awal hingga sekarang bangunan ini berfungsi sebagai sarana peribadatan untuk orang Cina. Bentuk klenteng persegi panjang, klenteng tersebut dikelilingi pagar kuning dengan jumlah bangunan terbagi dua bagian yaitu bangunan pertama merupakan bangunan tempat beribadah dengan bentuk persegi empat berwarna putih. Pada bagian atap berwarna merah dengan bentuk atap segi tiga memanjang, dibawah



atap terdapat tulisan Cina dan tulisan rumah ibadah tionghoa, jumlah pintu dua buah, berwarna merah dengan les kuning, daun pintu klenteng berjumlah dua buah, pada bagian kanan kiri pintu terdapat tulisan Cina dengan warna emas dengan les merah. Pada bagian atas pintu terdapat ventilasi berbentuk persegi panjang dan pada bagian tengah ventilasi terdapat pembatas sebagai tanda pertengahan, pintu yang kedua merupakan pintu masuk ke dalam bangunan kedua dengan bentuk satu daun pintu, jendela pada klenteng berjumlah dua buah pada bagian depan, bentuk jendela lingkaran berwarna merah terdapat terali besi berwarna merah, pada bagian atas pintu terdapat tulisan Cina berwarna emas dengan les merah. Bangunan kedua yaitu tempat tinggal orang-orang Cina, letaknya berada di samping bangunan ibadah memanjang kebelakang, bentuk bangunan tersebut persegi panjang. Bangunan ini memiliki satu buah pintu yang terdapat pada bagian tengah bangunan tepatnya pada dinding bagian barat.

Tabel 8. Sarana Keagamaan

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
001	Gereja GPIB Immanuel	Tempat peribadatan	Jln. Petta Ponggawae
02	Klenteng	Tempat peribadatan	JlnUrip Sumoharjo

Sumber: Hasil Survei, 2006

8. Penginapan

Bangunan yang berfungsi sebagai penginapan yang berada di dalam kawasan ini meliputi:

a. Pasangrahan 1

Bangunan ini berada di dalam *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1932 . awalnya bangunan ini merupakan pasangrahan, kemudian setelah kolonial Belanda meninggalkan kota Watampone, bangunan ini beralih fungsi menjadi rumah jabatan bupati pertama di kota Watampone. Bangunan ini berlantai dua dengan warna bangunan putih dan hijau, memiliki 8 buah ventilasi, 7 buah jendela, 3 buah pintu, beratap seng dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna hijau dan putih.

b. Pasangrahan 2

Bangunan ini dibangun di dalam *lalengbata* pada tahun ± 1922 . Pasangrahan ini dulunya merupakan penginapan milik pemerintah Belanda yang sekarang dijadikan sebagai kantor.

Bangunan ini telah mengalami renovasi jadi sudah tidak memperlihatkan kondisi bangunan yang sebenarnya. Bangunan ini memiliki cat berwarna kuning, abu-abu, hitam dan putih dan atap genteng berwarna merah. Memiliki 4 buah pintu pada bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan. Memiliki 8 buah jendela dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna kuning dan putih.

Tabel 9. Bangunan Penginapan

No	Nama Bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Pasangrahan 1	Bangunan publik	Jln. Merdeka
02	Pasangrahan 2	Bangunan publik	Jln. Wolter Monginsidi

Sumber: Hasil Survei, 2006

9. Bangunan Sarana Umum

Bangunan yang berfungsi sebagai sarana umum pada masa ini di kota Watampone, meliputi:

a. Taman Kota

Taman ini berada di dalam *lalengbata* dan berdampingan dengan lapangan merdeka. Bangunan ini dibuat pada masa pemerintahan Belanda, tepatnya pada tahun ± 1910 . Taman ini banyak ditumbuhi bunga-bunga dengan bermacam-macam jenis. Di taman ini terdapat 6 rumah-rumah kecil, 13 lampu taman, dan pada bagian tengah bangunan ini terdapat patung Arung Palakka yang dulunya merupakan Raja Bone ke-15.

b. Rumah Sakit Watampone

Bangunan ini terletak di dalam *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1919 . Bangunan ini awalnya merupakan rumah sakit, namun sekarang beralih fungsi menjadi kantor dinas kesehatan. Fisik bangunan ini berwarna putih, beratap seng dan berpagar berwarna coklat.

c. Bioskop Watampone

Bangunan ini terletak di sebelah Timur *lalengbata* yang dibangun pada tahun ± 1922 . Awalnya bangunan ini merupakan gedung bioskop namun sekarang bangunan ini sudah tidak difungsikan sama sekali. Fisik bangunannya juga sudah tidak terawat dan sudah rusak.

d. Sumur Tua

Sumur ini berada di sebelah Selatan *lalengbata* yang dibangun pada tahun 1920. Dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang, sumur ini berfungsi sebagai sumber air masyarakat. Kondisi sumur terawat, masyarakat disekitar sumur tersebut masih menggunakan air dari sumur tersebut.

e. Jembatan

Jembatan berada di jalur poros kota Watampone-Bajoe tepatnya berada di sebelah Timur *lalengbata*. Jembatan ini dibangun pada tahun ± 1910 oleh pemerintah kolonial Belanda. Panjang jembatan ini ± 15 m dengan lebar ± 7 m. Tepat di bawah jembatan ini terdapat sungai.

Tabel 10. Bangunan Sarana Umum

No	Nama bangunan	Fungsi	Lokasi
01	Taman Kota	Bangunan Publik	Jln. Petta Ponggawae
02	Rumah Sakit Watampone	Bangunan Publik	Jln. Besse Kajuara
03	Sumur Tua	Sumber air masyarakat	Jln. Jenderal Sudirman
04	Bioskop Watampone	Bangunan publik	Jln. MH Tamrin
05	Jembatan	Bangunan publik	Jln. MH Tamrin

Sumber: Hasil survei, 2007

6. Periode La Mappanyukki (1931-1946)

Setelah Raja Bone ke-31 La Pawawoi Karaeng Segeri wafat, maka tidak ada lagi Raja Bone yang memerintah di kerajaan Bone dan pada pertengahan periode pemerintahan Belanda, atas usulan dewan *ade pituE* kerajaan Bone dan disetujui oleh pemerintah Belanda, maka diangkatlah La Mappanyukki sebagai Raja Bone ke-32, beliau merupakan putera dari Makkulawu Karaeng Lembangparang Sombayya ri Gowa. Periode pemerintahan Raja La Mappanyukki, beliau mendirikan bangunan-bangunan yang bercorak Islam karena beliau merupakan salah satu Raja Bone yang taat pada syariat Islam. Hal tersebut terbukti di dalam pelaksanaan tugas beliau sehari-hari yang selalu mengutamakan musyawarah dan beliau juga merupakan satu-satunya Raja Bone yang menunaikan rukun Islam yang ke-5 yaitu naik haji. Pada masa beliau bertahta di kerajaan Bone, beliau mendirikan bangunan yang bercorak Islam, diantaranya:

1. Mesjid Raya Lama

Bangunan mesjid ini berada di sebelah Utara *lalengbata* dan dibangun pada tahun ±1938. Mesjid ini memiliki atap yang berbentuk tumpeng dan bertingkat tiga, pada bagian puncak terdapat bundaran kecil yang berbentuk kuba dan di atasnya terdapat persoling yang berwarna biru tua dan berbentuk guci. Atap yang paling atas menggunakan genteng yang berwarna coklat tua, sedangkan atap yang kedua dan ketiga menggunakan seng yang berwarna kuning. Setiap tingkatan memiliki ventilasi, dimana pada tingkat yang paling atas memiliki enam ventilasi untuk tiap sisinya dengan bentuk persegi panjang dan ditutup dengan kaca. Atap yang kedua memiliki dua jenis ventilasi yaitu ventilasi berbentuk persegi panjang sebanyak tiga dan ventilasi yang berbentuk segi empat sebanyak enam buah dengan model penempatan selang seling yaitu ventilasi yang berbentuk persegi panjang diapit dengan ventilasi yang berbentuk segi empat dan ditutup dengan kaca.

Selain itu mesjid ini memiliki dua dinding yaitu dinding luar dan dinding dalam untuk sisi utara, selatan dan timur, dengan tinggi sekitar lima meter. Dinding luar memiliki jendela terbuka dan mempunyai bentuk seperti kubah sebanyak dua puluh dua. Pada dinding ini juga terdapat pintu sebanyak tiga buah dan masing-masing pintu memiliki dua buah daun pintu, pada dinding bagian dalam tidak terdapat jendela tetapi langsung menggunakan pintu sebanyak sembilan dan tiap pintu memiliki ventilasi pada bagian atasnya dengan bentuk persegi panjang dan ditutup dengan kaca. Dinding bagian barat terdapat jendela sebanyak delapan buah dengan bentuk persegi panjang yaitu memanjang dari atas kebawah dan ditutupi dengan kaca. Pada bagian dalam mesjid terdapat empat buah tiang dengan diameter sekitar 80 cm, selain itu pada bagian barat juga terdapat mihrap dan disebelah kanan mihrap terdapat mimbar yang berbentuk kubah dengan warna coklat dan dilengkapi dengan hiasan kaligrafi pada bagian atas. Mesjid ini memiliki denah segi empat dengan panjang kurang lebih 20 x 20 meter. Mesjid ini pula memiliki satu buah menara yang berada di sudut tenggara mesjid dengan denah segi empat yaitu 4 x 4 meter, tinggi menara sekitar 15m dengan bentuk semakin keatas semakin kecil.

2. Madrasah Amir Islam School

Madrasah ini berada di sebelah Utara *lalengbata* dan dibangun pada tahun 1938. Madrasah ini dulunya merupakan sekolah agama islam yang terkenal dengan nama Amir Islam School yang didirikan oleh Raja Bone ke-32 La Mappanyukki, namun kemudian sekolah ini berganti nama menjadi madrasah Amiriah. Madrasah ini terbagi 3 bagian dan semuanya berfungsi sebagai bangunan sekolah, sekolah ini beratap genteng berwarna hijau dan dikelilingi pagar tembok dan besi berwarna putih.

7. Perkembangan dan Perubahan Kota Watampone

Di Kota Watampone bangunan-bangunan kerajaan dan kolonial masih dapat terlihat sampai sekarang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa di Kota Watampone terdapat 21 bangunan kerajaan dan 45 bangunan kolonial. Keseluruhan bangunan yang teridentifikasi dapat menggambarkan perkembangan Kota Watampone dari periode pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri sampai periode pemerintahan La Mappanyukki.

Pendirian dan penempatan bangunan-bangunan kota pada dasarnya senantiasa melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik alasan filosofis maupun praktis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam disiplin arkeologi terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengetahui latar belakang pendirian dari suatu bangunan, diantaranya: struktural fungsional. Pendekatan ini digunakan untuk melihat struktur kota berdasarkan fungsi dari setiap bangunannya. Struktur kota ini merupakan perwujudan rangkaian makna sosial budaya yang saling bertaut, sehingga membentuk arti dan nilai menurut kecenderungan sejarah kebudayaan (Mahmud, 2003: 15).

Terkait dengan hal yang telah dijelaskan di atas, maka penempatan bangunan-bangunan kolonial dan kerajaan dalam ruang Kota Watampone tentu juga berdasarkan fungsi dari setiap bangunannya. Letak bangunan masing-masing memiliki arti penting dalam konteks struktur Kota Watampone. Pendirian bangunan berdasarkan fungsinya selain menunjukkan fase perkembangan, juga akan merefleksikan konsep struktur Kota Watampone pada masa tertentu. Dalam survei ditemukan bahwa konsep struktur fisik Kota Watampone sangat didominasi oleh bangunan berarsitektur Eropa.

7.1 Fase-fase Perkembangan Kota

Watampone merupakan kota yang morfologi ruangnya berasal dari konsep yang dikembangkan oleh otokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, pola-pola ruang kota kerajaan tersebut diubah oleh pemerintah kolonial Belanda setelah mengalahkan kerajaan Bone pada agresi militer kedua. Masa tersebut menjadi titik awal pemerintah Belanda merubah wajah Kota Watampone dari kota konsep Timur menjadi kota kolonial yang lebih mempertimbangkan aspek praktis. Perkembangan kota kolonial di Watampone ditandai dengan dibangunnya berbagai macam fasilitas: perkantoran, bangunan publik, bangunan pertahanan, tempat tinggal, dan sarana ibadah.

7.1.2 Kota Prakolonial

Kota prakolonial Watampone memiliki ciri dasar masyarakat *agricultural*. Pada kota prakolonial, fasilitas pokok yang dibangun di pusat kota terutama tempat ibadah, pasar,

serta lapangan yang selalu digunakan sebagai tempat latihan prajurit kerajaan. Komponen utama tersebut akan selalu dijumpai pada kota-kota kerajaan yang ada di Indonesia, sebagaimana juga masa prakolonial di Kota Watampone yang digambarkan berikut:

a. Persebaran Infrastruktur Pusat Kota

Berdasarkan hasil wawancara (Asmad Riadi) dan ditunjang dengan hasil penelitian sebelumnya, maka diketahui bahwa pusat Kota Watampone pada masa itu berada dalam lingkungan *Lalengbata*, tepatnya di Jln M.H Tamrin, Jln.Petta Ponggawae, Jln.Kalimantan, Jln. Bangka, Jln Manurungnge, Ponceng, Jln Sungai Musi, Jln. Sungai Kapuas, Jln. Cempalagi, Jln Onta, Jln Vetran, Jln Macan, Jln G.Bawakaraeng, Jln Ahmad Yani, Jln. Besse Kajuara. Bukti arkeologis embrio Kota Watampone prakolonial terdapat di dalam kompleks *Lalengbata*, diantaranya: tempat pelantikan raja yang berada di sebelah Timur Kota Watampone yaitu di Jalan Manurungnge, sebagai tempat turunnya To ManurungE ri Matajang sekaligus tempat perjanjian antara To Manurung dengan rakyat Bone pada tahun 1330. Kemudian lokasi istana raja Bone I, sebelum dipindahkan ke Jalan Veteran. Istana raja Bone I ini dibangun pada tahun 1330. Tidak jauh dari lokasi istana raja Bone, berada di sebelah Timur terdapat lapangan yang merupakan tempat latihan prajurit kerajaan, yang hadir bersamaan dengan keberadaan istana raja Bone. Bukti lain berupa sumur kerajaan bernama sumur Lagarowang, yang berada di sebelah Utara kota Watampone, tepatnya di desa Bukaka. Di sumur ini putera/ puteri raja yang baru lahir dimandikan, serta digunakan untuk upacara adat kerajaan. Sumur ini dibuat pada tahun ± 1335 . Selain sumur Lagarowang, disebelah Timur kota, tepatnya Jln Manurungnge juga terdapat sumur kerajaan yang dibangun pada tahun yang sama dan mempunyai fungsi yang sama dengan sumur Lagarowang yaitu Sumur Macca'. Di sebelah Barat Kota Watampone (Jalan Serigala) terdapat sumur Laccokkong dan kompleks makam Raja Bone II yang dibangun pada tahun ± 1424 . Sumur Lassonrong yang berada di sebelah Selatan Kota Watampone (Jalan Irian). Sumur di sebelah Timur kota lainnya yang ada tahun ± 1335 hanya berfungsi sebagai sumber air bersih penduduk kota meliputi: sumur Tibojong yang berada di Jalan Yos Sudarso, sumur Ponceng di Jalan Sungai Asahan, dan sumur Matajang di Jalan Manurungnge.

Selain bangunan-bangunan tersebut, terdapat juga pasar Watampone. Pasar ini awalnya merupakan pasar Palakka dan berada di desa Palakka, namun oleh La Saliju' yang merupakan Raja Bone ke-3 dipindahkan ke pusat Kota Watampone tepatnya di jalan Beringin. Pasar ini merupakan tempat aktivitas jual beli sekaligus merupakan pusat perekonomian masyarakat Bone pada masa itu yang barang dagangannya merupakan hasil pertanian masyarakat Bone. Selain barang-barang hasil pertanian, di pasar ini pula terdapat

tempat penjualan hewan. Seiring perkembangan kota yang terjadi di kota Watampone, di pasar tersebut sekarang sudah banyak dibangun toko-toko milik orang-orang Cina dan pada akhirnya pasar yang ada di tempat ini dipindahkan ke jalan Sukawati.

Pasar-pasar yang terdapat di kota-kota pusat kerajaan atau mungkin kota-kota lainnya merupakan salah satu sumber penghasilan bagi raja atau penguasa setempat lainnya yang berasal dari bea cukai dan pungutan-pungutan lainnya, namun sering kali juga pasar tergantung pada konsesi-konsesi serta jaminan-jaminan perlindungan dari penguasa atau raja. Dalam hal ini raja-raja atau penguasa selalu tertarik, karena hal itu merupakan bantuan yang berasal dari barang-barang serta produksi yang diperdagangkan, cukai-cukai, uang untuk pasukan dan biaya perlindungan pedagang-pedagang, tarif-tarif pasar dan cukai dari proses hukum. Bagaimanapun juga, penguasa atau raja mengharapkan memperoleh keuntungan dari perkampungan pedagang-pedagang serta kemampuan pedagang untuk membayar cukai pasar yang ada di sekitarnya (Tjandrasasmita, 2000: 132-133). Maka dalam hal ini ukuran tingkat perekonomian yang ada di Kota Watampone dapat terlihat dari pasar tersebut.

Kemudian di sebelah Utara Kota Watampone tepatnya di Jalan Sungai Citarum terdapat mesjid tua Mujahidin yang dibangun pada tahun ±1611. Mesjid ini merupakan bukti masuknya agama Islam secara resmi di kota Watampone. Di sebelah Utara Kota Watampone juga terdapat kompleks makam Kalokko'E yang ada pada tahun ±1640 yang merupakan kompleks makam Raja Bone ke-13 dan ke-21. Di sebelah Utara Kota Watampone yaitu di Jalan Urip Sumoharjo terdapat kompleks makam Cina. Kompleks makam Cina ini ada pada periode pemerintahan kerajaan di Kota Watampone yaitu sekitar abad ke-18. Pendirian bangunan selanjutnya pada tahun yang berada di sebelah Utara kota Watampone. Setelah itu pada tahun ±1823 terdapat kompleks makam Raja Bone 24, 26, 27, 29, 30 yang berada di sebelah Utara kota Watampone. Kemudian pada tahun ±1871 di bangun istana untuk Raja Bone ke-30 yaitu Fatima Banri, sedangkan istana raja Bone sebelumnya dihuni oleh panglima perang Bone yang bergelar Ponggawae, yaitu La Pawawoi Karaeng Segeri. Istana ini biasa disebut *bola Ampare'E*, sekarang berada di Jalan Merdeka. Pada tahun 1890 istana raja Bone I dipindahkan ke Jalan Veteran. Kemudian pada tahun 1895 di sebelah Utara kota dibangun tempat pelantikan raja Bone yang berada di Jalan Petta Ponggawae yaitu di sebelah Utara kota Watampone. Di tempat pelantikan ini sudah diletakkan tanah yang berasal dari tiga daerah, yaitu Gowa, Bone, dan Luwu (Lihat peta 4).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep pembangunan kota yang terjadi di Watampone tidak mengikuti konsep kota Islam sebagaimana yang pernah terjadi di Demak, Banten, Cirebon, Yogyakarta dan kota-kota Islam lainnya. Melainkan konsep pembangunan kota yang terjadi di Watampone mengikuti konsep kota lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan lapangan prajurit disebelah Timur istana dan

istana raja menghadap ke sebelah Timur. Sedangkan konsep kota-kota Islam, lapangan prajuritnya berada di sebelah Utara dan istana raja umumnya menghadap ke Utara. Hal ini terjadi di beberapa kota-kota Islam seperti: Cirebon, Demak, Banten, Yogyakarta, dan kota-kota Islam lainnya.

Selain itu pada periode prakolonial terdapat beberapa komponen-komponen kota yang berfungsi sebagai sarana umum, pemerintahan dan juga sarana pribadi yang berupa tempat tinggal. Adanya pendirian bangunan yang beragam dari tahun ke tahun dapat menggambarkan perkembangan kota, baik karena kebutuhan agama (Islam) berupa mesjid yang didirikan pada tahun ± 1611 maupun kebutuhan pemerintahan (istana) dan bangunan primer lainnya, seperti sumur.

b. Kampung di Bawah Kontrol Ade' Pitue

Pada masa pemerintahan Raja La Pawawoi Karaeng Segeri sudah terdapat kampung-kampung tua yang dipimpin langsung oleh Dewan *Ade pitue*. Kampung-kampung ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kampung yang berada di dalam *lalengbata* dan kampung yang berada di luar *lalengbata*. Kampung yang berada di dalam *lalengbata* meliputi: Kampung Ponceng, kampung bangsawan, kampung Laccokkong. Sedangkan kampung yang berada di luar *lalengbata* meliputi: di sebelah Utara *lalengbata* terdapat kampung Tanete Riawang dan kampung Ujung. Di sebelah Timur *lalengbata* terdapat kampung Tibojong, kampung Ta', dan kampung Panyula. Sebelah Barat terdapat kampung Maccege dan sebelah Selatan terdapat kampung Tanete Riattang. Berikut tabel pembagian kampung-kampung tersebut:

Tabel 11. Kampung-Kampung Tua

No	Nama kampung	Dalam Lalengbata	Luar Lalengbata	Posisi
01	Maccege		√	Sebelah barat lalengbata
02	Ponceng	√		Dalam lalengbata
03	Tibojong		√	Sebelah Timur lalengbata
04	Tanete Riattang		√	Sebelah Selatan lalengbata
05	Tanete Ri Awang		√	Sebelah Utara lalengbata
06	Ta'		√	Sebelah Timur lalengbata
07	Ujung		√	Sebelah Utara lalengbata
08	Kampung Laccokkong	√		Dalam lalengbata
09	Kampung Panyula		√	Sebelah Timur lalengbata
10	Kampung bangsawan	√		Dalam lalengbata

Sumber: Hasil survei, 2006

Dari tabel di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa kampung-kampung tua yang ada di Watampone tersebut ada yang berada di dalam *lalengbata* dan ada yang berada di luar *lalengbata*. Hal ini didasari adanya perbedaan stratifikasi sosial yang sangat menonjol. Kampung-kampung yang berada di dalam *lalengbata* menempati kelas sosial atas karena kampung-kampung ini dihuni oleh bangsawan keturunan raja-raja Bone. Sedangkan kampung-kampung yang berada di luar *lalengbata* menempati kelas sosial bawah karena dihuni oleh rakyat biasa. Keberadaan kampung-kampung tua ini sudah dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa bukti monumental seperti sumur-sumur tua yang merupakan sumur kerajaan, serta kompleks makam raja-raja Bone.

Di sekitar kampung-kampung yang berada di luar *lalengbata* terdapat areal persawahan. Pada masa itu, sistem mata pencaharian masyarakat Bone adalah bertani. Pertanian ini merupakan potensi yang sangat besar yang dimiliki masyarakat Bone yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Hasil-hasil pertanian mereka dibawa ke pasar untuk dijual.

c. Pemukiman Orang Asing

Orang asing yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi: orang Cina, orang Arab, dan orang Enrekang. Pemukiman orang asing di Kota Watampone masa prakolonial berada di dalam *lalengbata*. Mereka datang dengan misi yang berbeda-beda dan kemudian tinggal dan menetap di kota Watampone. Pemukiman orang Cina (*Chineesche kamp*) berada di Jalan Beringin, pemukiman orang Arab (*Arabische kamp*) berada di Jalan Sungai Citarum, dan pemukiman orang Enrekang berada di Jalan Onta. Menurut informan yang penulis temui (Andi Amir Sessu) orang Cina datang ke Bone awalnya ingin berdagang yang kemudian tinggal dan menetap di Bone, sedangkan orang Arab datang ke Bone dengan misi menyebarkan Agama Islam melalui perdagangan, sementara orang Enrekang datang pada mulanya sebagai pelarian karena di kampung mereka ada peperangan, kemudian mereka beralih menjadi pengurus kuda-kuda raja (lihat peta 5).

Dalam masyarakat kerajaan tradisional terdapat segolongan masyarakat yang status sosialnya dipandang tinggi karena fungsinya atau terutama karena pekerjaannya, yaitu yang disebut golongan elite (Tjandrasmita: 2000: 97). Keberadaan golongan elite dari beberapa komunitas asing tersebut di dalam *lalengbata* membuktikan bahwa *lalengbata* termasuk claster elite. dan kaum elite ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat karena kebanyakan dari mereka terdiri atas pedagang dan perangkat pemerintahan. Hal ini diperjelas Cottomore (1970) yang mengemukakan bahwa dalam masyarakat kerajaan tradisional, baik di kota-kota pusat kerajaan maupun di luar pusat

kerajaan terdapat segolongan masyarakat yang status sosialnya dipandang tinggi karena fungsinya atau terutama karena pekerjaannya (Poesponegoro dkk, 1984: 244). Kaum-kaum elite yang menempati ruang-ruang kota terdiri atas: orang-orang Cina yang kaya dari segi perekonomian, seperti yang diketahui bahwa orang-orang Cina sangat pandai dalam hal perdagangan. Selain orang Cina orang Arab juga pandai dalam hal berdagang dan dalam hal keagamaan, selanjutnya kaum bangsawan keturunan raja menempati jabatan dalam pemerintahan kerajaan dan disebut elite birokrat.

7. 1. 2 Kota Masa Kolonial di Watampone

Masa selanjutnya adalah masa dimana pengaruh budaya Eropa sudah mulai masuk ke dalam wilayah kota kerajaan Bone. Selain itu mereka juga mendirikan sarana dan prasarana, baik yang berupa jaringan jalan serta berbagai fasilitas umum yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat kota. Menurut Peter J.M Nas, kota kolonial merupakan kota yang terdapat di dunia ketiga. Kota-kota ini bukanlah benar-benar merupakan pusat penunjukan modal dan pusat produksi, tetapi merupakan tempat pengumpulan hasil bumi yang kemudian disalurkan ke negeri lain. Kota kolonial juga merupakan pusat distribusi untuk penjualan barang-barang dari negara barat. Hal ini berarti bahwa uang dan barang dikumpulkan di kota dan diangkut menuju ke Eropa. Di negeri jajahan, perdagangan, pengangkutan dan perusahaan pertanian sangat berorientasi ke luar negeri, sedangkan pemerintah berlangsung dari negara yang memanfaatkan kota guna penguasaan daerah jajahan (Nas, 1995 dalam Ilham, 2006: 40). Hal lain juga dikemukakan oleh Djoko Suryo (2004) bahwa kota masa kolonial merupakan representasi dari simbol kolonial itu sendiri, representasi dari pusat pemerintahan dan ekonomi, serta representasi kekuasaan yang diskriminatif. Kota kolonial juga tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pemberlakuan garis warna yakni pemisahan berdasarkan warna kulit, diskriminasi ras yang mencolok serta adanya *segresi* dengan pemisahan pemukiman, pemakaian bahasa, pekerjaan, subordinasi, eksploitasi, dan sebagainya (Suryo, 2004 dalam Ilham, 2006: 23).

Brenda S. A. Yeoh dalam bukunya yang berjudul sejarah kota Singapura juga mengemukakan bahwa kota kolonial merupakan satu entitas terpisah yang memiliki tiga karakteristik yang spesifik dan karakteristik ini juga dimiliki oleh kota Watampone, yaitu: *Pertama*, adanya masyarakat yang sangat beragam. Dalam hal ini kota kolonial betul-betul menjadi tempat yang oleh J.S.Furnival disebut sebagai masyarakat plural. Hal tersebut dijumpai pula di kota Watampone, dimana masyarakatnya juga sangat beragam baik dalam hal keagamaan maupun spesialisasi pekerjaan. *Kedua*, masyarakat kolonial merupakan *pluralitas* yang di dalamnya mengandung sebuah hirarki dengan kelompok ras

tertentu, yang lain di tengah dan yang terbesar yaitu pribumi yang bisa jadi terdiri dari beberapa kelompok etnis yang berbeda. Di Kota Watampone pada masa kolonial terdapat beberapa kelompok etnis yang berbeda diantaranya: Bugis, Tionghoa, dan Arab. Mereka menempati hirarki sosial menengah dan tergolong kaum elite. *Ketiga*, masyarakat kota kolonial merupakan posisi penguasa yang berbeda di puncak hirarki secara terus menerus berada di tangan ras kolonialis kulit putih. Kota kolonial yang pada umumnya berada di bawah penguasaan langsung penguasa kolonial mengalami apa yang disebut oleh Mahmud Mamdani sebagai pemerintahan langsung yang didasarkan kepada ras (*racialized direct rule*) (Yeoh, 1996 dalam Pradadimara, 2005: 255). Hal ini pula yang terjadi di kota Watampone, dimana Belanda memegang penuh sistem pemerintahan yang ada dan merubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan kolonial.

Telah diketahui bahwa motivasi kedatangan kolonial Belanda ke Bone awalnya hanya untuk berdagang, namun setelah melihat sumberdaya yang ada di Bone sangat banyak yaitu hasil-hasil pertanian dan rempah-rempah, maka motivasi dagang itu berubah menjadi ingin menguasai. Setelah Belanda berkuasa penuh di kerajaan Bone dengan mengalahkan kerajaan Bone pada tahun 1905 serta tertangkapnya Raja Bone ke-31 La Pawawoi Karaeng Segeri yang dulu dikenal dengan nama rumpa'na Bone, maka kolonial Belanda mulai menata sistem pemerintahannya di kota Watampone. Pada dasarnya masa pemerintahan kolonial Belanda di Bone terbagi atas dua periode, Periode pertama dari tahun 1905-1926 yang ditandai dengan melemahnya sistem kekuasaan bangsawan. Periode kedua dari tahun 1926-1942 ditandai dengan pulihnya kembali kekuasaan tradisional yang mengakui kembali dewan Ade Pitue dan menempatkan bangsawan Bone di bawah pengawasan kolonial di pusat kekuasaan di Watampone, serta pada tahun 1931 mengangkat kembali Raja Bone ke-32 yaitu La Mappanyukki (Mappangara, 2004).

Dalam penataan sistem pemerintahannya itu, Belanda membangun berbagai sarana dan prasarana, diantaranya bangunan perkantoran, rumah tinggal, bangunan militer, jaringan jalan, tempat peribadatan, dan jembatan. Watampone pada masa pemerintahan Belanda perkembangannya sama dengan kota-kota kolonial yang ada di Indonesia, semuanya diawali dari pembangunan loji-loji (gudang) yang dijadikan sebagai tempat menyimpan barang-barang dagangan yang berupa rempah-rempah.

Belanda datang ke Sulawesi Selatan khususnya di Watampone awalnya bermotivasi ekonomi, namun lama-kelamaan motivasi tersebut berkembang menjadi motivasi politik. Pada awalnya, Belanda menjalin hubungan perdagangan kemudian berkembang menjadi ingin menguasai dengan mendirikan benteng dan sejumlah tangsi-tangsi untuk menunjang aktivitas militer kolonial pada masa itu. Kehadiran bangsa Belanda di Indonesia, khususnya

di Kota Watampone membawa pengaruh yang sangat besar. Ini dapat terlihat dari tinggalan-tinggalan bangunannya yang berbeda dengan bangunan-bangunan milik orang-orang pribumi pada masa itu.

a. Persebaran Infrastruktur Kota

Awal dari perkembangan Kota Watampone pada masa kolonial dapat terlihat dari tumbuhnya bangunan perkantoran dan rumah tinggal dengan tarikh yang berbeda-beda, serta meluasnya jaringan jalannya. Jaringan jalan yang dibuat oleh Belanda memiliki pola yang sudah terencana dengan baik dan sudah terpola. Pada periode pemerintahan kolonial Belanda perkembangan Kota Watampone mengarah ke Selatan dan Utara. Bangunan pertama didirikan pada tahun ±1906 adalah tansi Bone 1 yang sekarang merupakan kantor Korem 141 di Jalan Jenderal Sudirman. Bangunan ini merupakan bangunan pertahanan pertama dan menjadi prioritas utama yang didirikan pemerintah Belanda di kota Watampone, baru pada tahap selanjutnya pemerintah Belanda membangun rumah untuk keperluan tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena pada saat pemerintah Belanda masuk ke Watampone, mereka langsung menempati bangunan-bangunan milik kerajaan Bone yang layak huni. Setelah itu pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah untuk golongan bangsa Belanda dan orang-orang pribumi diantaranya: SD 1 (*Inlandsche School*) yang didirikan pada tahun ±1907 yang berada di Jalan Makmur, SD 2 (*Lahar School*) yang didirikan pada tahun ±1907 yang berada di Jalan MH Tamrin, *Milis School* didirikan pada tahun ±1908 berada di Jalan MH Tamrin, SD 4 (*Volkschool*) didirikan pada tahun ±1908 yang berada di Jalan Kawerang, SD 13 (*Inlandsche School*) yang didirikan pada tahun ±1909 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan SD 5 (*Volkschool*) didirikan pada tahun ±1910 yang berada di Jalan MH Tamrin. Kemudian pada tahun ±1910 pemerintah Belanda membangun jembatan yang berada di jalan Bajoe, jembatan tersebut di buat pemerintah Belanda untuk memudahkan jalur transportasi menuju pelabuhan Bajoe yang merupakan jalur perdagangan antar negara. Kemudian membangun loji (gudang) untuk kepentingan kantor dagang mereka pada tahun 1916 serta mengadakan pembangunan pelabuhan Bajoe, karena pelabuhan Bajoe merupakan tujuan utama Belanda setelah kerajaan Bone jatuh dalam kekuasaannya. Pada fase selanjutnya pemerintah Belanda membuat taman kota pada tahun ±1919 yang menjadi ciri dari kota kolonial.

Perkembangan selanjutnya didasari atas adanya kebutuhan militer pemerintah Belanda yang menyebabkan didirikannya beberapa bangunan perkantoran di sebelah Selatan istana raja Bone, yaitu di Jalan Orde Baru. Di sini terdapat beberapa bangunan yang memiliki arsitektur kolonial yaitu kantor Ajudan Jenderal Korem dan kantor PM yang

dulunya bernama tangsi Bone 2 yang dibangun pada tahun ±1919, di sebelah kanan kantor militer tersebut terdapat dua rumah tinggal yang merupakan tempat tinggal komisaris pemerintah Belanda yang di bangun pada tahun ±1919. Di sebelah Barat taman kota (Jalan Petta Ponggowae) juga terdapat dua tempat tinggal pemerintah Belanda yang juga dibangun pada tahun ±1919. Menurut informan yang penulis wawancarai (H. Andi Youshand), disekitar jalan ini dulu memang merupakan kantor militer. Hal tersebut diperkuat dengan terdapatnya bekas penjara yang berada di sebelah Timur lapangan yang dibangun pada tahun ±1919, namun bekas penjara tersebut sekarang dijadikan tempat tinggal pegawai lembaga pemasyarakatan. Selain bangunan-bangunan militer, pemerintah Belanda juga membangun rumah sakit pada tahun ±1919 untuk kepentingan kesehatan. Pada tahun yang sama pula ada pembangunan beberapa bangunan diantaranya: rumah tinggal yang berada di Jalan Makmur, pabrik tekstil milik Belanda yang berada di Jalan Jenderal Sudirman yang hak pengelolaannya diberikan kepada orang Cina, pabrik penggilingan padi yang berada di Jalan Gunung Jayawijaya, dan di sebelah Timur museum juga terdapat sebuah rumah tinggal yang sekarang disewa oleh pihak perhubungan dan dijadikan kantor perhubungan.

Di sebelah Timur istana raja Bone (Jalan Merdeka) terdapat rumah tinggal yang dibangun pada tahun ±1920 namun kondisi rumah ini tidak berpenghuni dan tidak terawat. Sebelah Selatan istana raja Bone (Jalan Petta Ponggowae) terdapat sebuah gereja yang dibangun pada tahun ±1920, bersamaan dengan kantor Denpal yang awalnya merupakan kantor militer milik pemerintah Belanda yang berada di sebelah Timur. Di Jalan Besse Kajuara yaitu sebelah Selatan Istana terdapat dua bangunan yang dibangun pada tahun ±1920 yang sekarang merupakan kantor Golkar dan SMP 5, namun awalnya bangunan ini dijadikan tempat tinggal oleh orang Cina. Di Jalan Jenderal Sudirman terdapat bangunan PLN yang merupakan distribusi listrik pertama dan sekaligus merupakan pabrik es, bangunan ini didirikan pada tahun ±1920. Selain PLN terdapat pula tempat distribusi air pertama di Kota Watampone yang letaknya di Jalan Ahmad Yani. Tidak jauh dari bangunan PLN ini terdapat sumur yang dibuat pada tahun 1920. Di sebelah Selatan PLN tepatnya di Jalan Gatot Subroto terdapat asrama Bone 3 yang awalnya bernama tangsi Bone 3.

Dua tahun kemudian tepatnya sekitar tahun 1922 pemerintah Belanda kembali mendirikan beberapa bangunan untuk kebutuhan sosial masyarakat kota yaitu bangunan yang berupa: PLN cabang pembantu PLN pusat, bioskop lama yang letaknya di Jalan MH. Tamrin, kantor telkom yang letaknya di sebelah Timur istana, serta bangunan tempat tinggal komisaris pemerintah Belanda. Pada tahun ±1925 Belanda kembali membangun tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo.

Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun ±1932 dilakukan kembali pembangunan berupa tempat tinggal yang masing-masing berada di Jalan Merdeka, Jalan Makmur dan pembangunan perusahaan air yang berada di Jalan Gunung Jayawijaya. Tahun ±1938 kembali dibangun dua bangunan yang berupa tempat tinggal yang berada di Jalan mesjid dan Jalan Makmur, kemudian pada tahun ±1940 juga dibangun dua buah tempat tinggal di Jalan Besse Kajuara dan Jalan Jenderal Sudirman yang berupa tempat tinggal orang Cina (Lihat peta 6).

Selain bangunan-bangunan tersebut, pemerintah kolonial Belanda juga membangun kanal pada tahun 1925. Kanal tersebut oleh sebagian masyarakat Kota Watampone diartikan sebagai batas kota, dan sebagian masyarakat Kota Watampone juga berasumsi bahwa kanal tersebut hanya merupakan sarana penyaluran air. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aliran air kanal yang menyambung ke sungai.

Dari data yang penulis peroleh di lapangan maka diketahui bahwa konsep pembangunan kota yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda di Watampone adalah konsep kota praktis, dimana semua tempat pendirian bangunannya bisa dijangkau dengan berjalan kaki, serta pendirian bangunannya juga berdasarkan fungsinya masing-masing.

Selain itu, dari data di atas penulis juga berasumsi bahwa pusat kota kolonial di Watampone ini berada disekitar lapangan karena disebabkan banyaknya temuan-temuan bangunan yang diantaranya berfungsi sebagai kantor militer, penjara, sarana peribadatan dan tempat tinggal.

Banyaknya sarana umum yang dibangun pada periode ini membuktikan bahwa periode ini sudah mengalami perkembangan dan peningkatan baik dari sistem pemerintahannya maupun fasilitas kotanya, dari kota tradisional menuju kota modern.

Selain sarana umum, pembangunan berbagai sarana keamanan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Jadi tidak salah kiranya apabila sistem pemerintahan pada periode kolonial ini menjadikan faktor keamanan yang semakin hari semakin meningkat adalah alasan utama pemerintah Belanda untuk membangun berbagai sarana pertahanan di setiap tempat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya pemusatan bangunan perkantoran militer dan tangsi-tangsi Belanda di sekitar lapangan merdeka.

Hal lain juga memperlihatkan perhatian yang ditanamkan pemerintah Belanda pada sistem pendidikan awalnya terpusat di pulau Jawa, sedangkan daerah yang berada di luar Pulau Jawa kurang mendapat perhatian. Sekitar tahun 1904 pemerintah Belanda mulai memperhatikan sistem pendidikan di Sulawesi Selatan dengan didirikannya beberapa sekolah Melayu di Makassar. Sedangkan pada tahun 1907 Pemerintah Belanda Gubernur Jenderal Van Heutz juga sudah mengeluarkan surat keputusan pengembangan pendidikan

bagi penduduk pedesaan di kota Watampone, dengan didirikannya *Volkschool* atau sekolah desa (Sumartini, 1998: 36-37).

Pembangunan beberapa sarana pendidikan pada masa kolonial di Indonesia tidak serta merta dilakukan, semua didasari dengan adanya keinginan pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan dan pengajaran sebagai upaya balas budi kepada bangsa yang telah lama mengabdikan, serta memberikan pendidikan dan pengajaran yang lebih layak bagi bangsa Indonesia yang telah lama terjajah, salah satunya di kota Watampone.

Hal tersebut sudah dibuktikan dengan didirikannya beberapa sekolah-sekolah diantaranya: sekolah rakyat dan sekolah Melayu. Meskipun tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama, dikarenakan adanya perbedaan golongan antara golongan bawahan, golongan atas, dan golongan bangsa Belanda. Berdasarkan pemaparan di atas, maka diketahui bahwa pada awal periode ini pemerintah Belanda juga menaruh perhatian terhadap pendidikan di kota Watampone.

Pembangunan lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah pembangunan berbagai sarana keagamaan yang berupa gereja dan kelenteng yang membuktikan bahwa pada periode ini faktor keagamaan tetap menjadi perhatian pemerintah Belanda. Pembangunan sarana industri nampaknya juga dilakukan guna pemenuhan kebutuhan akan bahan makanan dan bahan pakaian. Hal ini terkait dengan meningkatnya populasi penduduk sehingga kebutuhan-kebutuhan akan bahan makanan dan pakaian juga semakin meningkat sedangkan desa sebagai penghasil kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah tidak dapat memenuhinya. Hal ini lebih diperjelas dengan yang dikemukakan oleh Pamudji (1985) bahwa kota tidak hanya merupakan pemusatan pemukiman penduduk, kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan administrasi saja, tetapi kota juga merupakan pusat-pusat penyediaan fasilitas industri, perdagangan, dan skill (Pamudji, 1985: 6).

b. Pemukiman Orang Jawa

Selain komponen-komponen kota yang telah disebutkan di atas, pada masa pemerintahan Belanda juga terdapat satu buah pemukiman orang Jawa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, orang-orang Jawa datang ke Bone selain karena berlatar belakang transmigrasi besar-besaran, juga sebagian mereka bertindak sebagai serdadu Belanda.

7. 1. 3 Kondisi Kota Pasca Kolonial

Masa pasca kolonial terjadi perubahan kendali pemerintahan di Kota Watampone dari kolonial Belanda ke kekuasaan Raja Bone ke-32, yaitu La Mappanyukki. Sistem pemerintahan

Kota Watampone pada saat itu berpadu dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Artinya pada masa tersebut, sistem pemerintahan yang ada di Watampone dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda dan Raja Bone ke-32 La Mappanyukki namun sistem pemerintahannya tetap dibawah oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dalam masa pasca kolonial, tidak ada perkembangan kota yang berarti. Pada periode pemerintahan Raja La Mappanyukki tersebut hanya ada dua penambahan komponen bangunan kota, yaitu mesjid dan sekolah. Pembangunan mesjid megah tersebut dilakukan oleh Raja Bone ke-32 pada tahun 1938 yang berada di dalam *lalengbata* (Jalan Mesjid). Begitu pula dengan pembangunan sekolah bercorak Islam yang diberi nama *Amir Islam School* yang berada di sebelah Timur *lalengbata* tepatnya di Jalan Sungai Kapuas. Kedua bangunan ini masih dapat kita jumpai di Kota Watampone dan masih memiliki fungsi yang sama. Mesjid raya Watampone sebagai sarana peribadatan yang digunakan oleh masyarakat Kota Watampone dan *Amir Islam School* juga masih difungsikan sebagai sarana pendidikan. Bangunan-bangunan ini didirikan untuk menandakan bahwa Raja La Mappanyukki ini merupakan Raja Bone yang taat pada ajaran Islam dan sekaligus menjadi Raja Bone pertama yang menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu naik haji. Keberadaan kedua bangunan tersebut itu pula menandakan bahwa Islam sudah sangat tersebar di Kota Watampone. Periode pemerintahan Raja La Mappanyukki ini juga ditandai dengan kekalahan tentara Belanda melawan tentara Jepang dan sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan kolonial Belanda di kota Watampone. Setelah kekalahan tentara Belanda, tentara Jepang kemudian akhirnya menduduki kota Watampone. Keberadaan Jepang di Kota Watampone tidak berlangsung lama, ini disebabkan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat tanah Bone yang kemudian mengalahkan tentara Jepang. Setelah kekalahan tentara Jepang tersebut, kemudian disusul dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

7. 2 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Pola Ruang Kota

Setiap periode pemerintahan yang pernah ada di Watampone memiliki ruang-ruang kota yang merupakan tempat masyarakat bermukim dan melakukan aktivitas berdasarkan stratifikasi dan golongannya masing-masing. Ruang aktivitas yang dimaksud di sini adalah pemukiman, kantor militer dan pemerintahan, pusat perekonomian dan perdagangan, serta religi. Adanya perubahan setiap periode pemerintahan di Kota Watampone menyebabkan pula terjadinya perubahan pola ruang kota Watampone.

Terbentuknya pola ruang kota berdasarkan adanya pemisahan-pemisahan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa yang ada di Watampone. Hal tersebut menandakan

bahwa stratifikasi sosial yang ada di Watampone menempatkan kaum bangsawan pada tingkat paling atas dan masyarakat biasa (*ata*) berada pada tingkat paling bawah. Lain halnya dengan masyarakat pendatang yang tidak termasuk dalam stratifikasi sosial masyarakat Bone, mereka menempati ruang kota yang juga berbeda dari masyarakat Bone, hal tersebut didasarkan atas adanya aktivitas yang berbeda antara masyarakat Bone dengan masyarakat pendatang. Terkait dengan hal yang telah dijelaskan sebelumnya, telah terlihat bagaimana Bone yang awalnya sebuah kota kerajaan yang kemudian berkembang menjadi kota kolonial. Perkembangan kota yang terjadi di Watampone tersebut menyebabkan pola ruang kotanya semakin banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan pola ruang Kota Watampone tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

1. Kolonialisasi

Hal ini terkait dengan kedatangan Belanda di Kota Watampone dengan mengalahkan kerajaan Bone, maka terjadilah percampuran antara pola-pola kota lama yang dianut oleh kerajaan Bone dan pola-pola kota praktis yang dianut oleh pemerintah Belanda. Masuknya budaya Eropa tersebut kota Watampone, mempengaruhi pola ruang serta komponen-komponen kota Watampone.

2. Kebutuhan-kebutuhan baru masyarakat pendatang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Kota Watampone terdapat beberapa komunitas-komunitas masyarakat pendatang yang menempati beberapa ruang-ruang kota yang ada di Watampone. Kehadiran komunitas-komunitas tersebut menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang semakin kompleks akan sarana dan prasarana kota yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya: tempat tinggal, taman kota, perkantoran, dan tempat ibadah.

3. Kebutuhan akan sarana keagamaan

Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan hal yang harus ada pada setiap perkembangan suatu kota, karena ini merupakan salah satu bukti dari adanya perkembangan agama yang masuk dalam satu wilayah dari masa ke masa. Dengan masuknya anasir-anasir agama menyebabkan pertambahan komponen-komponen kota, seperti misalnya ketika agama Islam masuk di watampone ditandai dengan pendirian sebuah mesjid dan merupakan simbol penerimaan Islam. Begitu pula dengan pendirian gereja dan klenteng.

4. Peningkatan populasi

Populasi penduduk semakin hari akan semakin meningkat, hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas-aktivitas tertentu yang menyebabkan orang-orang akan selalu berdatangan. Seperti aktivitas pemerintahan, perdagangan, industri dan pendidikan. Selain itu peningkatan populasi penduduk juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan penduduk dan hal tersebut mengharuskan daerah yang mereka tempati tersebut memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang memadai.

5. Kebutuhan keamanan

Hal ini terkait dengan pengaruh tingkat keamanan yang semakin hari semakin meningkat dan menjadi alasan pemerintah Belanda untuk mendirikan berbagai bangunan pertahanan seperti kantor militer, tangsi-tangsi Belanda serta penjara. Pendirian bangunan-bangunan pertahanan tersebut terpusat di dalam *lalengbata*, terpusatnya bangunan pertahanan ini disebabkan karena terpusatnya pula berbagai fasilitas kota dalam satu kawasan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan sarana pertahanan semakin meningkat maka pada fase selanjutnya dibangun kembali bangunan pertahanan yang terletak di sebelah Selatan *lalengbata*.

8. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan 21 bangunan kerajaan dan 45 bangunan kolonial. Yang kesemuanya terdiri atas bangunan tempat tinggal, bangunan militer, kantor pemerintah, sarana peribadatan, sarana umum, sekolah, lapangan, taman, dan kompleks makam.

Fase pertama, yaitu masa prakolonial (kerajaan). Ditandai dengan dibangunnya sejumlah komponen kota untuk kepentingan kerajaan, seperti: istana raja, lapangan prajurit, tempat pelantikan, sumur kerajaan, pasar, mesjid, dan sejumlah kompleks makam. Fase kedua, yaitu masa kolonial di kota Watampone. Masa ini ditandai dengan pendirian sejumlah bangunan komponen kota yang memiliki corak yang berbeda dengan bangunan lokal yang ada di kota Watampone. Komponen-komponen kota tersebut meliputi: bangunan sarana umum seperti: taman kota, bioskop, rumah sakit, jembatan dan sumur. Pendirian bangunan sarana pendidikan, sarana keagamaan seperti: gereja dan klenteng. Pendirian sejumlah sarana industri, sarana pertahanan keamanan seperti: tangsi-tangsi militer dan kantor militer. Selain itu pemerintah Belanda juga mendirikan kantor untuk kepentingan

umum seperti: kantor dagang, kantor telepon, perusahaan air, dan perusahaan MPS. Selain mendirikan rumah-rumah tinggal, pemerintah Belanda juga mendirikan sejumlah *pesanggrahan*.

Fase ketiga, adalah masa ketika pulihnya kembali sistem pemerintahan kerajaan di Watampone dengan bertahtanya kembali La Mappanyukki sebagai Raja Bone ke-32. Fase ini ditandai dengan pendirian bangunan yang bercorak Islam, seperti: mesjid dan sekolah Islam (*madrasah*).

Perkembangan Kota Watampone yang berkaitan dengan keberadaan komponen-komponen kotanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pola tata ruang kotanya dari masa ke masa mengalami perkembangan dan perubahan. Masuknya kolonialisme ke Nusantara ikut memberi warna baru terhadap wajah perkotaan di Indonesia, termasuk di Watampone. Budaya yang dibawa bangsa Belanda telah mempengaruhi perkembangan fisik kota di Watampone. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan bangunan-bangunan kolonial di Kota Watampone yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda.

Daftar Pustaka

Adrisijanti, Inajati.

2000 Arkeologi Perkotaan Mataram Islam. Penerbit jendela. Yogyakarta.

Amin, Muhammad.

1993 Bone Menentang Ekspedisi Belanda Tahun 1859. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah dan Arkeologi Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar.

Asnidar

2000 Sistem Pemerintahan Bone Pada Periode Pemerintahan Belanda tahun 1905-1942. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah dan Arkeologi Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar.

Ali, Muhammad.

1969 *Selayang Pandang Bone*. Percetakan Damai. Watampone.

Bagus, Gede A.A.

1999 "Tata Ruang Pemukiman Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem dan Desa Pegayaman-Buleleng" dalam, *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII*. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Yogyakarta.

Bintarto, H.R.

1995 "Keterkaitan Manusia, Ruang dan Kebudayaan", *Berkala Arkeologi*, Edisi Khusus. Jakarta.

Deetz, James.

1976 *"Invitation to Archaeology"*. London: Canbridge University Press.

Darmaputra, Nick, Dr.

1996 "Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Budha di Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi Ruang Skala Makro" dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII edisi 2*: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta.

Daldjoeni N. Drs.

1998 *Geografi Kota dan Desa*. Penerbit Alumni. Bandung.



Fagan, Brian M.

1985 *In The Beginning : An introduction to Archaeology*. Toronto: Little, Brown and Company.

Gill, Ronald.

1997 "Dutch Colonial Settlement and Towns in Java, *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Goede, Drs, J.H. de.

1986 *Urbanisasi dan Urbanisme, Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. PT.Gramedia. Jakarta.

Hariyono Paulus, M.T. Drs.

2007 *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Bumi Aksara. Jakarta.

Ilham

2006 Kota (dan) Agama: Dinamika Keagamaan Dan Penggunaan Ruang di Kota Manado, 1919-1972. *Tesis*. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Pascasarjana Sastra Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Koentjaraningrat

1980 *Sejarah Teori Antropologi I*. UI Press. Jakarta.

Mansyur, Saharuddin.

2002 Kota Makassar akhir abad XVII hingga awal abad XX. *Skripsi*. Jurusan arkeologi Fakultas sastra Universitas Hasanuddin. Makassar.

Marbun, SH, B.N.

1988 *Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mahmud, Irfan.

2003 *Kota Kuno Palopo, Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi*. Masagena Press. Makassar.

Mappangara, Suriadi

2004 *Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi-Selatan Abad 19*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi-Selatan. Makassar.

Mundardjito.

1990 "Metode Penelitian Pemukiman Arkeologis". *Monumen* No. 11 Edisi Khusus. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta.

2002 *Pertimbangan Ekologis, Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di Daerah Yogyakarta*, Jakarta: Wedatama-Widya sastra.

Musliha

1998 "Perkembangan Kota Watampone 1961-1991 (Suatu Kajian Sejarah Kota)". *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah dan Arkeologi Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar.

Novita, aryadini.

1999 "Pola Pemukiman Kota Batavia Abad XVII-XVIII", *Berkala Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta* No 5/Maret/1999. Yogyakarta.

Nur, Nuraeni.

1998 *Sejarah Perkembangan Kantor Pos di Watampone*. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar.

Nurhadi

1992 "Arkeologi Kota", *Pokok-pokok Metode Arkeologi*. Ujung Pandang: Ikatan Mahasiswa Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Patunru, Abdurrazak,

1995 *Sejarah Bone*. Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Pradadimara, Dias.

2005 "Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah Makassar" dalam *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Ombak. Yogyakarta.

Sumantri, Iwan.

2004 "Penerapan Kajian Pola Pemukiman Gua Prasejarah di Sulawesi Selatan Study Kasus Di Biraeng" dalam *kepingan mozaik sejarah budaya Sulawesi Selatan*. Ininnawa. Makassar.

Sumartini, Helmi.

1998 Perkembangan Pendidikan di Daerah Bone (1905-1960). *Skripsi*. Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin. Makassar.

Subroto, Ph

1983 *Study Tentang Pola Pemukiman Arkelogi dan Kemungkinan-kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Proyek Penelitian Purbakala. Jakarta.

S. Pamudji

1985 *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.

Tjandrasasmita, Uka. H.

1999 *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari abad XIII sampai XVIII Masehi*. Penerbit Menara Kudus. Kudus.

Pascaprosesual/Pascamodernisme; Sebuah Kilas Balik Perdebatan Lama

Muh. Ihsan D.

/I/

Tulisan ini hendak menjelaskan kepada khalayak ihwal dampak perkembangan alam pikir pascamodernisme terhadap disiplin ilmu arkeologi dan bagaimana pro-kontra yang berkembang dikalangan arkeolog atas infiltrasi kritik pascamodern dalam arkeologi. Tentunya, tulisan ini tidak perlu berlama-lama dengan menjelaskan posisi arkeologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang juga mengalami dampak perkembangan pascamodernisme. Kepada pembaca yang sampai saat ini tidak mengetahui apa itu arkeologi dan posisinya dalam percabangan ilmu pengetahuan, dengan meminjam kata-kata Shanks, “lebih baik berhenti membaca tulisan ini dan mengambil kesimpulan bahwa yang akan dibahas selanjutnya adalah hal yang kontroversial” (2009: 133).

Uraian tentang dampaknya dalam pemikiran arkeologi adalah sebuah konsekuensi dari kenyataan bahwa pemikiran arkeologi tidak berkembang dalam ruang yang vakum (Johnson 2000: 167). Pemikiran dalam arkeologi berkembang di tengah-tengah arus pemikiran intelektual dalam ilmu-ilmu humaniora pada khususnya dan konteks sosio politik dalam masyarakat pada umumnya. Dalam pada itu, istilah pascamodern telah umum digunakan selama kurang lebih empat dekade, dan pada tahun 1980-an, mulai menjadi topik pembicaraan yang hangat didiskusikan di berbagai media (Ward, 2010:1). Oleh karena itu, tentunya menarik untuk mencoba melihat pengaruh pascamodernisme dalam pemikiran arkeologi karena pada tahun 1980-an, arkeologi tengah mengalami semacam—jika dilihat dari perspektif revolusi ilmu pengetahuan ala Kuhn—periode ‘anomali’.

Guna menguraikan implikasi pascamodernisme dalam arkeologi, tulisan ini akan menguraikan terlebih dahulu sejarah perkembangan pemikiran arkeologi hingga pada

titik di mana arkeologi mesti berhadapan dengan kritik pascamodern. Selanjutnya, akan diuraikan latar belakang perkembangan dan beberapa ide penting pascamodernisme yang relevan dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu-ilmu humaniora. Dari uraian tersebut, kita akan mencoba melihat bagaimana pemikiran pascamodernisme mempengaruhi perkembangan pemikiran arkeologi. Dalam tulisan ini, kritik pascamodernisme dibatasi dalam cakupannya sebagai sebuah kritik terhadap ilmu pengetahuan, bukan dalam pengertiannya yang begitu luas dan radikal yang menjangkau hampir semua sendi kehidupan.

/II/

Karena sidang pembaca yang belum mengetahui apa arkeologi dan di mana posisi arkeologi dalam percabangan ilmu pengetahuan masih terus membaca, untuk membantu mereka, maka akan dijelaskan sekelumit tentang arkeologi. Bagi pembaca yang telah mengerti dengan baik arkeologi, dipersilahkan untuk mengabaikan bagian ini.

Secara terminologis, arkeologi berakar dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu: *arkhaios* dan *logos*. *Arkhaios* berarti kuna, tua, atau yang lampau. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Jadi, secara sederhana kita memahami arkeologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang masa lampau. Membedakan diri dengan sejarah, arkeologi merekonstruksi masa lampau lewat pembacaan terhadap kebudayaan materi (artefak) yang tersisa. Masa lampau pun ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para arkeolog. Ada yang membatasi masa lampau pada masa ketika belum ditemukan tulisan, atau dengan kata lain masa prasejarah. Ada pula yang menerjemahkan masa lampau sebagai masa yang baru saja lewat. Mengadaptasi pendapat Dark (1995), pada saat tulisan ini sedang dibaca oleh sidang pembaca yang budiman, maka makalah ini pun telah menjadiinggalan arkeologi. Schiffer (1976) kemudian mendefinisikan arkeologi sebagai "disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan kebudayaan materi dalam ruang dan waktu apapun". Berangkat dari uraian tersebut, maka arkeologi bisa berkembang menjadi kajian tentang kebudayaan materi yang berasal dari ruang-waktu apapun sehingga arkeologi semakin sulit menentukan batas-batas kajiannya dalam dunia ilmu-ilmu humaniora. Hal tersebut senada dengan pendapat Magetsari (2003) yang menyatakan bahwa "kajian terhadap kebudayaan materi bisa mencairkan batas-batas disiplin ilmu".

Kebudayaan materi atau artefak dalam arkeologi bisa dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu: ideofak, sosiofak, teknofak, dan fitur. Ideofak adalah artefak yang merepresentasikan ideologi angkatan kelompok masyarakat tertentu. Sosiofak mencerminkan aspek sosial yang ada dalam sebuah masyarakat. Adapun aspek teknologis

dalam sebuah masyarakat tercermin dari temuan teknofaknya. Sedangkan fitur (feature) adalah kebudayaan materi yang sifatnya statis dan melekat dengan konteksnya, misalnya, bentang alam hasil rekayasa manusia. Demikianlah tinjauan ontologis arkeologi.

Pada tataran epistemologis, arkeologi menemukan signifikansinya sebagai disiplin ilmu pada penerapan metode ekskavasi. Metode ekskavasi atau penggalian merupakan metode pemerolehan data berupa tinggalan aktivitas manusia yang terdeposit dalam tanah. Metode ini tidak ditemukan pada disiplin ilmu lainnya meskipun sama-sama berada dalam lingkup masa lampau seperti sejarah, maupun kajian tentang manusia seperti antropologi dan sosiologi. Meskipun signifikan, ekskavasi tidak senantiasa dilakukan dalam penelitian arkeologi. Hal tersebut amat bergantung dengan tema, lokasi, dan kemampuan arkeolog (baca: kecukupan dana) dalam melaksanakan penelitian. Ada banyak pilihan metode lain yang bisa diterapkan dan menjamin perolehan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian.

Kehadiran arkeologi setidaknya menghilangkan ketakutan bahwa ketika kita memandang kemasa lalu, yang ditemukan adalah hamparan ruang kosong yang tidak bisa membantu dalam menjelaskan siapa kita. Arkeologi setidaknya telah menyediakan hamparan pengetahuan/interpretasi tentang masa lalu manusia, tidak hanya yang tertulis, tapi sampai kepada masa ketika manusia memanfaatkan batu sebagai pisau untuk menguliti binatang hasil buruan. Hamparan pengetahuan/interpretasi tentang masa lalu tersebut bisa menjadi cermin dalam memahami siapa kita dan membantu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Secara spesifik, arkeologi menetapkan tujuannya sebagaimana uraian Lewis R. Binford, yaitu: 1) rekonstruksi sejarah budaya, 2) rekonstruksi cara-cara hidup, 3) penggambaran proses budaya (1972: 104).

Dalam percabangan ilmu pengetahuan, arkeologi ditempatkan dalam kelompok ilmu-ilmu humaniora atau ilmu budaya (*kultuurwetenschap*). Dalam rumpun ilmu budaya, kajian terhadap masa lalu membuatnya bisa dilekatkan sebagai bagian dari sejarah seperti yang berkembang dalam tradisi Eropa kontinental. Arkeologi karena perhatiannya terhadap kebudayaan, juga seringkali dianggap sebagai 'anak tiri' antropologi (Hudson 1984: 33). Namun, dalam perkembangannya, kompetensi dalam membaca kebudayaan materi bisa mempengaruhi disiplin ilmu lain untuk mencoba menengok kebudayaan materi sebagai salah satu sumber yang terpercaya dalam upaya menjawab permasalahan penelitiannya. Pengaruh arkeologi tersebut dipandang sebagai akar bagi lahirnya Kajian Kebudayaan Materi (*Material Culture Studies*) sebagai sebuah bidang kajian multidisipliner

(*multidisciplinary studies*) (periksa Woodward 2007: 3). Lebih dari itu, arkeologi mampu menunjukkan kelebihan yang tidak dimiliki bidang ilmu lain, seperti: perumusan teori kebudayaan materi, mengamati perubahan struktural jangka panjang, peran masa lalu terhadap pembentukan identitas masyarakat modern, karakter spasial dan temporal relasi sosial, dan seterusnya (Thomas dan Tilley 1992: 107).

/III/

Dalam kacamata David L. Clarke sebagaimana diuraikan oleh Trigger (2006), arkeologi telah melewati dua fase perkembangan. Fase pertama adalah fase sebelum tahun 1960-an dan fase kedua adalah fase setelah tahun 1960-an. Meskipun pendapat Clarke adalah periodisasi yang kurang begitu kuat karena tidak mengakomodasi perkembangan kontemporer dalam pemikiran arkeologi¹. Namun, periodisasi tersebut digunakan di sini sebagai kerangka untuk menyederhanakan uraian perkembangan pemikiran arkeologi sebelum dampak perkembangan pemikiran pascamodernisme mulai terasa dalam arkeologi.

Beberapa orang yang menulis tentang sejarah perkembangan arkeologi menekankan bahwa periode sebelum tahun 1960-an adalah masa “tidur panjang” pemikiran arkeologi, karena jarang ada diskusi yang secara eksplisit membahas tentang teori (baca Johnson 2000: 15). Fase sebelum tahun 1960-an juga disebut sebagai fase sejarah budaya. Webster (2009: 11) merangkum beberapa istilah yang umum digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan fase sejarah budaya, antara lain: sebagai sebuah periode atau tahapan dalam arkeologi evolusi (Wiley dan Sablof 1980), gerakan pemikiran, kecenderungan interpretasi (Trigger 1989), perspektif (Preucell dan Hodder 1996), atau sebagai sebuah bentuk adaptasi intelektual terhadap kondisi sosiopolitik tertentu (Trigger 1989, 1978; Patterson 1986).

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, beberapa konsep dasar yang berpengaruh dan mewarnai perkembangan ilmu arkeologi hingga dewasa ini, diletakkan dan dimatangkan dalam fase sejarah budaya (Webster 2009: 20). Beberapa prinsip analitis dasar warisan sejarah budaya, seperti: gaya, popularitas, dan stratigrafi (Gamble 2008: 59) masih tetap diajarkan kepada calon-calon arkeolog baru sebagai sebuah pengetahuan fundamental dalam arkeologi. Selain itu, unit-unit klasifikasi artefak—atribut, artefak, himpunan artefak, budaya—adalah sistem klasifikasi yang bersandar pada metafisika esensial yang merupakan bagian dari asumsi dasar pendekatan sejarah budaya (Webster 2009: 20), masih digunakan sampai sekarang meskipun telah mengalami beberapa pengembangan. Trigger (1989:205) berkesimpulan bahwa sejarah budaya masih merupakan pendekatan penelitian

1 Pembahasan yang lebih ekstensif tentang perkembangan pemikiran arkeologi dapat dibaca dalam edisi kedua buku *The History of Archaeological Thought* karangan Bruce G. Trigger (2006). Dalam buku tersebut, Trigger membagi tahapan perkembangan pemikiran arkeologi kedalam tujuh tahapan yaitu: 1) Arkeologi Klasik, 2) Antiquarianisme, 3) Arkeologi Prasejarah Awal, 4) Arkeologi Evolusioner, 5) Arkeologi Sejarah Budaya, 6) Arkeologi Fungsional-Prosesual Awal, 7) Arkeologi Postprosesual.

arkeologi yang relevan dan menarik di negara-negara atau wilayah yang baru lepas dari masa kolonial, yang membutuhkan pengetahuan tentang akar-akar kebudayaan mereka. Dengan beberapa pemutakhiran metode, pendekatan sejarah budaya amat membantu dalam perumusan identitas dan kesatuan bangsa.

Dibalik manfaat tersebut, ada beberapa kelemahan mendasar terkait pendekatan sejarah budaya. Arkeologi sebelum tahun 1960 diidentifikasi sebagai masa ketika arkeologi masih terkungkung dalam tradisi penelitian yang berbeda-beda. Para arkeolog masih mengalami ilusi, kebanyakan menjalankan penelitian menurut standar yang ditetapkan sendiri, baik itu bentuk deskripsi, interpretasi, dan penjelasannya. Fase ini ditandai dengan penerapan penalaran induktif-eksploitatif, yaitu upaya merumuskan kesimpulan penelitian secara eksploitatif dengan mengobservasi dan mengumpulkan sebanyak mungkin data tanpa menggunakan asumsi teoritis.

Bertolak dari kelemahan-kelemahan tersebut, pada tahun 1960-an, beberapa arkeolog mulai bereaksi dan mencetuskan sebuah gerakan pembaruan. Gerakan tersebut menggunakan jargon besar '*armisthemotescientific and nonanthropological*' (Johnson 2000: 20). Gerakan tersebut dipicu oleh Lewis R. Binford lewat artikelnya yang berjudul '*Archaeology in Anthropology*' tahun 1962, dan lalu dibahas secara ekstensif dalam bunga rampainya yang terbit tahun 1967 bertajuk '*A New Perspective in Archaeology*' (Watson 2009: 29). Dalam buku tersebut, Binford mengajak para arkeolog untuk menegaskan status disipliner arkeologi dengan penggunaan metode ilmiah sebagaimana yang berkembang dalam ilmu-ilmu alam. Penerapan pada model penalaran *hipotetico-deductive-nomological* untuk menjelaskan proses budaya di masa lalu membuat fase perkembangan ini disebut fase arkeologi *prosesual*.

Antusiasme terhadap apa yang dicanangkan oleh Binford membuat beberapa ahli menganggap pemikiran Binford sebagai pemikiran yang menandai terjadinya 'pergeseran paradigma' dalam arkeologi. Disebut demikian karena pemikiran tersebut menandai sebuah keputusan yang radikal dengan pendekatan dan metodologi yang diterapkan dalam fase arkeologi sejarah budaya (periksa Peurcel 2006: 95). Beberapa teori yang sebelumnya umum digunakan dalam antropologi, seperti teori sistem, teori-teori ekologi, teori-teori evolusi budaya, digunakan pula sebagai kerangka penyusunan hipotesa dalam penelitian arkeologi. Lebih lanjut, untuk menangani dan menjelaskan temuan-temuan arkeologis, arkeolog mulai memperkenalkan dan menerapkan pendekatan kuantitatif — utamanya statistik — dan pendekatan spasial yang banyak dirangkul dari geografi.

Dibawah bendera paradigma prosesual, arkeologi semakin memantapkan kedekatannya dengan antropologi dalam upayanya merekonstruksi kehidupan sosial dan proses budaya masyarakat masa lampau. Konsepsi tentang masyarakat dalam pandangan arkeologi prosesual dapat dirangkul sebagai berikut:

- Masyarakat pada dasarnya terdiri dari seperangkat tingkah laku yang berpola;
- Kebudayaan materi dan tinggalan kebudayaan materi merupakan cerminan dari pola tingkah laku yang ada dalam masyarakat atau merupakan hasil dari adaptasi lingkungan sehingga bisa dipelajari secara ilmiah;
- Masyarakat adalah cerminan adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial dan alam;
- Karenaitu, menjelaskan proses sosial berarti fokus pada pranata-pranata dalam masyarakat yang berhubungan erat dengan adaptasi lingkungan: sumber daya, subsistensi, strategi ekonomi, pertukaran dan perdagangan, dan teknologi;
- Ketertarikan yang besar terhadap generalisasi lintas budaya (*cross-cultural generalisation*) sebagaimana yang nampak dalam klasifikasi masyarakat dan skema evolusi budaya (Shanks dan Hodder 1997: 4)

Arkeologi prosesual juga telah berhasil memicu lahirnya beragam subdisiplin baru dalam arkeologi. Beberapa di antaranya, seperti: paleoetnobotani, bioarkeologi, arkeogenetik, arkeoastronomi, geoarkeologi, dan arkeologi ruang. Dalam sub-sub kajian tersebut, metode-metode dari ilmu-ilmu alam digunakan dalam membangun inferensi terkait rekonstruksi kebudayaan dimasa lampau dan menjelaskan proses-proses perubahan budaya. Pada beberapa universitas di luar negeri seperti Inggris dan Australia, kedekatan arkeologi dengan ilmu-ilmu alam membuat arkeologi ditempatkan dalam fakultas yang sama dengan ilmu-ilmu alam lainnya.

Perkembangan yang memantapkan kematangan dan memapankan paradigma prosesual sebagai paradigma utama yang belum tergantikan terus berlangsung. Hingga kemudian, pada awal tahun 1980-an, kemapanan tersebut mesti berhadapan dengan gelombang kritik dari arkeolog muda yang pemikirannya sedikit banyak beririsan dengan alam pikir pascamodernisme. Gelombang kritik tersebut, karena ketidakpuasannya terhadap paradigma prosesual, seringkali dinamai aliran pascaprosesual². Sebagai bekal awal untuk memahami peririsan tersebut, uraian pada bagian berikutnya berisi selang pandang pascamodernisme dan beberapa pokok-pokok pikiran yang berkembang di dalamnya.

2 Beberapa penulis (di antaranya: Hodder 1991; Thomas dan Tilley 1992; Tilley 1993; Johnson 2000; Hodder dan Hutson 2003; Thomas 2010; Shanks 2009) kurang sependapat dengan penggunaan istilah tersebut. Mereka menawarkan istilah lain seperti Arkeologi Kontekstual atau Arkeologi Interpretatif sebagai istilah yang lebih adekuat untuk menggambarkan penekanan kritik mereka pada pentingnya konteks dan interpretasi dalam penelitian arkeologi. Dalam tulisan ini, penulis tetap menggunakan istilah pascaprosesual semata karena istilah tersebut lebih familiar digunakan dalam tulisan-tulisan yang membahas tentang pergesekan 'antar-paradigma' dalam arkeologi.

/IV/

Philip Smith (2001:214) mengajukan beberapa definisi dasar yang cukup membantu untuk memahami pascamodernisme. Menurut Smith, pascamodernisme itu sendiri setidaknya memiliki dua dimensi, *pertama*, merujuk pada sebuah gaya estetika dan artistik yang menolak semua aturan-aturan estetika dan artistik modern; *kedua*, merujuk pada sebuah posisi teoritik dan filosofis yang lahir dari pascastrukturalisme. *Pascamodernitas* merujuk pada sebuah tahap perkembangan sosial yang dianggap telah melampaui kondisi modernitas. *Pascamodernisasi* merujuk pada proses perubahan sosial yang menggerakkan transisi dari modernitas ke pascamodernitas. Lebih lanjut, Norman K. Denzin (2005:581-2) menyatakan bahwa istilah pascamodern dan pascamodernisme adalah istilah yang merujuk pada empat kondisi sekaligus. *Pertama*, istilah tersebut menggambarkan rentetan momen historis yang terjadi sejak Perang Dunia II hingga sekarang. *Kedua*, pascamodern merujuk pada wujud multinasional dari kapitalisme-lanjut yang telah memperkenalkan logika kultural baru dan bentuk representasi dan komunikasi baru ke dalam sistem kultural dan ekonomi dunia. *Ketiga*, menggambarkan sebuah 'gerakan dalam seni visual, arsitektur, sinema, musik populer, dan teori sosial yang bergerak melawan formasi-formasi modernis dan realis klasik. *Keempat*, istilah tersebut merujuk pada sebuah bentuk penulisan dan teorisasi dunia sosial yang antifondasional, pascapositivis, interpretif, dan kritis. Kita akan membatasi definisi pascamodernisme sebagai dimensi kedua dalam pandangan Smith, dan dimensi keempat dalam pandangan Denzin.

Sebagai sebuah perkembangan filosofis, pascamodernisme lebih tepat digambarkan sebagai sebuah bentuk skeptisisme yang berakar sampai ke tradisi filsafat Yunani klasik (Sim 2005). Friedrich Nietzsche tercatat sebagai salah satu figur yang kembali mendengungkan corak pemikiran tersebut pada awal abad ke-20. Nietzsche mengajak untuk 'merevaluasi semuanilai' (Sim 2005) melalui pemikirannya yang sering dilabeli nihilistik. Pascamodernisme mulai ramai dibicarakan setelah François Lyotard menyampaikan pidatonya yang berjudul '*The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*' pada tahun 1984 atas permintaan Dewan Universitas Quebec Kanada³. Fokus pidato tersebut adalah menjelaskan tentang perubahan-perubahan drastis yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akhir abad XX ini. Pemikiran dan pengamatan Lyotard tentang perubahan kebudayaan dari modern ke pascamodern menimbulkan implikasi penting bagi pemahaman tentang ilmu pengetahuan (Lubis 2011: 135; periksa pula Sim 2005: 3).

³ Pidato tersebut berangkat dari buku karangan Lyotard yang berjudul *The Postmodern Condition*, terbit pada tahun 1979 dalam bahasa perancis dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris pada tahun 1984 (periksa O'Donnel 2009: 134).

Pascamodernisme tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Jacques Derrida yang melakukan pembangkangan radikal terhadap strukturalisme dan kemudian melahirkan pascastrukturalisme⁴. Landasan teoritis dari kebanyakan pemikir pascamodern dapat ditemukan dalam analisis sosial dan budaya dengan pendekatan pascastrukturalis dan analisis tersebut terus didengungkan dalam praktek budaya pascamodern (Jordan dan Weedon 1997: 18). Selain Derrida, tersebut pula beberapa nama yang dianggap sebagai 'guru' pascamodernisme, antara lain: Michel Foucault, Julia Kristeva, Roland Barthes, Paul Feyerabend, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jean Baudrillard (Sim 2005).

Bersama-sama, pemikiran pascastrukturalisme dan pascamodernisme menawarkan sebuah cara baru dalam memandang dunia (Sim 2005; Ward 2010). Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi dan reduksi terhadap kedalaman dan keluasan pemikiran pascamodernisme dan pascastrukturalisme, penulis mencoba merangkum pokok-pokok pemikiran pascamodernisme dan pascastrukturalisme, sebagai berikut:

- *Penolakan terhadap metanarasi (narasi besar).*

Pokok pikiran ini terutama berakar dalam pemikiran Jean-François Lyotard yang memandang bahwa kehidupan kita terlalu didominasi oleh beragam metanarasi yang dipengaruhi oleh aliran besar filsafat seperti Kantianisme, Hegelianisme, dan Marxisme yang melihat bahwa sejarah itu bergerak maju (progresif), bahwa pengetahuan bisa membebaskan kita, dan bahwa semua pengetahuan memiliki akar yang sama (Buttler 2002: 13). Lambat-laun, metanarasi tersebut ternyata menjadi rezim yang totaliter dan kemudian telah menunjukkan kegagalannya masing-masing. Lyotard berpandangan bahwa saatnya kita memberi ruang bagi kehadiran *mininarasi* yang selama ini terpinggirkan.

- *Tidak ada apa pun diluar teks.*

Poin ini disarikan dari buku *Of Grammatology* yang ditulis oleh Jacques Derrida (periksa O'Donnell 2009: 145). Pemikiran tersebut berkonsekuensi ganda bahwa (1) segala sesuatu itu ditulis, dan dengan demikian (2) segala sesuatu tersebut melewati proses pembacaan (Hodder 1991: 68).

- *Matinya pengarang.*

Poin ini dapat ditemukan dalam pemikiran dua tokoh posmodernisme yaitu Roland Barthes dan Michel Foucault (Buttler 2002: 23). Matinya pengarang berarti tidak adanya otoritas tunggal penafsir yang berhak menentukan benar salahnya sebuah penafsiran terhadap teks.

4 Istilah pascastrukturalisme itu sendiri sebenarnya tidak pernah digunakan secara spesifik oleh Derrida. Semata, pemikiran Derrida disebut pascastrukturalisme karena Derrida melakukan kritik habis-habisan terhadap strukturalisme. Derrida mengkritik strukturalisme dengan melakukan dekonstruksi terhadap pokok-pokok pikiran strukturalisme dan menunjukkan kelemahan-kelemahan prinsipil yang terkandung dalam strukturalisme.



- *Pembebasan manusia dari 'belenggu' struktur.*

Dalam pandangan strukturalis, segala sesuatu memiliki struktur yang mengaturnya. Individu dalam hal ini manusia tidak bisa terlepas dari struktur tersebut. Dekonstruksi terhadap strukturalisme telah membebaskan manusia dari belenggu struktur tersebut sehingga individualitas—agensi—dikembalikan sebagai salah satu faktor penting yang menentukan. Selain Derrida, nama lain yang mengemukakan poin ini ialah Anthony Giddens dan Pierre Bordieu.

- *Serangan terhadap objektivitas ilmu pengetahuan.*

Kaum pascamodernis utamanya mengkritik ilmu pengetahuan (*science*) yang mengklaim bahwa (1) mereka bisa mendeskripsi, menganalisis secara objektif dan jujur, dan (2) bahwa penelitian ilmiah bisa berlaku universal, terlepas dari pengaruh kebudayaan lokal, dan (3) tanpa tendensi politis yang mungkin mempengaruhi penemuan mereka.

/V/

Pada awal tahun 1980-an, kemapanan yang terjadi dalam arkeologi dibawah paradigma prosesual menghadapi gelombang kritik dari beberapa kelompok arkeolog. Gelombang kritik ini dipicu oleh ketidakpuasan yang merasa bahwa apa yang dilakukan arkeolog prosesual menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang tidak memadai lagi. Para arkeolog yang merasa tidak puas tersebut kemudian mengorganisir serangkaian seminar dalam rentang waktu 1979-1980 dan difinalkan dalam sebuah konferensi di Universitas Cambridge pada tahun 1980 bertema Simbolisme dan Strukturalisme dalam Arkeologi. Hasil konferensi tersebut kemudian dimatangkan dan dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul '*Structural and Symbolic Archaeology*', terbit pada tahun 1982. Seminar yang dimotori oleh Ian Hodder dan beberapa mahasiswanya kemudian merumuskan dan menawarkan arah pemikiran baru dalam arkeologi. Beberapa poin dalam pemikiran pascaprosesual, di antaranya:

- Menolak pandangan yang melihat kebudayaan sebagai sistem atau struktur.
- Mengetengahkan peran individu dalam membentuk kebudayaan (baca: agensi). Individu terbebas dari 'belenggu' sistem.
- Membatasi laku penelitian arkeologi pada tahapan interpretasi dan menolak eksplanasi yang deterministik.
- Menolak generalisasi lintas budaya yang berpeluang melahirkan hukum-hukum kebudayaan. Kebudayaan adalah fenomena partikular dan berkaitan erat dengan konteks.



- Mengajukan hermeneutika sebagai metode interpretasi.
- Memandang kebudayaan materi sebagai teks.
- Membuka peluang bagi multivokalitas interpretasi terhadap kebudayaan materi.

Dalam paradigma pascaprosesual, kebudayaan materi bukan sekedar cerminan dari perilaku manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan alam. Lebih jauh, kebudayaan materi sesungguhnya merupakan benda buatan seorang individu yang melaluinya, individu tersebut hendak menyampaikan sesuatu. Apa yang hendak disampaikan oleh individu tersebut dicera pascaprosesual sebagai makna. Dalam pada itu, yang harus dilakukan oleh arkeologi adalah berupaya menangkap makna tersebut (Hodder dan Hutson 2003). Individu bukanlah pihak yang pasif dalam menciptakan kebudayaan materi, melainkan turut aktif dalam menanamkan makna kedalam kebudayaan materi. Keaktifan individu dalam mencipta dan menanamkan makna berimplikasi bahwa sistem atau struktur tidak mendeterminasi gerak cipta individu dalam berkebudayaan.

Perhatian yang lebih mengutamakan penggalian makna dalam kebudayaan materi mengantarkan arkeologi pada pandangan bahwa tidak ada penafsiran yang tunggal terhadap kebudayaan materi (Hodder, 1991). Tindakan menafsir selalu berkaitan erat dengan subjektivitas penafsir dan konteks kebudayaan materi. Subjektivitas penafsir—dalam hal ini arkeolog—selalu terlibat dalam tindakannya menafsirkan sebuah kebudayaan materi. Subjektivitas dalam hal ini berkaitan dengan latar belakang sosial budaya penafsir dan kepentingan yang mungkin terkandung dalam penafsirannya. Dengan demikian, objektivitas dalam penelitian arkeologi secara otomatis tertolak.

Pada titik lain, konteks dari sebuah kebudayaan materi sangat penting dan menentukan hasil penafsiran. Setiap kebudayaan materi terkait dengan konteks dimana ia berada. Sehingga ide tentang lahirnya hukum-hukum general yang bisa menjelaskan fenomena kebudayaan materi secara universal menjadi tidak relevan. Kebudayaan materi adalah fenomena partikular yang tidak mungkin digeneralisasi karena masing-masing terikat dengan konteksnya. Implikasi metodologisnya ialah bahwa pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu alam tidak tepat untuk diterapkan dalam mengkaji kebudayaan materi. Sebagai alternatif metode, pascaprosesualisme menawarkan hermeneutika untuk digunakan dalam mengkaji kebudayaan materi (Hodder dan Hutson 2003).

Guna membuka peluang selebar-lebarnya terhadap penggalian makna, maka kebudayaan materi kemudian ditempatkan sebagai sebuah teks. Hal tersebut berimplikasi ganda yaitu: (1) teks tersebut harus ditulis dan (2) teks tersebut harus dibaca. Implikasi pertama sebenarnya berkaitan erat dengan peran individu dalam menorehkan makna.

Sementara implikasi kedua berkaitan erat dengan tindakan menafsirkan teks tersebut. Lebih lanjut, ketika kebudayaan materi diperlakukan sebagai teks, maka tidak ada otoritas tunggal yang bisa menentukan tafsir yang paling benar. Dalam hal ini, pascaprosesualisme menyepakati ide tentang 'matinya pengarang' yang kerap diasosiasikan dengan dua pemikir, yaitu: Roland Barthes dan Michel Foucault.

Kritikan yang dilancarkan oleh pascaprosesualis membuat perubahan yang cukup berarti dalam perkembangan arkeologi setelah sepanjang dekade 1980-an hingga sekarang. Perubahan-perubahan yang dimaksudkan ialah lahirnya bidang-bidang kajian baru dalam arkeologi yang mengupas masalah-masalah yang selama ini terabaikan atau tidak pernah terpikirkan, seperti: tubuh, gender, masyarakat pribumi, kondisi pascakolonial, dan seksualitas. Beberapa bidang kajian tersebut, antara lain:

Gender Archaeology. merupakan bidang kajian yang tampil sebagai reaksi terhadap pandangan arkeologi yang cenderung menempatkan laki-laki dan perempuan sebatas sebagai perbedaan jenis kelamin, sistem pemerolehan makanan, dan perbedaan tingkat kematian antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat. Tak dapat dipungkiri, aspek gender memang absen dalam kajian arkeologi dan seringkali kesimpulan penelitian arkeologi bernada *phaluseristik*. Agenda yang coba diusung dari arkeologi gender ialah mencoba melacak jejak-jejak segregasi gender pada masyarakat kuna untuk dijadikan bahan dalam mengelaborasi tema-tema sosial seperti ketidakadilan gender, identitas, etnisitas, dan perbedaan ras (Preucel 2006: 100).

Indigenous Archaeology. Arkeologi acap kali berurusan dengan kebudayaan materi di mana masyarakat pendukungnya masih hidup. Dalam penelitian tersebut, arkeolog tidak pernah melibatkan masyarakat pribumi. Bidang kajian ini berupaya mengetengahkan kembali suara-suara dari masyarakat pribumi pemilik kebudayaan agar menjadi bagian inheren dari penarikan kesimpulan penelitian arkeologi. Dalam perkembangannya, masyarakat pribumi bahkan dilibatkan dalam semua tahapan penelitian mulai dari perumusan masalah penelitian, penentuan teori dan pendekatan yang digunakan, hingga ke penarikan kesimpulan. Masyarakat pribumi juga dilibatkan sebagai peneliti setelah melewati serangkaian proses diskusi guna menyamakan atau setidaknya mengurangi gegar pengetahuan yang terjadi antara arkeolog dengan masyarakat. Dan tidak hanya sampai disitu. Masyarakat pribumi juga dilibatkan dalam penentuan apakah sebuah situs layak dikelola untuk publikasi kepada masyarakat yang lebih luas atau tidak. Dan jika mereka memandang layak, maka mereka juga dilibatkan dalam perumusan manajemen

pengelolaannya. Hal lain yang turut menjadi perhatian dari kajian tersebut adalah upaya advokasi agar warisan budaya yang 'dirampas' oleh peneliti terdahulu untuk dipamerkan di museum, dikembalikan ke 'pemilik sahnya' (McNiven dan Russel, 2009).

Postcolonial Archaeology. Disadari baik bahwa arkeologi dan antropologi merupakan produk dari kekuasaan kolonial (Preucel, 2006: 131). Atas kesadaran tersebut, dalam arkeologi berkembang pula kajian Arkeologi Pascakolonial. Kajian ini mengkaji secara mendalam bagaimana penggambaran masyarakat pribumi oleh kaum kolonial utamanya di Amerika, India, Australia, Afrika, dan Kanada. Persentuhan arkeologi dengan kajian pascakolonial diarahkan pada beberapa tema, diantaranya: kritik terhadap tradisi pemikiran kolonial, penulisan sejarah yang mengetengahkan perspektif masyarakat pribumi dan pengalaman subaltern, strategi restitusi dan dekolonisasi (Lyndon dan Rizvi, 2012: 23).

/VI/

Menarik benang merah yang mengaitkan pascaprosesualisme dalam arkeologi dengan pascamodernisme bukanlah hal yang tanpa persoalan. John Bintliff (1991) misalnya, menyoroti pascaprosesualisme dalam arkeologi sebagai bentuk intrusi pemikiran pascamodernis ke dalam arkeologi.⁵ Menurutnya, pascaprosesualis telah mengimpor keseluruhan spektrum pemikiran pascamodernis tanpa terlebih dahulu melakukan pembacaan kritis (Bintliff 1991: 276). Ia menyesalkan pascaprosesualis yang mengadopsi perspektif anti-positivis dan melihatnya sebagai sebuah kemunduran, degradasi ke alam prailmiah, prapencerahan, prarasional, pra-renaissans (Bintliff 1991: 277). Baginya, pascaprosesualisme dan pascamodernisme adalah dua sisi mata uang.

Tulisan tersebut ditanggapi langsung oleh dua arkeolog muda yang berperan penting dalam pelaksanaan konferensi TAG, Julian Thomas dan Christopher Tilley (1992). Keduanya melihat pascamodernisme lebih sebagai kritikan yang memuat ketidakpuasan terhadap proyek-proyek modernisme, bukan sebagai sebuah gerakan intelektual yang padu (Thomas dan Tilley, 1992: 106). Karena itu, anggapan bahwa pemikiran prosesual dipengaruhi oleh pemikiran pascamodernisme adalah hal yang salah kaprah karena keduanya berpondasi di wilayah yang berbeda. Mereka menambahkan bahwa apa yang Bintliff lakukan ialah hanyalah menghimpun beberapa kecenderungan pemikiran dalam arkeologi di bawah label pascamodern, lalu menggunakan kritik terhadap pascamodernisme untuk mengkritik semua kecenderungan pemikiran tersebut (1992: 107). Thomas dan Tilley menolak simplifikasi yang menyamakan pascamodernisme dengan pascaprosesualisme.

⁵ Pernyataan Bintliff dituangkan dalam sebuah tulisannya yang bertajuk '*Post-modernism, rhetoric and scholasticism at TAG: the current state of British archaeological theory*'. Tulisan tersebut berangkat dari keikutsertaannya dalam konferensi tahunan Theoretical Archaeology Group (TAG) yang dilaksanakan di Universitas Lampeter, Desember 1991.

Mengatasi perdebatan tersebut, kita bisa mengidentifikasi beberapa titik persinggungan antara pascamodernisme dan pascaprosesualisme. Sementara, pascamodernisme mempertanyakan dan mulai meragukan positivisme sebagai satu-satunya patokan rasionalitas, pascaprosesualisme merongrong keamanan positivisme dalam arkeologi. Berbeda dengan prosesualisme yang mendorong positivisme ke dalam arkeologi sebagai satu-satunya jalan untuk menjelaskan masa lalu, pascaprosesualisme membuka ruang bagi penerapan berbagai pendekatan dalam mengkaji masa lalu seperti: pendekatan struktural/semiotik; pendekatan hermeneutik; pendekatan pascastruktural; pendekatan teori kritis; pendekatan Marxis; dan pendekatan feminis (Tilley, 2000). Selain itu, pascamodernisme mengajak ilmuwan untuk mendengarkan "yang liyan", memberikan tempat pada *mininarasi* dalam diskursus ilmu pengetahuan, pascaprosesualisme mengajak arkeolog untuk melibatkan dan mendengarkan suara para "pemilik kebudayaan" dalam penelitian arkeologi.

Dari uraian di atas, pascaprosesualisme dan pascamodernisme memang mengusung spirit gerakan yang sama, (1) merongrong keangkuhan positivisme, (2) membuka keran untuk bagi penerapan beragam pendekatan dalam penelitian ilmiah, (3) tuntutan untuk mendengarkan "yang liyan", (4) merayakan multiplisitas penafsiran. Akan tetapi, menyatakan bahwa pascaprosesualisme adalah keturunan langsung pascaprosesualisme adalah kesimpulan yang terburu-buru dan terlalu sederhana (Thomas, 2000; Shanks 2009). Bagi Johnson (2000: 166), pascaprosesualisme dalam arkeologi hanyalah bagian kecil dari keseluruhan perubahan besar yang sedang terjadi dalam dunia ilmu sosial humaniora pada era tahun 1980-an dan 1990-an.

Daftar Pustaka

- Bentley, R.A., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.).
2009 *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira.
- Binford, Lewis
1972 *An Archaeological Perspective*, New York: Seminar Press.
- Bintliff, John L.
1991 Post-modernism, Rhetoric and Scholasticism at TAG: The Current State of British Archaeological Theory. *Antiquity* Vol. 65, Hal 274-8.
- Butler, Christopher
2002 *Postmodernism; A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Dark, K. R.
1995 *Theoretical Archaeology*. New York: Cornell University Press.
- Denzin, Norman K.
2005 Postmodernism. dalam George Ritzer (Ed.). *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage Publications.
- Gamble, Clive
2008 *Archaeology: The Basics*. Ed.2. London: Routledge.
- Hodder, Ian
1991 *Post-modernism, Post-structuralism, and Post-processual Archaeology*. dalam Ian Hodder (Ed.). *The Meanings of Things; Material Culture and Symbolic Expression*. New York: Harper Collins Academic. hal 64-78.



Hodder, Ian., Scott Hutson

2003 *Reading The Past; Current Approaches to Interpretation in Archaeology*. Ed. 3.
Cambridge University Press.

Hudson, Luanne B.

1984 Modern Material Culture Studies; Anthropology As Archaeology. *American Behavioral Scientist Journal* Vol. 28, hal. 31-39.

Johnson, Mathew.

2000 *Archaeological Theory: An Introduction*. Oxford: Blackwell.

Jordan, Glenn. Chris Weedon

1997 *Culutral Politics; Class, Race, Gender and The Postmodern World*. Oxford: Blackwell.

Lubis, Akhyar Yusuf

2011 *Teori dan Konsep-Konsep Penting Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer*. Jakarta: Dept. Filsafat FIB-UI.

Lyndon, Jane., Uzma Z. Rizvi

2012 Introduction: Postcolonialism and Archaeology. dalam Jane Lyndon dan Uzma Z. Rizvi (Ed.). *Handbook of Postcolonial Archaeology*. Walnut Creek: Left Coast Press.

Lyndon, Jane., Uzma Z. Rizvi (Ed.)

2012 *Handbook of Postcolonial Archaeology*. California: Left Coast Press.

Magetsari, Noerhadi

2003 Paradigma Baru Ilmu Arkeologi (Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia). Tidak dipublikasikan.

McNiven, Ian J., Lynette Russel

2009 Toward a Postcolonial Archaeology of Indigenous Australia. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira. Hal. 423-443.

O'Donnell, Kevin

2009 *Sejarah Ide-Ide*. Yogyakarta: Kanisius.

Patterson, Thomas C.

1986 The Last Sixty Years: Toward a Social History of Americanist Archaeology in The United States. *American Anthropologist* Vol. 88. Hal. 7-26.

Preucel, Robert., Ian Hodder (eds.).

1996. *Contemporary Archaeology in Theory*. Oxford: Blackwell.

Preucel, Robert W.

2006 *Archaeological Semiotics*. Victoria: Blackwell Publishing.

Ritzer, George. (Ed.)

2005 *Encyclopedia of Social Theory*. California: Sage Publications.

Schiffer, Michael Brian

1976 *Behavioral Archaeology*. New York: Academic Press.

Shanks, Michael., Ian Hodder

1997 Processual, Postprocessual and Interpretive Archaeology. dalam Ian Hodder, Michael Shanks, dkk. (Ed.), *Interpreting Archaeology; Finding Meaning in The Past*. London: Routledge. hal 3-28.

Shanks, Michael

2009 Postprocessual Archaeology and After. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Hal. 133-144. Plymouth: Altamira.



Sim, Stuart

2005 Postmodernism and Philosophy. dalam Stuart Sim (Ed.). *The Routledge Companion to Postmodernism*. London: Routledge.

Sim, Stuart (Ed.)

2005 *The Routledge Companion to Postmodernism*. London: Routledge.

Smith, Philip

2001 *Cultural Theory; An Introduction*. Oxford: Blackwell.

Thomas, Julian. (Ed.).

2000 *Interpretive Archaeology; A Reader*. Leichester: Leichester University Press.

Thomas, Julian., Christopher Tilley.

1992 TAG and 'post-modernism': a reply to John Bintliff. *Antiquity* Vol. 66. Hal 106-14. Taylor and Francis Online.

Tilley, Christopher.

1993 Introduction: Interpretation and a Poetics of The Past. dalam Christopher Tilley (Ed.). *Interpretative Archaeology*. London: Berg.

2000 Materialism and An Archaeology of Dissonance. dalam Thomas, Julian. (Ed.). *Interpretive Archaeology; A Reader*. Leichester: Leichester University Press. Hal. 71-80.

Trigger, Bruce G

1978. *Time and traditions: Essays in archaeological interpretation*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

1989 *A History of Archaeological Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.

2006 *A History of Archaeological Thought*. Ed.2. Cambridge: Cambridge University Press.

Ward, Glenn

2010 *Understand Postmodernism (Teach Yourself)*. London: Hodder & Stoughton.



Webster, Gary S.

2009 Culture History: A Culture-Historical Approach. dalam R.A. Bentley., C. Chippindale dan H. Maschner (Ed.). *Handbook of Archaeological Theories*. Plymouth: Altamira. Hal. 11-27.

Wiley, Gordon R., Jeremy A. Sabloff

1980 *A History of American archaeology*. Ed. 2. San Francisco: Freeman

Woodward, Ian

2007 *Understanding Material Culture*. London: Sage.

Muh. Ihsan D, SS, MA.

Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universiats Halu Oleo (UHO) Kendari

Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan

Edward L. Poeinggomang

Judul ini telah menggugah saya menelusuri perjalanan sejarah kemaritiman di kawasan asia tenggara. Dalam penjelajahan itu terungkap dua peristiwa penting yang menggambarkan hubungan yang erat antara masyarakat maritim di Sulawesi Selatan dan masyarakat maritim dunia Melayu. Ketika Malaka direbut oleh bangsa portugis, masyarakat maritim melyu berpindah mencari koloni dagang baru dikawasan Sulawesi Selatan yang ketika itu dikenal dengan sebutan "pulau-pulau Makassar" (*Ilhas dos Macazar*), yaitu pelabuhan-pelabuhan singgah yang berada di daerah itu (1511).

Peristiwa berikut ini adalah ketika kerajaan Makassar kalah dalam perang Makassar (1666-1667) dan perkumpulan dagang hindia timur (*verenigde Oost compagnie*, disingkat VOC) bersama sekutunya tampil sebagai pemenang, peristiwa yang mengawali kedudukan kekuasaan Belanda atas Makassar dan daerah taklukannya (*Makassar en onderhoorigheden*) peristiwa kekalahan kerajaan Makassar dan penguasa bandar niaga itu oleh VOC mendorong pelaut dan pedagang Sulawesi selatan yang merasa tidak puas dengan kenyataan itu mengembara kearah barat memasuki dunia Melayu untuk meneruskan kegiatan mereka sebagai pelaut dan pedagang.

Dua peristiwa itu dapat mengarahkan perhatian kita untuk mempersoalkan sejumlah pertanyaan yang menuntun kita dalam usaha menelusuri masa lampau masyarakat itu dan mengungkapkan, diantaranya tentu pertanyaan menyangkut bangsa-bangsa serumpun. Namun demikian, untuk kesepakatan yang terbatas ini, pertanyaan yang menjadi pokok pembicaraan hanyalah menyangkut apa pengaruh masyarakat maritim dari dunia Melayu

terhadap pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan dan sebaliknya, dan bagaimana kegiatan perdagangan maritim masyarakat maritim Sulawesi selatan.

Perkembangan Dunia Pelayaran dan Perdagangan

Tome Pires menyatakan dalam bukunya yang ditulis pada permulaan abad ke-16 bahwa masyarakat dari pulau Makassar (*ilhas dos Macazar*) -kota pelabuhan yang berada pada pesisir barat dan selatan jazirah selatan pulau Sulawesi- telah melakukan pelayaran niaga dengan Malaka, Jawa, Kalimantan, Siam, dan dengan semua tempat yang terletak antara Pahang dan Siam (Cortesao, 1944: 226). Barang dagangan mereka adalah beras yang putih dan sedikit emas. Gambaran yang sama juga di jumpai pada sejumlah catatan tentang pelayaran niaga kerajaan Tallo (Bijdragen..., 1854 :277) dan lainnya. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa hingga paruh pertama abad ke-16, masyarakat maritim Sulawesi selatan belum terlibat kegiatan perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana.

Pada pihak lain, apabila diperhatikan kegiatan pelaut dan perdagangan Melayu dan slogan yang di sebutkan bahwa "Tuhan telah menciptakan benda untuk rempah-rempah dan Timur untuk kayu cendana", pelaut dan pedagang Melayu telah mengutamakan perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana. Dalam banyak hal kegiatan pelayaran niaga mereka terpusat di Malak, sehingga Malak tampil sebagai pusat perdagangan untuk kawasan niaga yang oleh Kenneth R. Hall disebut "Zone perdagangan selat Malaka" (Hall, 1985:224).

Malaka yang merupakan pusat perdagangan terpenting pada abad ke-15 tidak dapat bergemilang terus karena pada tahun 1511 direbut oleh Portugis. Hal itu berakibat pelaut dan pedagang Melayu melakukan eksodus besar-besaran ke arah timur dan memasuki kawasan Sulawesi selatan. Tampaknya kehadiran pedagang Melayu itu memberi dorongan yang kuat kepada kerajaan Gowa untuk mengembangkan bandar niaganya (Somba Opu) sebagai pusat perniagaan. Usaha yang dilakukan oleh raja Gowa ke-9, Karaeng Tumaparisi Kalonna (1510-1546) usaha yang dicanangkan itu kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, yang akhirnya menempatkan Makassar sebagai bandar niaga Internasional terpenting pada paruh abad kedua abad ke-16.

Pada dasarnya Karaeng Tumaparisi Kalonna dapat dipandang sebagai peletak dasar kehadiran pusat perniagaan dan membentuk kerajaan kembar Gowa dan Tallo yang kemudian lebih dikenal dengan nama kerajaan Makassar. Sementara selanjutnya, Karaeng Tunj Palangga Uluweng (1546-1565) yang dipandang sebagai pembangun pusat perniagaan yang dikenal dengan nama bandar niaga Makassar. Yang arealnya meliputi kota pelabuhan Tallo yang terletak di muara sungai Tallo hingga kota pelabuhan Somba Opu yang terletak pada muara sungai Jene

berang. Hal itu diawali dengan kebijaksanaan politiknya yang saya sebut sesuai dengan ikat yang dibuat sesuai dengan tindakan penaklukan, yaitu *Makkanama ru mammo* (aku bertitah dan kamu taati). Kebijakan itu dilaksanakan dengan cara melakukan tindakan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan pesisir dan memaksakan mereka mengikrarkan pernyataan itu dan mengangkat barang dan orang pada bandar niaga itu ke kota pelabuhannya (poelinggomang, 1991:26-27). Kebijakan ini berakibat kota pelabuhan-kota pelabuhan lain selatan pulau Sulawesi menjadi sirna dan hanya satu pusat perdagangan yang berkembang yaitu kota pelabuhan Makassar.

Berdasarkan catatan lokal (kontara Makassar) pada periode pemerintahan Karaeng Tunri Pallangga Uluweng inilah datang Anakhoda Bonang (seorang pedagang Jawa) memohon kepada raja Gowa agar berkenan mengizinkan pedagang-pedagang melayu menetap di bandar niaganya, mereka yang berasal dari pahang, petani, Campa, Minangkabau dan Johor. Permohonan itu dikabulkan dan diberikan izin menetap di Mangngalekara (Reid, 1983:141, Wolhoff:25-28).

Pada masa raja ini juga pedagang portugis menjalin hubungan niaga dengan Makassar dan mendapat izin mendirikan loji sekitar tahun 1559. menurut Stapel sesungguhnya pedagang melayu sangat membenci pedagang portugis karena menghancurkan dan merebut pusat perdangan mereka (malaka), bahkan bersumpah tidak ingin melakukan hubungan niaga dengan bangsa itu. Ditambahkan bahwa: "meskipun raja (raja Gowa) kafir tetapi ia sangat suka memaafkan". Semua orang asing diterima dengan baik, orang Portugis dan Islam bebas mendirikan rumah ibadah disini (Makassar) (Stapel, 1922:8).

Kehadiran pedagang-pedagang Melayu itu ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap perluasan wilayah pelayaran maritim pulau dan pedagang dari Sulawesi selatan. Mereka juga mulai melakukan pelayaran niaga ke daerah penghasil rempah-rempah (Maluku) dan kayu Cendana (timur). Produksi itu mereka bawa ke Makassar baru kemudian membawanya lagi dengan perahu dan jung ke pelabuhan-pelabuhan yang terletak di bagian utara (Zone perdagangan laut sulu) dan barat (Zone Perdagangan selat Malaka).

Berkembangnya Makassar sebagai kota pelabuhan pemasaran rempah-rempah dan kayu cendana dan juga produksi dagang lainnya itu menyebabkan dalam perkembangan kemudian pedagang-pedagang asing bergiat untuk menjalin hubungan dengan Makassar. pada permulaan abad ke-17 tercatat telah didirikan sejumlah loji pedagang asing lainnya, seperti VOC pada tahun 1607, Inggris pada tahun 1613, Spanyol pada tahun 1615, Denmark dan China pada tahun 1618 (Reid, 1983:139). Kecenderungan pedagang asing memilih berniaga ke Makassar itu tidak hanya karena keprihatinan Raja dan penduduknya yang suka memaafkan dan menerima dengan baik semua orang asing tetapi juga konon dikarenakan harga rempah-rempah di Makassar lebih murah dari harga produksi itu di daerah produksinya (Stapel, 1922:9).

Anthony Reid yang mengkaji sejarah perdagangan Makassar pada periode sebelum kota pelabuhan internasional itu direbut oleh VOC yang menyatakan bahwa "Sejarah pertumbuhan perdagangan

Makassar menampilkan kisah kemajuan dan keberhasilan yang luar biasa dalam sejarah Indonesia" (Reid, 1983:117). Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai itu bukan saja bergantung kepada kepribadian raja dan rakyatnya dan pemasaran rempah-rempah yang murah, akan tetapi juga karena kebijaksanaan perniagaannya yang menganut prinsip politik pintu terbuka dan dukungan yang diberikan kepada para pelaut dan pedagang dan pedagang asing lainnya dalam berniaga (Leur, 1983:195).

Kemajuan dan keberhasilan Makassar itu tidak dapat terus di pertahankan karena dalam perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666-1667, kerajaan Makassar yang sesungguhnya memiliki kekuatan laut yang besar, harus mengakui keunggulan VOC dan sekutunya dan terpaksa harus menandatangani "perjanjian Bongaya" (Bongaais Verdrag) pada November 1667, untuk mengakhiri perang itu. Akhir dari perselisihan itu mengawali pendudukan VOC atas Makassar sehingga pelaut dan pedagang dari daerah ini yang tidak puas dengan kenyataan itu meninggalkan Makassar dan menjelajah ke arah Barat untuk mencari koloni dagang baru. Kebanyakan mereka pindah ke dunia perdagangan pada Zone perdagangan selat Malaka.

Peranan Dalam Dunia Niaga

Kehadiran pedagang dan pelaut dari Sulawesi Selatan, mereka itu lazim disebut orang Bugis saja- di dunia niaga melayu itu bukan hanya ingin melanjutkan kegiatan mereka dalam pelayaran dan perdagangan saja tetapi juga bergiat memperluas pengaruh dalam dunia politik. Riau dan Johor misalnya: daerah itu sesungguhnya adalah daerah-daerah kekuasaan raja-raja melayu namun pengaruh orang Bugis yang lebih dominan (Andaya, 1982: 105) itulah sebabnya ketika Inggris bergiat untuk memasuki dunia melayu, Sultan Kedah bergiat mendapatkan bantuan Inggris untuk mematahkan pengaruh Bugis di wilayah itu. Namun demikian keinginan Sultan Muhammad Jiwa (sultan Kedah) itu tidak dapat dipenuhi oleh pihak Inggris, sehingga jalin persahabatan Kedah – Inggris tidak berlangsung lama, kegagalan Inggris itu di pandang merupakan kesalahan dari misi Monckton yang tidak cakap dalam mengemban tugas mereka. Namun pada sisi lain terdapat kecenderungan Inggris tidak menginginkan hubungannya dengan orang Bugis retak karena kelompok itu dipandang yang memegang peranan penting dalam dunia niaga di perairan itu pada khususnya dan dunia niaga Asia tenggara pada umumnya (Wong, 1961:11, Andaya, 1982: 101).

Keengganan Inggris membantu Kedah itu sesungguhnya berkaitan dengan ambisinya untuk melapangkan jalan bagi jalinan niaganya dengan China. Hal itu menurut Wong Lin Keng merupakan faktor penting Inggris ingin terus mempertahankan jalinan komersialnya dengan orang Bugis (Bapa pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan). Kita ketahui bahwa pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan ketika itu banyak berkecimpung dari pemasaran produk laut seperti teripang, agar-agar, sirip ikan hiu, kerang dan lainnya, komoditi yang mendapat pasaran bagi China, disamping timah yang pada umumnya berada dalam pengawasan raja-raja Melayu. Kepentingan Inggris dalam perniagaan dengan Cina berkaitan

dengan pemasaran hasil idusterinya dan persaingan dengan Belanda dalam pemasaran teh di Eropa, salahsatu komoditi yang mendapat pasaran luas disamping rempah-rempah. (baca: Boxer, 1965: 268-294).

Pada dasarnya pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan yang datang ke dunia niaga Malaka itu tidak hanya melakukan pelayaran niaga di kawasan itu mereka melakukan pelayaran niaga ke berbagai pusat perniagaan di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga tetap menerobos ke Maluku yang berada dalam monopoli dan pengawasan ketat VOC dan kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu juga melakukan pelayaran niaga ke daerah-daerah produksi komoditi dagang. James F. Warren mencatat bagaimana peranan orang Bugis dalam menjalin pertukaran komoditi antara zone perdagangan laut Sulu (Warren, 1981: 11-12).

Keuntungan Inggris tetap mempertahankan jalinan niaga dengan orang Bugis itu terbukti ketika Inggris mulai memiliki pangkalan di dunia Melayu, khususnya ketika Raffles membangun Singapura pada tahun 1819, Singapura dijadikan pelabuhan bebas (free port) karena menurut Raffles: "pelaksanaan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh orang Eropa, khususnya Belanda, pada abad ke-18 telah merusak tonggak yang mendukung dasar-dasar ekonomi banyak kerajaan pesisir dan pulau bumiputera. Dan karena beberapa kelemahan dari kebijaksanaan itu telah berakibat terjadinya perampokan, tututan keadilan dari pedagang Bumiputera dan keterlibatan pedagang Eropa di dunia Melayu" (Warren, 1981: 147). Kebijakan itu ternyata berhasil mengikat banyak pedagang, terutama China dan Bugis, dan mereka ini di pandang sebagai kelompok yang berhasil menempatkan dan mengangkat Singapura sebagai bandar niaga internasional terbesar di Asia Tenggara.

Wong Lin Keng mencatat bahwa perahu dagang orang Bugis yang datang ke Singapura pada tahun 1838-1839 adalah: dari Sulawesi sebanyak 122 perahu, dari Kalimantan sebanyak 107 perahu, dan dari Nusa Tenggara sebanyak 95 perahu dan pada tahun 1841-1842 sebanyak dari Sulawesi 88 perahu, dari Kalimantan sebanyak 46 perahu dan dari Nusa Tenggara sebanyak 123 perahu (Wong, 1961: 282-284). Sementara menurut catatan Davidson seorang pengembara Inggris yang mengunjungi Singapura pada tahun 1840 menyatakan bahwa rata-rata setiap tahun sejumlah 200 padewakang (perahu dagang Sulawesi selatan) mengunjungi Makassar (Davidson, 1846: 57). Data ini menunjukkan betapa besar peranan orang Bugis dalam kegiatan perniagaan di Singapura.

Terpusatnya kegiatan niaga pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan ke Singapura itu pada gilirannya menimbulkan kecemasan pemerintah Hindia Belanda karena hal itu mengakibatkan mengalirnya produksi dari negeri jajahannya ke pasaran luar. Hal itu menyebabkan kecenderungannya untuk mempertahankan monopoli dan membatasi kegiatan perdagangan Masyarakat Bugis (Sulawesi Selatan) demi keuntungan sendiri menjadi pudar akhirnya diputuskan untuk mengikuti kebijaksanaan perdagangan Inggris dengan menjadikan sejumlah pelabuhan penting di luar Jawa dan Madura sebagai pelabuhan Bebas, terutama pelabuhan Makassar. Hal itu dimaksudkan untuk mengikat pelaut dan pedagang bumiputera tidak lagi bernia ke Singapura tetapi berniaga

Hindia Belanda. Itu berarti akan merosotkan kembali bahkan akan merusak tatanan perekonomian di kawasan timur Hindia Belanda. Hal itu merupakan alasan bandingan sehingga pihak pemerintah pada akhirnya tidak segera merealisasikan rencana pembatalan kebijaksanaan pelabuhan bebas. Pemikiran yang berkembang adalah pertama-tama bergiat mengambil alih peranan pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan. Dalam hal ini pihak pemerintah Hindia Belanda berusaha meningkatkan armada niaga dan memperluas jaringan pelayaran untuk melayani jasa angkutan niaga. Selanjutnya membatasi peluang bagi jasa angkutan asing dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pelayaran Belanda dan bahkan hak monopoli angkutan niaga. Dan untuk memantapkan peluang bagi rencana kebijaksanaan baru itu maka kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Sulawesi selatan harus ditaklukkan dan dijadikan daerah kekuasaan asing. Untuk itulah maka pemerintah melaksanakan ekspedisi militer 1905 untuk memaksakan penguasa-penguasa lokal menerima tuntutan pemerintah Hindia Belanda dan bersedia menandatangani "pernyataan pendek" (*Korte Verklaring*).

Melalui strategi itu ternyata pihak pemerintah Hindia Belanda berhasil mengurangi bahkan merosotkan intensitas peranan pedagang dari Sulawesi selatan dalam kegiatan perniagaan. Ketakutan akan berpindahnya mereka ke dunia Melayu berhasil pula dibendung, karena dukungan penguasaan bagi kegiatan mereka berhasil di simakan lewat tindakan penaklukan. Atas dasar itu pihak pemerintah Hindia Belanda akhirnya merealisasikan rencana untuk menjadikan atau memasukkan kembali kawasan itu dalam wilayah wajib pajak pada Agustus 1906. Tinjauan akhir.

Gambaran pelayaran niaga yang dilakukan oleh pelaut dan pedagang dari Sulawesi selatan itu menunjukkan kepada kita suatu model hubungan perdagangan yang bebas tanpa pembatasan wilayah politik. Pelaut dan pedagang Sulawesi selatan dengan leluasa melakukan pelayaran niaga ke daerah produksi dan daerah pasaran yang berada dalam pengawasan politik kerajaan lain dengan bebas. Suatu kondisi seperti yang di dambakan kini dengan slogan era globalisasi.

Dalam hal ini tampak bahwa jika peranan penting di dominasi oleh kelompok tertentu dalam kegiatan perdagangan, itu akan dapat berakibat bahwa aktifitas mereka jadi penentu bagi perumusan kebijaksanaan perekonomian dan politik. Hal itu tampak dalam sejarah pelayaran dan perdagangan pelaut dan pedagang Sulawesi selatan yang secara ringkas telah di paparkan. Peranan mereka bagi kemajuan dan keberhasilan Singapura mempengaruhi pemerintah Hindia Belanda memilih melaksanakan perdagangan bebas sepenuhnya dan bahkan menerapkan pelaksanaan pelabuhan bebas. Namun pada gilirannya peranan mereka itu juga mendorong usaha untuk membatalkan kebijaksanaan itu, dan menerapkan kebijaksanaan baru yang di sebutnya *tol gebied*.

Selain itu juga tampak bahwa keunggulan suatu kelompok dapat berakibat ganda: mendapatkan partner kerjasama yang mudah dan menjadi dambaan kelompok lain pada satu pihak dan pada pihak lain mengundang persaingan yang tidak sehat bagi kelompok lain. Dalam hal ini kita di harapkan kewaspadaan untuk mencerna kondisional yang memungkinkan peluang untuk maju dan berhasil dan sebaliknya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kehidupan pelayaran perdagangan di kawasan Sulawesi selatan pada khususnya yang di Asia tenggara pada umumnya sebelum abad ke-20 dalam kalangan Bumiputera menunjukan kecenderungan pada prinsip globalisasi. Karena itu dipandang perlu mendapat perhatian dan kajian sejarah untuk meramu pesan-pesan kelampauan bagi rancangan globalisasi kini. Tidak dapat disangkal bahwa pelaut dan pedagang Sulawesi selatan pada masa lampau mencatat ketenaran sebagai kelompok yang ulung dan cekatan dalam dunia niaga, dan bahkan menurut Stapel mereka ini selalu berpegang pada prinsip "menang atau kalah, engkau atau saya" (*er op of er onder jij of ik*) dalam persaingan niaga.

Daftar Pustaka

Andaya, Barbara W dan Leonard Y. Andaya.

1982 *A History of Malaysia*. London: The MacMilan Press.

Boxer, C.R.

The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800, London: Hutchinson & Co.

Cortesao, Armando.

1944 *The suma oriental of tome pires and the books of Francisco rodriques*, London: Robert Maclehose.

Davidson, G.F.

1846 *Trade and Travel in the Far East*. London: Madden and Malcom.

Hall, Kenneth R.

1985 *Maritime Trade and State Developptmen in Early Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press.

Leur, J.C. Van.

1983 *Indonesian Trade and Society*, Dodrecht: Floris.

Poelinggomang, Edwar L.

1991 "Proteksi dan perdagangan bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar pada Abad Ke-19" Amsterdam: Disertasi.

Reid, Anthony.

1983 "The Rice of Makassar", dalam *RIMA*, Vol. XVII, hal. 117-180.

Stapel, F.W.

1922 *Het Bongais Verdrag*, Leiden

Tobing D, Ph.L.O, dkk.

1977 *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan SulSel.

Warren, James F.

1981 *The Sulu Zone, 1768-1798*, Singapore: Singapore University Press.

Wolhoff, G.J. dan Abndurrahim.

?? *Sejarah Gowa*, Makassar: Yayasan kebudayaan Sulselra.

Wong Lin Ken.

1961 *The Trade of Singapore, 1819-1869*, Singapore: Tie Wah Press (JMBRAS Vol. XXXIII, No.1).

Dr. Edward L. Poelinggomang MA.

Pengajar Jurusan Sejarah FIB Unhas



Peran LSM dalam Pengelolaan Museum Situs : Studi Kasus Beberapa Museum Situs di Tana Toraja

M. Nur

Dapat dikatakan bahwa program bernuansa arkeologi di Indonesia masih sangat kurang dilakukan oleh lembaga swasta (Mahmud, 2001). Dominasi lembaga pemerintah masih terasa sangat kental. Dominansi pemerintah yang berkelanjutan tersebut tanpa disadari akan mengikis rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi. Akibat yang akan terjadi bila tidak dipikirkan sedini mungkin adalah pelunturan jiwa nasionalisme dan sampai di situ, rumitnya varian biokultural yang menjadi perekat kuat nasionalisme (Nur, 2000) akan menjadi bibit disintegrasi bangsa. Tentunya itu bukan hal yang kita inginkan sebagai warga negara Indonesia.

Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam program *Pemberian Bantuan Subsidi Kegiatan Organisasi Budaya*, oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata baru-baru ini merupakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Paling tidak, ada tiga kemajuan dari program pelibatan tersebut, pertama menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap peninggalan leluhurnya, kedua memantapkan pemahaman objektif tentang kesejarahan dan ketiga dan yang terpenting adalah terciptanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dapat membuka kemajuan pada pembangunan kebudayaan di masa mendatang.



Tema yang saya ajukan di sini memang bukan hal baru. Beberapa museum situs di daerah tujuan wisata Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan diajukan sebagai studi kasus karena memiliki keunikan dalam keberadaannya. Meskipun sangat terasa ketimpangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik objek wisata tersebut, tetapi paling tidak telah memberikan kontribusi yang berarti terutama dari segi perawatan artefak dan kontribusi finansial ke pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, fenomena tersebut sebenarnya adalah ajakan lembaga kemasyarakatan untuk memulai apa yang menjadi harapan selama ini agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*). Beberapa kelemahan dan ancaman penanganan museum situs di Tana Toraja akan diuraikan untuk dipikir dan didukung keberadaannya oleh lembaga terkait nanti.

Museum Situs, Ujung Tombak Informasi BCB

Sebelum mengurai lebih jauh tentang pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan museum situs, terminologi museum perlu dijelaskan sebagai pijakan. Menurut ICOM,

A Museum is a nonprofit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment (Sutaarga, 1975).

Konsep museum tersebut dijadikan sebagai konsep dari pendirian Museum Nasional dan Museum Negeri di Indonesia.

Museum situs memiliki konsep pendirian dan pengembangan yang sama dengan Museum Nasional dan museum negeri. Perbedaannya, Museum Nasional dan Museum Negeri memiliki koleksi yang cakupannya luas, dari berbagai wilayah, sementara museum situs adalah suatu bangunan yang didirikan di dekat kompleks bangunan sejarah atau situs peninggalan purbakala. Di dalam museum situs tersimpan koleksi yang berasal dari kompleks bangunan bersejarah atau kepurbakalaan itu saja (Sutaarga, 1975:33).

Gagasan pembangunan museum situs di Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa sumberdaya arkeologi yang memiliki kemanfaatan bagi pembangunan ideologi, sosial dan ekonomi banyak yang hilang. Dengan pengembangan museum-museum situs yang terdistribusi di banyak daerah, kerusakan situs dan tercecernya data-data yang bersifat artefaktual dapat dieliminasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 kemudian, yang memberikan posisi hukum sangat memadai bagi usaha pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi.

Selain tujuan pelestarian, tujuan pemanfaatan sumberdaya arkeologi juga dapat diemban oleh museum situs. Penyebaran informasi budaya yang objektivitasnya tinggi dapat disalurkan apabila koordinasi antar lembaga terkait terjalin dengan baik. Idealnya, lembaga penelitian sebaiknya menyimpan hasil-hasil penelitian pada museum situs. Dalam kerangka pemikiran ini, museum situs dapat dijadikan ujung tombak untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 serta hasil-hasil penelitian terbaru. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak stagnan. Tujuan sentral untuk pemantapan ideologi, penelitian serta tujuan finansial akhirnya terpadu. Walaupun tujuan pendirian museum situs sangat berbeda bila dioposisikan dengan konsep pariwisata yang menomorsatukan segi finansial, tetapi setidaknya kemanfaatannya pada dua aspek lain (ideologi, ilmu pengetahuan) merupakan alasan objektif.

Museum sebagai salah satu pendukung industri pariwisata budaya, sudah saatnya dipikirkan posisinya dalam pembangunan kebudayaan. Dalam kaitannya dengan distribusi informasi kebudayaan, juga dapat dijadikan ujung tombak untuk *cross* informasi budaya yang sasarannya adalah wisatawan domestik. Dengan demikian dapat menopang program pendidikan formal untuk memantapkan pemahaman kesejarahan. Alur tujuan di atas secara langsung menunjuk museum situs sebagai sarana *terjemah budaya*. Peranan ini dapat diambil apabila lembaga penyelamatan, lembaga penelitian dan akademisi dapat bekerja bersama dan menjadikan lembaga swadaya masyarakat sebagai *middle man*. Bila dapat terwujud, bukankah tugas ketiga lembaga tersebut lebih enteng

Museum Situs Di Tana Toraja

Toraja merupakan daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan dengan penonjolan pada pariwisata budaya. Pesona budaya Toraja memang luar biasa. Masyarakat pemuja batu besar tersebut masih memiliki perilaku adat yang sangat tradisional (Duli, 2003). Aluk Todolo, nama kepercayaan mereka masih dijunjung tinggi sampai sekarang.

Objek-objek wisata budaya di Toraja rata-rata adalah situs arkeologi tetapi sampai sekarang masih digunakan untuk pesta-pesta adat. Objek-objek wisata tersebut dikelola oleh organisasi kesatuan adat. Inisiatif mendirikan museum mini muncul karena kesadaran masyarakat adat bahwa peninggalan tersebut harus selalu dipelihara karena ditakutkan nenek moyang (arwah) mereka akan marah dan memberikan *hukuman* kepada masyarakat Toraja. Dibangunlah museum situs atas inisiatif keluarga. Peralatan kehidupan sehari-hari serta peralatan penguburan kemudian dikumpul lalu dibuatkan cerita heroik tentang



Tema yang saya ajukan di sini memang bukan hal baru. Beberapa museum situs di daerah tujuan wisata Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan diajukan sebagai studi kasus karena memiliki keunikan dalam keberadaannya. Meskipun sangat terasa ketimpangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik objek wisata tersebut, tetapi paling tidak telah memberikan kontribusi yang berarti terutama dari segi perawatan artefak dan kontribusi finansial ke pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, fenomena tersebut sebenarnya adalah ajakan lembaga kemasyarakatan untuk memulai apa yang menjadi harapan selama ini agar terwujud pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*). Beberapa kelemahan dan ancaman penanganan museum situs di Tana Toraja akan diuraikan untuk dipikir dan didukung keberadaannya oleh lembaga terkait nanti.

Museum Situs, Ujung Tombak Informasi BCB

Sebelum mengurai lebih jauh tentang pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan museum situs, terminologi museum perlu dijelaskan sebagai pijakan. Menurut ICOM,

A Museum is a nonprofit making, permanent institution in the service of society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, communicates, and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and environment (Sutaarga, 1975).

Konsep museum tersebut dijadikan sebagai konsep dari pendirian Museum Nasional dan Museum Negeri di Indonesia.

Museum situs memiliki konsep pendirian dan pengembangan yang sama dengan Museum Nasional dan museum negeri. Perbedaannya, Museum Nasional dan Museum Negeri memiliki koleksi yang cakupannya luas, dari berbagai wilayah, sementara museum situs adalah suatu bangunan yang didirikan di dekat kompleks bangunan sejarah atau situs peninggalan purbakala. Di dalam museum situs tersimpan koleksi yang berasal dari kompleks bangunan bersejarah atau kepurbakalaan itu saja (Sutaarga, 1975:33).

Gagasan pembangunan museum situs di Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa sumberdaya arkeologi yang memiliki kemanfaatan bagi pembangunan ideologi, sosial dan ekonomi banyak yang hilang. Dengan pengembangan museum-museum situs yang terdistribusi di banyak daerah, kerusakan situs dan tercecernya data-data yang bersifat artefaktual dapat dieliminasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 kemudian, yang memberikan posisi hukum sangat memadai bagi usaha pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya arkeologi.

Selain tujuan pelestarian, tujuan pemanfaatan sumberdaya arkeologi juga dapat diemban oleh museum situs. Penyebaran informasi budaya yang objektivitasnya tinggi dapat disalurkan apabila koordinasi antar lembaga terkait terjalin dengan baik. Idealnya, lembaga penelitian sebaiknya menyimpan hasil-hasil penelitian pada museum situs. Dalam kerangka pemikiran ini, museum situs dapat dijadikan ujung tombak untuk mensosialisasikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 serta hasil-hasil penelitian terbaru. Dengan demikian, informasi yang disajikan tidak stagnan. Tujuan sentral untuk pemantapan ideologi, penelitian serta tujuan finansial akhirnya terpadu. Walaupun tujuan pendirian museum situs sangat berbeda bila dioposisikan dengan konsep pariwisata yang menomorsatukan segi finansial, tetapi setidaknya kemanfaatannya pada dua aspek lain (ideologi, ilmu pengetahuan) merupakan alasan objektif.

Museum sebagai salah satu pendukung industri pariwisata budaya, sudah saatnya dipikirkan posisinya dalam pembangunan kebudayaan. Dalam kaitannya dengan distribusi informasi kebudayaan, juga dapat dijadikan ujung tombak untuk *cross* informasi budaya yang sasarannya adalah wisatawan domestik. Dengan demikian dapat menopang program pendidikan formal untuk memantapkan pemahaman kesejarahan. Alur tujuan di atas secara langsung menunjuk museum situs sebagai sarana *terjemah budaya*. Peranan ini dapat diambil apabila lembaga penyelamatan, lembaga penelitian dan akademisi dapat bekerja bersama dan menjadikan lembaga swadaya masyarakat sebagai *middle man*. Bila dapat terwujud, bukankah tugas ketiga lembaga tersebut lebih enteng

Museum Situs Di Tana Toraja

Toraja merupakan daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan dengan penonjolan pada pariwisata budaya. Pesona budaya Toraja memang luar biasa. Masyarakat pemuja batu besar tersebut masih memiliki perilaku adat yang sangat tradisional (Duli, 2003). Aluk Todolo, nama kepercayaan mereka masih dijunjung tinggi sampai sekarang.

Objek-objek wisata budaya di Toraja rata-rata adalah situs arkeologi tetapi sampai sekarang masih digunakan untuk pesta-pesta adat. Objek-objek wisata tersebut dikelola oleh organisasi kesatuan adat. Inisiatif mendirikan museum mini muncul karena kesadaran masyarakat adat bahwa peninggalan tersebut harus selalu dipelihara karena ditakutkan nenek moyang (arwah) mereka akan marah dan memberikan *hukuman* kepada masyarakat Toraja. Dibangunlah museum situs atas inisiatif keluarga. Peralatan kehidupan sehari-hari serta peralatan penguburan kemudian dikumpul lalu dibuatkan cerita heroik tentang

keluarga yang diwakili.

Beberapa museum situs di Tana Toraja dapat disebutkan misalnya museum *situs Buntu Kalando* Kecamatan Sangalla, *Museum situs Kete Kesu* Kecamatan Sanggalangi dan *Museum situs Pallawa* Kecamatan Sesean. Museum situs tersebut berada di dalam lokasi objek wisata yang memamerkan rumah adat, beberapa tipe wadah kubur, patung kayu, kerangka manusia, menhir, pahatan tebing, kuburan gantung dan lain-lain. Sedangkan ketiga museum situs secara garis besar menyimpan koleksi berupa pakaian adat, pakaian perang, tenunan dan kain, pakaian kulit kayu, ukiran, lempengan emas, piring kayu, tembikar, patung-patung, perhiasan, senjata dan masih banyak lagi jenis yang tidak sempat didata secara detail. Museum situs tersebut seakan melengkapi beberapa objek wisata utama di Toraja selain keindahan alamnya.

Bila dibandingkan, museum situs yang berada di Tana Toraja memiliki perbedaan dengan museum situs yang dikelola sendiri oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar. Museum situs di Toraja dibiayai dan dikelola oleh masyarakat adat. Sedangkan museum situs yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar yang dibiayai oleh pemerintah, tidak mendapat pemeliharaan yang baik. Hanya terlihat seperti tempat penyimpanan benda-benda yang tidak diperuntukkan bagi pengunjung situs. Petugas yang berada di lokasi situs hanyalah petugas keamanan dan pemeliharaan situs, bukan untuk mengelola museum situs. Berbeda dengan museum situs di Toraja, lembaga swadaya masyarakat setempat memiliki tanggung jawab tinggi karena punya hubungan geneologi dengan peninggalan yang dikelolanya. Minimal selalu diadakan pembersihan dan perawatan.

Kondisi ketiga museum situs di Tana Toraja masih jauh dari yang diharapkan. Registrasi, identifikasi dan klasifikasi koleksi masih lemah. Demikian pula dengan penataan ruang pameran serta fasilitas pendukungnya, tidak memenuhi standar sebuah museum. Pemeliharaan dan perawatan terlihat tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Selain itu, tidak ada perpustakaan mini yang menyediakan informasi lengkap tentang situs serta manajemennya yang masih terkesan serampangan. Publikasi dan promosi wisata juga terkesan apa adanya.

Kegiatan pemeliharaan berupa pembersihan, penjagaan, perawatan, pembuatan sarana pendukung, dan pemungutan biaya masuk ke dalam situs dilakukan oleh mereka secara terkoordinasi. Pembagian pungutan biaya masuk ke situs, berdasarkan kesepakatan adalah untuk pihak pengelola 60 % dan untuk pemerintah daerah 40 %. Sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan kepada pengelola.

penting untuk dipikirkan karena pengelola tersebut bukanlah sarjana arkeologi. Karena itu pula, upaya pembinaan harus terus dilakukan dengan cara pemantauan kegiatan museum secara berkala.

Kesimpulan

Pembangunan kebudayaan adalah sebuah tanggung jawab kolektif dan semua potensi harus dipikirkan pemberdayaannya. Karena itu distribusi peranan sangat diperlukan sekarang. Ajakan masyarakat yang dicontohkan di sini dengan munculnya beberapa museum situs sudah saatnya disambut. Bukankah kebudayaan adalah warisan sosial (Childe, 1933).

Dari uraian ringkas di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal :

1. Pengelola benda cagar budaya hendaknya lebih melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara aktif agar tumbuh rasa memiliki terhadap kebudayaannya.
2. Museum situs seperti Museum Nasional dan Museum Negeri lainnya, perlu dibinakan sebagai *sarana terjemah budaya* dan basis distribusi informasi kebudayaan dan kesejarahan.
3. Pendirian dan pembinaan museum situs dalam satu kabupaten seharusnya dalam satu bingkai dengan perwajahan yang berbeda dan menghindari paralelisasi.
4. Pengelolaan museum situs secara profesional dapat menunjang program pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).
5. Model pengelolaan museum situs di Toraja belum tentu cocok diterapkan di daerah lain, tergantung kondisi masyarakat dan spesifikasi museum situs tersebut.

Daftar Pustaka

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar

2014 *Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.

Childe, V.G. 1933. "Race, People and Cultures in Prehistoric Europe". Dalam *History* No. 8.

Cleere, H.F. (Ed). 1989. "Archaeological Heritage Management in The Modern World. London, Unwin Hy-Man.

Duli, Akin. 2003. *Toraja, Dulu dan Kini*. Pustaka Refleksi. Makassar.

Mahmud, Irfan. (Ed). 2001. *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Lephass. Makassar.

Nur, Muhammad. 2001. "Museum Situs, Potret Zaman Yang Belum Terberdayakan", dalam *Memediasi Masa Lalu, Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*. Lephass. Makassar.

Sutaarga, Amir. 1975, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.



Muh. Nur, SS, MA.

Dosen Jurusan Arkeologi FIB Unhas